

LKPJ

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA PAREPARE



2021





WALIKOTA PAREPARE

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Parepare Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2018-2023, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Parepare Tahun 2021 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Parepare selama satu tahun anggaran, pada Tahun 2021. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, merupakan rangkaian pelaksanaan pembangunan, baik berupa capaian makro maupun mikro yang diukur berdasarkan capaian misi dan sasaran Pembangunan Kota Parepare, serta rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare (RPJMD) Tahun 2018-2023. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare Tahun 2021 ini, disusun dengan telah menyesuaikan format sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sepanjang Tahun Anggaran 2021, pelaksanaan pembangunan Kota Parepare meskipun berada dalam kondisi pandemi covid-19, namun tetap dapat dilaksanakan secara optimal sehingga tetap mampu meningkatkan kualitas pembangunan kota.

Naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini terdiri dari Nota Pengantar yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Parepare terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare Tahun Anggaran 2021 dan naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare Tahun 2021 itu sendiri.

Melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, diharapkan menjadi bahan bagi DPRD Kota Parepare untuk memberikan tanggapan dan masukan dalam bentuk rekomendasi kepada Walikota Parepare, berupa catatan strategis yang memuat saran dan koreksi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2021, yang untuk selanjutnya untuk menjadi bahan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun selanjutnya.

Akhirnya, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Parepare, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Satuan Perangkat Daerah Kota Parepare, para tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta seluruh komponen masyarakat Kota Parepare, yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungannya dalam menyukseskan pelaksanaan tugas-tugas kami selaku Walikota Parepare.

Semoga, seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua, serta semoga penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Parepare, senantiasa mendapat perlindungan, kekuatan, dan petunjuk Allah SWT, Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Parepare,

Maret 2022


WALIKOTA PAREPARE,
DR. H. M. TAUFAN PAWE, SH, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. DASAR HUKUM.....	1
2. VISI DAN MISI.....	3
a. Tujuan dan Sasaran	5
b. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.....	6
c. Prioritas Pembangunan Daerah Jangka Menengah	10
d. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahunan.....	10
e. Prioritas Pembangunan Daerah Tahunan	12
3. DATA UMUM DAERAH.....	12
a. Kondisi Geografis Wilayah.....	12
b. Gambaran Umum Demografis.....	14
c. Jumlah Aparatur Sipil Negara	16
d. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	18
e. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	21
f. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	23
 BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	 25
1. PENDAPATAN DAERAH.....	26
a. Kebijakan Pendapatan Daerah.....	26
b. Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah.....	27
2. BELANJA DAERAH.....	29
a. Kebijakan Belanja Daerah	29
b. Perubahan Belanja Daerah.....	30
3. PEMBIAYAAN DAERAH.....	32
 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	 34
1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	34
a. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	35
1) Pendidikan.....	35
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.....	35
2) Kesehatan.....	43
DINAS KESEHATAN.....	43
RSUD ANDI MAKKASAU	54
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	56
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	56
4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	75
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.....	75
5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	79
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	79
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.....	83

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	87
6) Sosial	91
DINAS SOSIAL	91
b. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan	
Dasar.....	100
1) Tenaga Kerja.....	100
DINAS TENAGA KERJA	100
2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	105
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	105
3) Pangan	114
DINAS KETAHANAN PANGAN	114
4) Pertanahan	120
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.....	120
5) Lingkungan Hidup	121
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	121
6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	132
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	132
7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	138
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	138
8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	141
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	141
9) Perhubungan.....	146
DINAS PERHUBUNGAN.....	146
10) Komunikasi dan Informatika.....	151
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	151
11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	158
DINAS TENAGA KERJA.....	158
12) Penanaman Modal.....	160
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	160
13) Kepemudaan dan Olahraga.....	166
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.....	166
14) Statistik.....	172
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	172
15) Persandian.....	173
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	173
16) Kebudayaan.....	174
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	174
17) Perpustakaan.....	176
DINAS PERPUSTAKAAN.....	176
18) Kearsipan.....	180
DINAS PERPUSTAKAAN.....	180
c. Urusan Pilihan	181
1) Kelautan dan Perikanan.....	181
DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	181

2) Pariwisata.....	184
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.....	184
3) Pertanian.....	187
DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	187
4) Perdagangan.....	193
DINAS PERDAGANGAN.....	193
5) Perindustrian.....	198
DINAS PERDAGANGAN.....	198
d. Unsur Pendukung	200
1) Sekretariat Daerah.....	200
BAGIAN PEMERINTAHAN.....	200
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	201
BAGIAN HUKUM	202
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	204
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.....	204
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	205
BAGIAN ORGANISASI	207
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOLER.....	209
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN.....	213
2) Sekretariat DPRD.....	215
SEKRETARIAT DPRD	215
e. Unsur Penunjang	222
1) Perencanaan	222
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	222
2) Keuangan	230
BADAN KEUANGAN DAERAH.....	230
3) Kepegawaian	238
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	238
4) Pendidikan & Pelatihan	246
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	246
5) Penelitian dan Pengembangan.....	247
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	247
f. Unsur Pengawasan.....	249
1) Pengawasan	249
INSPEKTORAT.....	249
g. Unsur Kewilayahan.....	254
1) Kewilayahan	254
KECAMATAN BACUKIKI.....	254
KECAMATAN BACUKIKI BARAT.....	260
KECAMATAN SOREANG.....	266
KECAMATAN UJUNG.....	271
h. Unsur Pemerintahan Umum	278
1) Kesatuan Bangsa dan Politik.....	278
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	278
2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	288
3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD.....	288

BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	303
1.	DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN....	303
2.	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	303
3.	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	303
4.	PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	303
BAB V	PENUTUP	304

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dimaksudkan sebagai informasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare Tahun Anggaran 2021 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang sistematis penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1. DASAR HUKUM

Parepare terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan dan Pembagian Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dengan status Kota Praja bersama dengan empat daerah lainnya yang berstatus *onder afdelling*, yaitu ; Kabupaten Tingkat II Barru, Kabupaten Tingkat II Sidrap, Kabupaten Tingkat II Pinrang dan Kabupaten Tingkat II Enrekang. Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka status Kotamadya berganti menjadi kota yang dipergunakan sampai sekarang ini.

Berdasarkan tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, serta Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 1970, maka tanggal 17 Februari 1960 ditetapkan sebagai hari kelahiran Kota Parepare.

Sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses akuntabilitas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare Tahun 2021 disusun dan disampaikan kepada DPRD Kota Parepare sebagai bahan untuk penyempurnaan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Parepare pada masa yang akan datang.

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Walikota Parepare Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 33).

2. VISI DAN MISI

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Parepare Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Kota Parepare adalah **“Terwujudnya Masyarakat Maju Yang Religius dan Berdaya Tahan Lingkungan”**. RPJPD merupakan dokumen perencanaan bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dan menjadi pedoman untuk penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran RPJPD arahan-arahan pembangunan daerah pada tahapan ketiga dan keempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, maka visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah, yang menggambarkan arah pembangunan daerah atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban.

Oleh karena itu, Visi dan Misi yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kota Parepare merupakan Visi dan Misi yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada saat kampanye, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kota Parepare untuk Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap Yang Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri dan Berkarakter”

Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2018-2023 memiliki lima kata kunci yang dapat diartikan sebagai berikut :

1. ***Industri Tanpa Cerobong Asap***, diartikan bahwa Pemerintah Kota Parepare dengan keterbatasan sumber daya alam, bergerak cepat dengan inovasi kuat, serta melibatkan semua *stakeholders* dalam perkuatan sektor jasa dan industry. Sehingga tujuan dan harapan yang ingin dicapai, yaitu : menghadirkan pembangunan infrastruktur di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.

2. **Hak Dasar dan Pelayanan Dasar**, diartikan diartikan bahwa Pemerintah Kota Parepare telah mampu menerjemahkan dengan baik perintah konstitusi dan undang-undang kaitannya dengan era otonomi daerah yang berkaitan dengan urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang mandiri dan berhasil, apabila suatu daerah sudah mampu mengelola sendiri daerahnya dengan perkuatan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan hak dasar dan pelayanan dasar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945.
3. **Maju**, diartikan bahwa Pemerintah Kota Parepare dengan dukungan dan peran serta masyarakat dalam memerankan posisi masing-masing, diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang terbarukan serta mempunyai daya saing. Sehingga produk kebijakan diharapkan bersesuaian dengan keinginan masyarakat menuju masyarakat mandiri yang diikuti pula dengan hadirnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan mandiri pula.
4. **Mandiri**, diartikan bahwa dengan hadirnya sinergitas antara tata kelola pemerintahan dan perkuatan sumber daya manusia terbarukan, maka diharapkan adanya kemampuan daerah dalam memerankan fungsi pelayanan menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan dalam segala lini, selain itu dapat juga dikatakan, bahwa mandiri apabila mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
5. **Berkarakter**, diartikan bahwa Pemerintah Kota Parepare mempunyai inovasi kuat untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur dan keumatan yang bersesuaian dengan karakter kearifan lokal menuju pembangunan manusia seutuhnya dalam rangka menuju Indonesia Emas yang diawali dengan pendidikan karakter yang kuat dan tangguh.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.
2. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional, serta berkeadilan.
3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian, serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (*Smart City*) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
6. Mengembangkan iklim keumatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya.

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023 tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Misi Pertama adalah Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan, dengan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur strategis bidang kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan

Sasaran : 1. Meningkatnya kontribusi sektor jasa kesehatan
2. Meningkatnya kontribusi sektor jasa pendidikan
3. Meningkatnya kontribusi sektor jasa pendidikan

Misi Kedua adalah Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional, serta berkeadilan, dengan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur strategis bidang kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.

Sasaran : 1. Meningkatnya mutu pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Misi Ketiga adalah Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian, serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki, dengan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan

Sasaran : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
3. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja
4. Terjaganya daya dukung lingkungan secara berkelanjutan dalam kegiatan perekonomian daerah.

Misi Keempat adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter, dengan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

Sasaran : 1. Meningkatnya derajat kesehatan
2. Meningkatnya derajat kesehatan
3. Meningkatnya daya beli masyarakat
4. Meningkatnya kesetaraan gender
5. Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak

Misi Kelima adalah Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (*Smart City*) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel, dengan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif
Sasaran : 1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Misi Keenam adalah Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya, dengan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Mendorong iklim keummatan untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat berbasis budaya lokal

Sasaran : 1. Meningkatnya kerukunan antar umat keagamaan

b. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai selama lima tahun, maka rumusan strategi pembangunan daerah Kota Parepare tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan berbasis regional.
2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi tenaga medis untuk mewujudkan pencapaian peningkatan kontribusi lapangan usaha kesehatan terhadap PDRB.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan pemanfaatan TIK, untuk mewujudkan pencapaian peningkatan kontribusi lapangan usaha Pendidikan terhadap PDRB.
5. Meningkatkan kualitas daya tarik wisata, pengembangan destinasi wisata, event wisata.
6. Meningkatkan upaya promosi wisata.
7. Meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat agar dapat hidup secara layak.
8. Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital/teknologi informasi.
9. Memperkuat dukungan infrastruktur kota pada pusat-pusat ekonomi baru dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
10. Meningkatkan daya saing UMKM dan usaha produktif masyarakat.
11. Meningkatkan kualitas SDM, pembukaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja usia produktif daerah.
12. Mengendalikan pencemaran lingkungan akibat aktifitas perekonomian.
13. Meningkatkan akses dan fasilitas pendidikan berbasis IPTEK.
14. Meningkatkan kualitas dan cakupan pendidikan gratis.
15. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana kesehatan.
16. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
17. Meningkatkan kapasitas, peran, dan perlindungan perempuan dan anak dalam

- pembangunan.
18. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan budaya kerja, penataan organisasi pemerintahan yang bersih, tertib regulasi, peningkatan pengawasan internal dan mengoptimalkan pemanfaatan TIK.
 19. Mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
 20. Mengoptimalkan peran organisasi keagamaan dalam pencegahan dini potensi konflik antar umat beragama.
 21. Penguatan kapasitas dan kinerja FKDM serta peningkatan peran dan partisipasi masyarakat

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan, maka strategi pembangunan dirumuskan pada setiap sasaran RPJMD yang terinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Strategi Pembangunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2021-2023

V i s i			
Terwujudnya Kota Parepare sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap yang Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri dan Berkarakter			
Misi ke-1			
Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan			
No.	T u j u a n	S a s a r a n	Strategi
1.	Meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur strategis bidang kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan	1. Meningkatnya kontribusi sektor jasa kesehatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan berbasis regional 2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi tenaga medis untuk mewujudkan pencapaian peningkatan kontribusi lapangan usaha Kesehatan terhadap PDRB
		2. Meningkatnya kontribusi sektor jasa pendidikan	1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas 2. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan pemanfaatan TIK, untuk mewujudkan pencapaian peningkatan kontribusi lapangan usaha Pendidikan terhadap PDRB

		3. Meningkatkan kontribusi sektor jasa kepariwisataan	1. Meningkatkan kualitas daya tarik wisata, pengembangan destinasi wisata, event wisata 2. Meningkatnya upaya promosi wisata
Misi ke-2			
Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional, serta berkeadilan			
No.	T u j u a n	S a s a r a n	Strategi
1.	1. Memberikan pelayanan yang prima dan profesional serta mengoptimalkan pemenuhan hak dasar masyarakat	4. Meningkatnya mutu pelayanan dasar	Meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat agar dapat hidup secara layak
		5. Meningkatnya pelayanan publik	Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital/teknologi informasi
Misi ke-3			
Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki			
No.	T u j u a n	S a s a r a n	Strategi
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan	6. Meningkatnya nilai produksi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Memperkuat dukungan infrastruktur kota pada pusat-pusat ekonomi baru dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya dengan mengendalikan pencemaran lingkungan akibat aktifitas ekonomi dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
		7. Menurunnya ketimpangan dan persentase penduduk miskin	Meningkatkan daya saing UMKM dan usaha produktif masyarakat
		8. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	Meningkatkan kualitas SDM, pembukaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja usia produktif di daerah
Misi ke-4			
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter			
No.	T u j u a n	S a s a r a n	Strategi
1.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	9. Meningkatnya derajat pendidikan	1. Meningkatkan akses dan fasilitas pendidikan berbasis lptek

			2. Meningkatkan kualitas dan cakupan Pendidikan gratis
		10. Meningkatnya kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana kesehatan
		11. Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan pendapatan masyarakat
		12. Meningkatnya kesetaraan gender	Meningkatkan kapasitas, peran dan perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan
		13. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak
Misi ke-5			
Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel			
No.	T u j u a n	S a s a r a n	Strategi
1.	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif	14. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan pemerintahan yang inovatif	1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan budaya kerja, penataan organisasi pemerintahan yang bersih, tertib regulasi, peningkatan pengawasan internal dan mengoptimalkan pemanfaatan TIK 2. Mengembangkan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik
Misi ke-6			
Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya			
No.	T u j u a n	S a s a r a n	Strategi
1.	Mendorong iklim keummatan untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat berbasis budaya lokal	15. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Mengoptimalkan peran organisasi keagamaan dalam pencegahan dini potensi konflik antar umat beragama
		16. Meningkatnya partisipasi masyarakat berbasis pemberdayaan	Penguatan kapasitas dan kinerja FKDM, serta peningkatan peran dan partisipasi masyarakat

c. Prioritas Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Memperhatikan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Parepare tahun 2018-2023 yang tertuang pada RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023, serta perubahan RPJMD Kota Parepare Tahun 2021-2023, maka prioritas pembangunan daerah Kota Parepare ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan.
- 2. Pengembangan infrastruktur daerah pada kawasan pertumbuhan.
- 3. Pengembangan ketahanan pangan, serta peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan.
- 4. Peningkatan pelayanan dan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan inklusif.
- 5. Peningkatan pengelolaan Lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
- 6. Peningkatan kapasitas SDM ASN menuju reformasi birokrasi yang melayani.

d. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahunan

Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Parepare untuk tahun 2021, yang dirinci menurut strategi dipilih untuk merumuskan kerangka pikir sebagai upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengatasi isu strategis daerah, serta isu perangkat daerah secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi pembangunan. Adapun arah kebijakan tahun 2021 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Parepare Tahun 2021

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan berbasis regional	Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan skala regional yang berkualitas, serta pengembangan rumah sakit rujukan
2.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Aklerasi percepatan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi
3.	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata, pengembangan destinasi wisata, event wisata	Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata baru, serta pagelaran seni, budaya untuk tujuan wisata
4.	Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital/teknologi informasi	Meningkatakan kualitas dan kuantitas layanan publik berbasis teknologi informasi
5.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	1. Penyiapan sarana dan prasarana diikuti peningkatan kualitas layanan kesehatan
		2. Penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas serta peningkatan layanan sesuai SPM
		3. Meningkatkan promosi, informasi dan edukasi preventif hidup sehat

No.	Strategi	Arah Kebijakan
6.	Meningkatkan jaminan pemerataan kesempatan pendidikan untuk semua	Peningkatan kualitas dan standar mutu penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, dan non formal
7.	Meningkatkan ketersediaan pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat	Penguatan kecukupan minimal dan peningkatan akses kebutuhan pangan dan cadangan pangan
8.	Menerapkan kebijakan kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan	Penguatan kelembagaan kesejahteraan gender, dan pemberdayaan perempuan
9.	Menyebarkan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak	Penguatan kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak
10.	Memperkuat dukungan infrastruktur kota pada pusat-pusat ekonomi baru dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Peningkatan akses dan kualitas jaringan infrastruktur kota, serta membuka koneksitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (diantaranya pembangunan <i>Mattirotsi Water Park</i> dan <i>Anjungan CempaE</i>) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
11.	Meningkatkan peluang kerja usia produktif dan perluasan lapangan usaha di daerah	Peningkatan peluang kerja usia produktif dan peningkatan iklim usaha bagi UMKM
12.	Meningkatkan ketersediaan dan distribusi barang dan bahan pokok utama	Peningkatan fasilitas jaringan perdagangan dan upaya perlindungan konsumen terhadap bahan pokok utama
13.	Meningkatkan daya saing dan usaha produktif masyarakat	Memperkuat jaringan pemasaran produk dan pengembangan usaha padat karya (<i>home industry</i>)
14.	Meningkatkan upaya pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin	Memperkuat sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan, termasuk identifikasi kebutuhan dasar warga miskin
15.	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	Akselerasi peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
16.	Meningkatkan akses dan fasilitas pendidikan berbasis iptek	Peningkatan standar mutu pendidikan diringi peningkatan kemampuan anak didik dalam memahami IPTEK
17.	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan luar sekolah dan keterampilan masyarakat	Pembinaan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang berhubungan keterampilan masyarakat
18.	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan budaya kerja	Peningkatan kapabilitas aparatur dalam penyelenggaraan
19.	Penataan organisasi pemerintahan yang bersih, tertib regulasi, peningkatan pengawasan internal, diringi dengan pemanfaatan teknologi informasi	Pemerintahan yang bersih, tertib regulasi, penguatan pengawasan internal berbasis teknologi informasi

No.	Strategi	Arah Kebijakan
20.	Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik yang lebih responsif dan inovatif	Pengembangan “ <i>smart city</i> ” dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik
21.	Peningkatan kualitas layanan umat beragama	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan yang menjunjung tinggi nilai toleransi
22.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang reponsif dan meningkatkan kemitraan dengan swasta	Pelembagaan sistem perencanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, responsif dan lebih partisipatif melalui pengembangan dan peningkatan peran swasta dalam pembangunan

e. Prioritas Pembangunan Daerah Tahunan

Penetapan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi implementasi dokumen perencanaan daerah, isu-isu strategis daerah, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Sehingga tema pembangunan daerah tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, yaitu : **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Melalui Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Publik”**, dengan prioritas pembangunan, sebagai berikut :

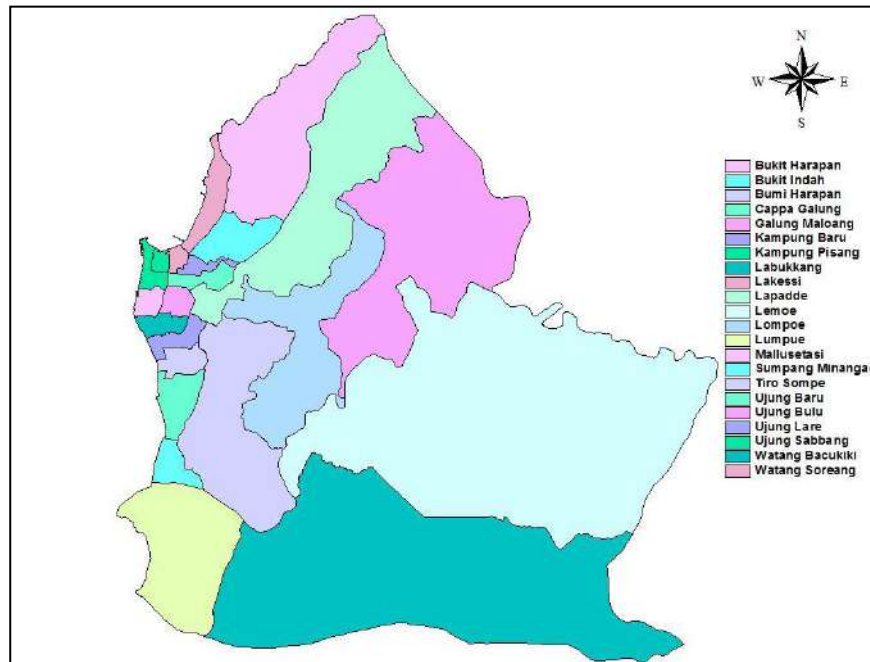
1. Pengembangan Infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar.
2. Peningkatan kultas dan akses pendidikan.
3. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan.
4. Pengembangan kepariwisataan daerah.
5. Pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan.
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

3. DATA UMUM DAERAH

a. Kondisi Geografis Wilayah

Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan.Baik itu arah utara–selatan, maupun arah timur-barat. Sesuai dengan arahan pengembangan wilayah, maka Kota Parepare merupakan pusat pelayanan antar wilayah untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan.Sebagai pusat pelayanan antar wilayah, Pemerintah Daerah Kota Parepare mengaktualisasikannya dalam visi sebagai kota industri tanpa cerobong asap yang bertumpuh pada tiga sektor prioritas, yaitu ; sektor pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Dalam rencana strategis pembangunan daerah Kota Parepare, secara garis besar dapat digambarkan sebagai sebuah kota

dengan fungsi dan peran yang perlu didukung dengan berbagai kebijakan-kebijakan pembangunan dalam menunjang perwujudan dan pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut. Sehingga dengan demikian maka fasilitas pelayanan layanan dasar dikembangkan di kota ini.



Gambar 1.1.Peta Wilayah Administrasi Kota Parepare

Secara geografis, Kota Parepare terletak pada posisi 3° 57' 39" - 4° 04' 49" Lintang Selatan dan 119° 36' 24" - 119° 43' 40" Bujur Timur, serta secara administratif berbatasan dengan :

- 1) Timur : Kabupaten Sidrap
- 2) Selatan : Kabupaten Barru
- 3) Barat : Selat Makassar
- 4) Utara : Kabupaten Pinrang

Secara kewilayahan, Kota Parepare merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota yang berada di Sulawesi Selatan. Kota Parepare merupakan kota dari tiga kota yang ada di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah $\pm 99,33 \text{ Km}^2$ dan secara wilayah administratif dibagi dalam 4 kecamatan dan 22 kelurahan, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Bacukiki Barat, terdiri atas 6 kelurahan, yaitu ; Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Tiro Sompe; dan Kelurahan Lumpue.
- 2) Kecamatan Bacukiki, terdiri atas 4 kelurahan, yaitu ; Kelurahan Lemo, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Watang Bacukiki; dan Kelurahan Galung Maloang.
- 3) Kecamatan Ujung, terdiri atas 5 kelurahan, yaitu ; Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Labukkang, Kelurahan Lapadde, Kelurahan Ujung Bulu; dan Kelurahan Ujung Sabbang.

- 4) Kecamatan Soreang, terdiri atas 7 Kelurahan, yaitu; Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Lakesi, Kelurahan Ujung Baru, Kelurahan Ujung Lare; dan Kelurahan Watang Soreang.

Ditinjau dari aspek topografi, wilayah Kota Parepare terdiri dari daerah datarsampai bergelombang, dengan klasifikasi kurang lebih 80 persen luas daerahnya merupakan daerah perbukitan dan sisanya daerah dataran dengan ketinggian 7 - 53 meter diatas permukaan laut (DPL).

Kota Parepare sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian atau perbukitan terutama pada wilayah Kecamatan Bacukiki dengan ketinggian >50 meter DPL. Khusus untuk Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang, berada pada ketinggian 0-43 m DPL. Dengan kondisi seperti inimemperlihatkan bahwa morfologi Kota Parepare terbagi atas morfologi rendah dan tinggi (perbukitan/pegunungan)

b. Gambaran Umum Demografis

Penduduk menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, didefinisikan warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Namun demikian juga dapat menjadi hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan pembangunan.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, jumlah penduduk Kota Parepare Tahun 2021 sebesar 154.524 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 76.663 jiwa dan perempuan sebanyak 77.861 jiwa. Sebaran penduduk Kota Parepare yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Soreang yaitu 48.082 jiwa. Disusul kemudian Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 46.606 jiwa, selanjutnya Kecamatan Ujung dengan 35.391 jiwa dan distribusi penduduk jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Bacukiki sebanyak 24.445 jiwa.

Berikut uraian distribusi dan sebaran penduduk Kota Parepare, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK		JUMLAH	PERSEN-TASE (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	BACUKIKI	12.203	12.242	24.445	15.82
2	UJUNG	17.484	17.907	35.391	22.90
3	SOREANG	24.001	24.081	48.082	31.12
4	BACUKIKI BARAT	22.975	23.631	46.606	30.16
	JUMLAH	76.663	77.861	154.524	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Pertumbuhan penduduk di Kota Parepare sepanjang Tahun 2021, mencapai 2,34 persen atau terjadi penambahan penduduk sebanyak 3.537 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk terbesar tercatat di Kecamatan Bacukiki sebesar 5,48 persen, disusul Kecamatan Ujung yang tumbuh 2,06 persen, kemudian Kecamatan Bacukiki Barat mencapai 1,93 persen dan angka pertumbuhan penduduk terkecil terjadi di Kecamatan Soreang sebesar 1,41 persen.

Tabel 1.4. Pertumbuhan Penduduk Kota Parepare Per Kecamatan Tahun 2020-2021

NO.	KECAMATAN	TAHUN		PERTUMBUHAN (%)
		2020	2021	
1.	BACUKIKI	23.176	24.445	5,48
2.	UJUNG	34.676	35.391	2,06
3.	SOREANG	47.413	48.082	1,41
4.	BACUKIKI BARAT	45.722	46.606	1,93
	JUMLAH	150.987	154.524	2,34

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Tingginya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bacukiki dipengaruhi oleh penduduk lahir sebanyak 292 jiwa, penduduk yang pindah datang antar kecamatan sebanyak 746 jiwa dan merupakan angka tertinggi, dan pindah datang dari luar kota sebanyak 585 jiwa. Sedangkan penduduk Kecamatan Bacukiki yang meninggal sebanyak 150 jiwa, keluar dari kecamatan 94 jiwa, serta pindah keluar kota sebanyak 110 jiwa. Dengan demikian penambahan penduduk di Kecamatan Bacukiki mencapai 1.269 jiwa.

Pada Kecamatan Ujung penambahan penduduknya sebanyak 715 jiwa, dengan penduduk lahir sebanyak 414 jiwa, datang dalam kecamatan mencapai 505 jiwa, dan pindah datang dari luar kota sejumlah 721 jiwa. Dengan faktor pengurang yaitu penduduk meninggal sebanyak 391 jiwa, keluar dalam kecamatan sejumlah 181 jiwa, serta pindah keluar kota mencapai 353 jiwa.

Pertambahan penduduk di Kecamatan Soreang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang mencapai 444 jiwa, datang dalam kecamatan sebanyak 357 jiwa dan pindah datang dari luar kota yang mencapai 861 jiwa. Namun angka kematian yang mencapai 494 jiwa, keluar dari kecamatan sebanyak 326 jiwa, serta 173 jiwa pindah keluar kota. Sehingga penambahan penduduk di Kecamatan Soreang mencapai 669 jiwa.

Untuk Kecamatan Bacukiki Barat, angka kelahirannya mencapai 522 jiwa yang merupakan angka kelahiran tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Jumlah penduduk datang dalam kecamatan sebanyak 427 jiwa dan 840 penduduk pindah datang dari luar kota juga merupakan yang terbanyak. Sedangkan jumlah penduduk yang meninggal mencapai 460 jiwa, serta penduduk keluar kecamatan mencapai 131 jiwa dan 314 jiwa penduduk yang pindah keluar kota. total penambahan penduduk di Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 884 jiwa.

Untuk Kecamatan Bacukiki Barat angka kelahirannya mencapai 1.072 jiwa yang merupakan angka kelahiran tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Jumlah penduduk datang dalam kecamatan sebanyak 2.962 jiwa yang juga angka tertinggi dibanding kecamatan lainnya dan 2.066 penduduk pindah datang dari luar kota juga merupakan yang terbanyak. Sedangkan jumlah penduduk yang meninggal mencapai 590 jiwa yang juga merupakan angka tertinggi dibanding kecamatan lainnya, serta penduduk keluar kecamatan mencapai 3.823 jiwa dan 2.618 jiwa penduduk yang pindah keluar kota.

c. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, dijalankan oleh aparatur sipil negara (ASN). Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu, dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*), serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*). Untuk itu eksistensi ASN menjadi penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan.

Untuk itu, maka pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana diuraikan diatas, Pemerintah Daerah Kota Parepare berdasarkan data per 31 Desember 2021, didukung oleh 3.654 orang ASN. Proporsi ASN Pemerintah Daerah Kota Parepare berdasarkan kelamin didominasi perempuan, dengan perbandingan yaitu 1 : 2. ASN yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.272 orang atau 62,18 persen, sedangkan ASN yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.382 orang atau 37,82 persen dari total ASN.

Menurut distribusi kelompok umur, ASN Pemerintah Daerah Kota Parepare didominasi usia 41-50 tahun sebanyak 32,57 persen atau sebanyak 1.190 orang, selanjutnya kelompok usia terbanyak kedua adalah usia 31-40 tahun sebanyak 31,09 persen atau 1.136 orang. Sedangkan kelompok usia 51-60 tahun mencapai 1.065 orang atau 29,15 persen dan kelompok umur 20-30 tahun memiliki jumlah 258 orang atau 7,06 persen. Khusus kelompok usia 60-65 tahun dengan persentase kelompok usia terkecil yaitu 0,14 persen dengan jumlah 5 orang.

Secara kualitas, ASN Pemerintah Daerah Kota Parepare berdasarkan pendidikan formalnya, terdapat 69,65 persen atau 2.545 orang merupakan lulusan Strata 1 (S1). Sedangkan yang pendidikan SMA ke bawah berjumlah 11,88 persen atau 434 orang dan Diploma sebanyak 8,57 persen atau 313 orang. Proporsi ASN dengan pendidikan terakhir Strata 2 (S2) 359 orang atau 9,82 persen dan 0,08 persen atau 3 orang dengan Pendidikan Strata 3 (S3).

Uraian jumlah dan keadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2021 berikut ini :

Tabel 1.5 Perincian Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2021

NO.	NAMA INSTANSI	JENIS KELAMIN			USIA (TAHUN)						P E N D I D I K A N										%
		PRIA	WANITA	JUMLAH	20-30	31-40	41-50	51-60	61-65	JUMLAH	SD	SLTP	SLTA	D.1	D.2	D.3	S.1	S.2	S.3	JUMLAH	
1	Sekretariat Daerah	48	62	110	8	46	47	9	-	110	-	-	10	-	-	3	76	21	-	110	3.03
2	Sekretariat DPRD	27	11	38	0	10	24	4	-	38	-	-	14	-	-	1	17	6	-	38	1.05
3	Inspektorat Kota	27	20	47	11	13	14	9	-	47	-	-	-	-	-	-	34	12	1	47	1.30
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	24	18	42	3	21	15	3	-	42	-	-	9	-	-	6	15	12	-	42	1.16
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	15	25	1	4	9	11	-	25	-	-	2	-	-	1	19	3	-	25	0.69
6	Badan Keuangan Daerah	54	31	85	3	17	44	21	-	85	1	-	13	-	-	1	56	14	-	85	2.34
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	6	19	0	8	6	5	-	19	-	-	4	-	-	-	12	3	-	19	0.52
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18	16	34	6	10	14	4	-	34	-	-	2	-	-	2	21	9	-	34	0.94
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata	18	14	32	4	12	13	3	-	32	-	-	3	-	-	3	22	4	-	32	0.88
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	7	21	2	6	6	7	-	21	-	-	4	-	-	2	14	1	-	21	0.58
11	Dinas Kesehatan	199	648	847	75	341	279	148	4	847	1	1	60	2	-	204	503	76	-	847	23.35
12	Dinas Ketahanan Pangan	17	8	25	1	4	9	11	-	25	-	-	8	-	-	-	14	3	-	25	0.69
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	21	11	32	6	10	11	5	-	32	-	-	6	-	-	4	16	6	-	32	0.88
14	Dinas Lingkungan Hidup	58	10	68	2	15	32	19	-	68	3	3	24	-	-	2	30	6	-	68	1.87
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35	25	60	11	16	28	5	-	60	-	-	9	-	-	3	37	11	-	60	1.65
16	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	34	5	39	1	13	13	12	-	39	-	-	19	-	-	1	17	2	-	39	1.07
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	16	19	-	5	12	2	-	19	-	-	1	-	-	1	12	5	-	19	0.52
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	16	18	34	2	9	15	8	-	34	-	-	3	-	-	3	21	7	-	34	0.94
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	432	1,089	1,521	95	428	375	622	1	1,521	-	4	115	2	46	10	1,260	84	-	1,521	41.92
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	13	19	0	4	4	11	-	19	-	-	1	-	-	-	14	3	1	19	0.52
21	Dinas Perdagangan	20	20	40	2	9	25	4	-	40	-	1	4	-	-	-	31	4	-	40	1.10
22	Dinas Perhubungan	34	8	42	1	10	14	17	-	42	-	1	14	-	-	1	23	3	-	42	1.16
23	Dinas Perpustakaan	13	16	29	1	5	14	9	-	29	-	-	1	-	1	1	17	9	-	29	0.80
24	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	23	44	67	8	18	20	21	-	67	-	-	2	-	-	4	38	22	1	67	1.85
25	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	26	16	42	6	15	15	6	-	42	-	-	6	-	-	1	31	4	-	42	1.16
26	Dinas Sosial Kota	14	13	27	1	8	8	10	-	27	-	1	3	-	-	2	18	3	-	27	0.74
27	Dinas Tenaga Kerja	27	15	42	2	11	17	12	-	42	-	-	6	-	-	1	27	8	-	42	1.16
28	Satuan Polisi Pamong Praja	35	8	43	1	10	20	12	-	43	-	-	14	-	-	-	24	5	-	43	1.19
29	Kecamatan Bacukiki Barat	29	31	60	3	15	30	12	-	60	-	-	13	-	-	1	43	3	-	60	1.65
30	Kecamatan Bacukiki	18	15	33	1	7	13	12	-	33	-	-	10	1	-	-	21	1	-	33	0.91
31	Kecamatan Soreang	40	25	65	1	19	29	16	-	65	-	1	21	-	1	2	36	4	-	65	1.79
32	Kecamatan Ujung	29	18	47	0	17	15	15	-	47	-	-	16	-	-	-	26	5	-	47	1.30
JUMLAH		1,382	2,272	3,654	258	1,136	1,190	1,065	5	3,654	5	12	417	5	48	260	2,545	359	3	3,654	100.00
%		37.82	62.18	100.00	7.06	31.09	32.57	29.15	0.14	100.00	0.14	0.33	11.41	0.14	1.31	7.12	69.65	9.82	0.08	100.00	

d. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan. Untuk itu, Pemerintah Kota Parepare telah menerapkan peraturan tersebut pada penyusunan APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2021. Sehingga uraian realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah telah menyesuaikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diuraikan selanjutnya.

Pendapatan daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat.

Pendapatan daerah Pemerintah Kota Parepare pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.976.034.142.622,00,- dengan realisasi sebesar Rp.865.702.569.602,00,- atau 88,70 persen dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.6. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2020 (Rp.)	TAHUN 2021			PER- TUM- BUHAN (%)
			ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	
1.	Pendapatan Asli Daerah	161.232.039.033,81	154.536.475.894,00	162.916.025.211,00	105,42	1,04
2.	Pendapatan Transfer	609.590.576.819,82	764.534.922.483,00	678.941.546.873,00	88,80	11,38
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	63.406.761.779,00	56.962.744.245,00	23.844.997.518,00	41,86	-62,39
JUMLAH		834.229.377.632,63	976.034.142.622,00	865.702.569.602,00	88,70	3,77

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

Dari uraian pada tabel tersebut, maka tergambar secara jelas bahwa pencapaian atau realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021 belum mencapai target atau terdapat selisih lebih kurang Rp.110.331.573.000,00,- atau tingkat pencapaian hanya sebesar 88,70 persen dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah

Bagian Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2020 (Rp.)	TAHUN 2021			PER- TUM- BUHAN (%)
			ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	
1.	Pajak Daerah	32.601.904.835,70	35.679.790.434,00	36.288.891.979,65	101,71	11,31
2.	Retribusi Daerah	5.869.616.961,00	8.830.594.665,00	5.715.078.423,21	64,72	-2,63
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.670.545.436,00	9.096.237.651,00	9.122.099.569,00	100,28	5,21
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	114.089.971.801,11	100.929.853.144,00	111.789.955.239,14	110,76	-2,02
JUMLAH		161.232.039.033,81	154.536.475.894,00	162.916.025.211,00	105,42	1,04

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

(1) Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.35.679.790.434,00,- dan sampai akhir Tahun Anggaran 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp.36.288.891.979,65,- atau sebesar 101,71 persen, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp.609.101.545,65,-.

(2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditargetkan sebesar Rp.8.830.594.665,00,- yang sampai akhir Tahun Anggaran 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp.5.715.078.423,21 atau sebesar 64,72 persen. Dengan demikian terjadi selisih kurang dari target penerimaan sebesar Rp.3.115.516.241,79,-.

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bagian Laba atas Penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD), atau pendapatan deviden Bank Sulselbar atas penyertaan saham pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.9.096.237.651,00,- yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp.9.122.099.569,00,- atau sebesar 100,28 persen. Pendapatan tersebut bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atau deviden atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

(4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Terkait dengan pengelolaan pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp.100.929.853.144,00,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.111.789.955.239,14,- atau 110,76 persen melebihi dari target sebesar Rp.10.860.102.095,14. Hal ini disebabkan penerimaan jasa giro, pendapatan denda atas keterlambatan yang mengalami kenaikan cukup signifikan.

2) **Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.764.534.922.483,00,- dengan realisasi sebesar Rp.678.941.546.873,00,- atau 88,80 persen. Bagian Dana Perimbangan terdiri dari :

Tabel 1.8. Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2020 (Rp.)	TAHUN 2021			PER- TUM- BUHAN (%)
			ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	556.219.606.795,00	622.295.503.000,00	624.010.996.369,00	100,28	12,19
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.370.970.024,82	142.239.419.483,00	54.930.550.504,00	38,62	2,92
JUMLAH		609.590.576.819,82	764.534.922.483,00	678.941.546.873,00	88,80	11,38

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

(1) **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp.622.295.503.000,00,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp.624.010.996.369,00,- atau 100,28 persen, yang meliputi dana Transfer Umum/Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.16.690.254.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp.25.515.870.536,00,- atau 152,88 persen dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalokasikan sebesar Rp.429.881.874.000,00,- mampu direalisasikan 100 persen. Sedangkan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.218.259.000,00,- direalisasikan sebesar Rp.54.110.186.210,00,- atau 96,25 persen. Adapun Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan sebesar Rp.64.135.074.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp.59.133.023.623,00,- atau 92,20 persen. Capaian optimal juga pada Dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan sebesar Rp.55.370.042.000,00,- dengan realisasi Rp.55.370.042.000,00,- atau 100 persen.

(2) **Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah**

Pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.142.239.419.483,00,- realisasi sebesar Rp.54.930.550.504,00,- atau 38,62 persen, terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp.124.358.269.483,00,- realisasi hanya sebesar Rp.40.038.331.504,00,- atau 32,20 persen, Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi yang dialokasikan sebesar Rp.10.000.000.000,00,- dengan realisasi Rp.9.825.570.000,00,- atau 98,26 persen, sedangkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi hanya mampu direalisasikan sebesar 64,29 persen atau Rp.5.066.649.000,00,- dari alokasi anggaran sebesar Rp.7.881.150.000,-. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah tidak mencapai target yang telah dianggarkan disebabkan karena beberapa pendapatan bagi hasil yang masuk piutang tahun 2021.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.56.962.744.245,00,- dengan realisasi sebesar Rp.23.844.997.518,00,- dengan persentase capaian sebesar 41,86 persen.

Tabel 1.9. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2020 (Rp.)	TAHUN 2021			PER- TUM- BUHAN (%)
			ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	
1.	Pendapatan Hibah	44.590.427.779,00	17.235.144.245,00	5.154.884.818,00	29,91	-88,44
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Per-UU-an	18.816.334.000,00	39.727.600.000,00	18.690.112.700,00	47,05	-0,67
JUMLAH		63.406.761.779,00	56.962.744.245,00	23.844.997.518,00	41,86	-62,39

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari :

(1) *Pendapatan Hibah*

Pada Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp.17.235.144.245,- dengan realisasi sebesar Rp.5.154.884.818,00,- atau 29,91 persen yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

(2) *Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Per-UU-an*

Pada Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Per-UU-an dalam Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.39.727.600.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.18.690.112.700,00,- atau persentase capaian 47,05 persen, yang bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS.

e. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, total anggaran belanja daerah Kota Parepare sebesar Rp.1.009.205.271.281,00,- yang sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terealisasi sebesar Rp.881.423.831.432,70,- atau dengan persentase sebesar 87,34 persen dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.10. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2020 (Rp.)	TAHUN 2021			PER- TUM- BUHAN (%)
			ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	
1.	Belanja Operasi	673.487.189.114,22	735.973.604.406,00	686.079.884.972,50	93,22	1.87
2.	Belanja Modal	165.584.127.455,00	248.300.885.875,00	190.354.065.886,20	76,66	14,96
3.	Belanja Tidak Terduga	3.055.362.500,00	24.930.781.000,00	4.989.880.574,00	20,01	63,32
4.	Belanja Transfer	855.844.164,00	-	-	-	-
JUMLAH		842.982.523.233,22	1.009.205.271.281,00	881.423.831.432,70	87,34	4,56

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

Pengalokasian anggaran yang dipersiapkan untuk pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat umum, dapat dijelaskan secara sistematis menurut kelompok dan jenis belanja sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Jumlah anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, khusus Belanja Operasi, yang terdiri atas belanja pegawai (gaji PNS dan tunjangan tambahan/tambahan penghasilan), belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp.735.973.604.406,00,- dengan realisasi belanja sebesar Rp.686.079.884.972,50,- atau sebesar 93,22 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Belanja Pegawai	333.183.417.898,00	312.628.970.650,00	93,83
2.	Belanja Barang dan Jasa	396.006.921.604,00	366.982.669.357,00	92,67
3.	Belanja Bunga	1.020.000.000,00	1.019.437.279,50	99,94
4.	Belanja Hibah	5.463.380.904,00	5.148.923.686,00	94,24
5.	Belanja Bantuan Sosial	299.884.000,00	299.884.000,00	100,00
JUMLAH		735.973.604.406,00	686.079.884.972,50	93,22

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

Porsi belanja tertinggi adalah belanja pegawai, khususnya belanja gaji dan tunjangan ASN. Belanja Pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.333.183.417.898,00,- dan realisasi sebesar Rp.312.628.970.650,00,- atau 93,83 persen dengan selisih lebih anggaran Rp.20.554.447.248,00,-. Untuk Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran Rp.396.006.921.604,00,- dengan realisasi sebesar Rp.366.982.669.357,00,- atau 92,67 persen. Selanjutnya Belanja Bunga yang dianggarkan sebesar Rp.1.020.000.000,00,- direalisasikan sebesar Rp.1.019.437.279,50,- atau 99,94 persen, sedangkan Belanja Hibah dengan alokasi Rp.5.463.380.904,00,- mampu direalisasikan sebesar Rp.5.148.923.686,00,- atau 94,24 persen. Khusus Belanja Bantuan Sosial dengan alokasi anggaran Rp.299.884.000,00,- direalisasikan sebesar 100 persen dari alokasi anggaran yang ditetapkan.

2) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud.. Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp.248.300.885.875,00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.190.354.065.886,20,- atau sebesar 76,66 persen. Anggaran dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.12. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Belanja Modal Tanah	3.595.000.000,00	2.090.077.370,00	58,14
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.676.905.923,00	33.747.730.742,00	87,24
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.637.906.554,00	94.509.832.083,42	71,68
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	73.957.698.398,00	59.789.985.690,78	80,84
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	218.375.000,00	216.440.000,00	99,11
JUMLAH		248.300.885.875,00	190.354.065.886,20	76,66

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

Dari data APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, belanja modal terbesar yaitu; Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.131.637.906.554,00,- dan realisasi sebesar Rp.94.509.832.083,42,- atau 71,68 persen, selanjutnya adalah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.73.957.698.398,00,- dengan realisasi Rp.59.789.985.690,78,- atau 80,84 persen. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan serapan anggaran mencapai 87,24 persen atau Rp.33.747.730.742,00,- dari alokasi sebesar Rp.38.676.905.923,00,-, sedangkan anggaran untuk Belanja Modal Tanah yang ditetapkan sebesar Rp.3.595.000.000,00,- dengan realisasi Rp.2.090.077.370,00,- atau 58,14 persen. Porsi anggaran terkecil pada Belanja Modal adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan alokasi sebesar Rp.218.375.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp.216.440.000,00,- atau 99,11 persen.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Khusus pada APBD Perubahan Tahun 2021, ditetapkan anggaran sebesar Rp.24.930.781.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp.4.989.880.574,00,- atau 20,01 persen.

f. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang.

Adapun penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.41.187.128.659,00,- dan terealisasi sebesar Rp.41.187.128.659,20,- atau 100 persen yaitu penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.8.016.000.000,00,- dan

terrealisasi sebesar Rp.2.765.857.030,74,- atau 34,50 persen yang terdiri dari pembayaran pokok utang sebesar Rp.2.765.857.030,74,-, yaitu Pasar Semi Modern Lakessi.

Tabel 1.13. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Penerimaan Pembiayaan	41.187.128.659,00	41.187.128.659,20	100,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	8.016.000.000,00	2.765.857.030,74	34,50
JUMLAH		33.171.128.659,00	38.421.271.628,46	115,83

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Manajemen pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2021 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan merupakan unsur penting didalam mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik (*good governance*). Mengingat pentingnya kedudukan keuangan daerah tersebut, maka pengelolaannya dikelola dengan sistem berbasis akrual harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel itu sudah menjadi kebutuhan dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi simbol penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Mengingat pentingnya kedudukan keuangan daerah tersebut, maka pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Parepare pada Tahun 2021 berpedoman pada arah kebijakan keuangan daerah Kota Parepare yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Arah kebijakan ditujukan pada terciptanya masyarakat maju, mandiri, peduli dan bermartabat, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk mencapai kondisi tersebut kebijakan keuangan daerah Kota Parepare pada Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2021 diarahkan pada :

1. Peningkatan fiskal (PAD dan bagi hasil pajak daerah) yang tidak bersifat distorsif terhadap perekonomian daerah dan mampu menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal;
2. Alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien, strategis serta memiliki efak yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Penerapan pembiayaan daerah yang defisit terkendali, dalam artian defisit anggaran yang kecil, tidak melebihi ketentuan pemerintah, serta tidak berpotensi menimbulkan gejolak kenaikan harga-harga umum.
4. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal yang berkelanjutan dengan cara ; (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah; (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi diawal Tahun 2020 telah memberikan dampak yang sangat berat bagi daerah. Sehingga mempengaruhi target dan arah kebijakan keuangan daerah yang telah direncanakan. Penerimaan negara pada Tahun 2021 masih belum optimal, sehingga berdampak pada dana transfer ke daerah yang juga mengalami pengurangan. Hal ini telah terbukti dengan adanya kebijakan

refocusing dan realokasi anggaran dalam APBD Tahun 2021. Disisi lain, daerah juga akan merasakan dampak yang besar bagi penurunan PAD akibat adanya kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*). Pajak Hiburan, pajak restoran, dan beberapa jenis pajak lainnya yang selama ini menjadi penyumbang terbesar pada pajak daerah belum normal akibat kebijakan itu. Sehingga, pendapatan daerah dari sektor-sektor tersebut belum optimal. Hal ini akan sangat mengurangi kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan daerah.

Selain kondisi tersebut, secara struktur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Kota Parepare telah menerapkan peraturan tersebut pada saat penyusunan APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2021. Sehingga uraian perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah telah menyesuaikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. PENDAPATAN DAERAH

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena besaran pendapatan suatu daerah menentukan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi sumber-sumber pendapatan yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dalam wilayah Kota Parepare.

Untuk menunjukkan kemampuan fiskal daerah, maka pemerintah akan memberikan perhatian serius terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber-sumber pendapatan daerah ini, diharapkan berkontribusi lebih besar, baik terhadap total pendapatan daerah maupun menjadi sumber utama dalam mendanai kebutuhan total belanja daerah khususnya kebutuhan belanja modal.

Agar mampu mengoptimalkan pendapatan daerah Tahun 2021, maka dilakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan kebijakan pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kota Parepare Tahun 2021, sebagai berikut :

- 1) Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparan;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat termasuk dalam hal peningkatan kompetensi pemungut pajak dan retribusi;
- 3) Penyesuaian target Pendapatan Daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran

- Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta simulasi potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;
- 4) Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah; dan
 - 5) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah

Perubahan target pendapatan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi penerimaan dari semua sumber pendapatan secara terukur dan kondisi pandemi Covid-19 ikut mempengaruhi pendapatan, khususnya PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Tabel 2.1. Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	157.136.217.423,00	154.536.475.894,00	-1,65
2.	Pendapatan Transfer	736.693.788.725,00	764.534.922.483,00	3,78
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31.962.744.245,00	56.962.744.245,00	78,22
JUMLAH		925.792.750.393,00	976.034.142.622,00	5,43

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

Pendapatan daerah pada sebelum perubahan anggaran Tahun 2021 ditargetkan Rp.925.792.750.393,00,- yang mengalami peningkatan dari target sebesar 5,43 persen, sehingga target pendapatan setelah perubahan yaitu sebesar Rp.976.034.142.622,00,- dengan uraian perubahan sebagai berikut :

(1) Pendapatan Asli Daerah

Perubahan atau penurunan target yang terjadi pada pendapatan daerah yaitu pada sektor pendapatan asli daerah sebesar -1,65 persen yang anggaran pokoknya dengan target sebesar Rp. 157.136.217.423,-. Namun, setelah perubahan anggaran berkurang menjadi Rp.154.536.475.894,-.

Tabel 2.2. Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (%)
1.	Pajak Daerah	36.395.769.614,00	35.679.790.434,00	-1,97
2.	Retribusi Daerah	8.810.594.665,00	8.830.594.665,00	0,23
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.000.000.000,00	9.096.237.651,00	1,07
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	102.929.853.144,00	100.929.853.144,00	-1,94
JUMLAH		157.136.217.423,00	154.536.475.894,00	-1,65

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

Penyesuaian sektor pendapatan sebagai dampak langsung dari pandemi Covid-19 pada Hasil Pajak Daerah dari target Rp.36.395.769.614,- menjadi Rp.35.679.790.434,- atau mengalami penurunan sebesar -1,97 persen atau Rp.715.979.180,-. Sedangkan Retribusi Daerah dari target diawal tahun sebesar Rp.8.810.594.665,- meningkat sebanyak 0,23 persen atau Rp.20.000.000,- menjadi Rp.8.830.594.665,-. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari perencanaan Rp.9.000.000.000,- naik sebesar 1,07 persen atau Rp.96.237.651,- menjadi Rp.9.096.237.651,-. Selanjutnya Lain-lain PAD Yang Sah dari target Rp.102.929.853.144,- berkurang Rp.2.000.000.000,- menjadi Rp.100.929.853.144,- atau turun 1,94 persen.

(2) Pendapatan Transfer

Diakibatkan salah satunya penurunan pendapatan negara, maka dana transfer yang terima daerah juga mengalami penyesuaian atau pengurangan. Dari target di awal Tahun 2021 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat untuk Kota Parepare direncanakan sebesar Rp.638.602.304.000,- dan mengalami pengurangan sebesar 2,55 persen atau Rp.16.306.801.000,-, sehingga alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan sebesar Rp.622.295.503.000,-.

Tabel 2.3. Perubahan Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (%)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	638.602.304.000,00	622.295.503.000,00	-2,55
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.091.484.725,00	142.239.419.483,00	45,01
JUMLAH		736.693.788.725,00	764.534.922.483,00	3,78

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari perencanaan di awal tahun anggaran sebesar Rp.98.091.484.725,- bertambah 45,01 persen atau Rp.44.147.934.758,- sehingga menjadi Rp.142.239.419.483,- pada perubahan anggaran.

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, juga mengalami peningkatan dari target dari Rp.31.962.744.245,- pada sebelum perubahan anggaran, naik cukup signifikan sebanyak 78,22 persen setelah perubahan anggaran menjadi Rp.56.962.744.245,-.

Tabel 2.4. Perubahan Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (%)
1.	Pendapatan Hibah	11.235.144.245,00	17.235.144.245,00	53,40
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	20.727.600.000,00	39.727.600.000,00	91,67
JUMLAH		31.962.744.245,00	56.962.744.245,00	78,22

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

Peningkatan pada sektor Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dipengaruhi oleh penambahan pada Pendapatan Hibah dari Rp.11.235.144.245,- diawal tahun anggaran yang meningkat 53,40 persen atau Rp.6.000.000.000,- sehingga bertambah pada perubahan anggaran menjadi Rp.17.235.144.245,-. Juga peningkatan anggaran ini pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Rp.20.727.600.000,- bertambah signifikan sebanyak 91,67 persen atau sebesar Rp.19.000.000.000,- menjadi Rp.39.727.600.000,- setelah perubahan anggaran Tahun 2021.

2. BELANJA DAERAH

a. Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dibutuhkan alokasi belanja daerah yang tidak hanya meningkat secara signifikan, tetapi juga tepat sasaran pada sektor yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kualitas pertumbuhan yang tinggi, tidak hanya menekankan pertumbuhan output dari aktivitas ekonomi yang tinggi, tetapi juga harus mampu memberikan efek perubahan pada aspek sosial ekonomi lainnya. Untuk itu, belanja daerah harus mampu melahirkan transformasi struktur ekonomi masyarakat dari yang ber-value *added* rendah ke aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha semakin luas, meningkatnya kualitas hidup serta menjamin keadilan ekonomi masyarakat. Sehingga kebijakan belanja daerah pada Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2021 yang diarahkan pada :

- 1) Belanja daerah diarahkan untuk dititikberatkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah;
- 2) Belanja langsung akan lebih banyak diarahkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, meliputi peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya;
- 3) Meningkatkan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan serta perluasan investasi dan kesempatan kerja;
- 4) Meningkatkan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- 5) Meningkatkan efisiensi belanja, antara lain menekan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat dan melakukan prioritas program-program pembangunan strategis; dan
- 6) Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (DAK, DBH Pajak Rokok, DBH Cukai Tembakau, Dana Insentif Daerah, Bantuan Keuangan).

Pada dasarnya kebijakan belanja daerah adalah merupakan uraian yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kota Parepare. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan DPRD Kota Parepare melalui Nota Kesepakatan menyangkut Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 maupun Perubahan Tahun Anggaran 2021.

b. Perubahan Anggaran Belanja Daerah

Perubahan perencanaan belanja daerah daerah dilakukan dengan mempertimbangkan penerimaan dari semua sumber pendapatan secara terukur dan mempertimbangan dampak pandemi Covid-19 telah mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, untuk dilakukan intervensi program dan anggaran yang diharapkan mampu memberikan stimulus terhadap pemulihan ekonomi.

Tabel 2.5. Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (%)
1.	Belanja Operasi	733.442.782.051,00	735.973.604.406,00	0,35
2.	Belanja Modal	203.333.968.342,00	248.300.885.875,00	22,11
3.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	24.930.781.000,00	66,21
4.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		951.776.750.393,00	1.009.205.271.281,00	6,03

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

Belanja daerah pada sebelum perubahan anggaran Tahun 2021 ditargetkan Rp.951.776.750.393,- yang mengalami peningkatan dari target sebesar 6,03 persen atau Rp.57.428.520.888,-, sehingga anggaran belanja setelah perubahan anggaran ditargetkan Rp.1.009.205.271.281,- dengan uraian perubahan sebagai berikut :

(1) Belanja Operasi

Penyesuaian anggaran Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2021 hanya bertambah 0,35 persen atau sebesar Rp.2.530.822.355,- dari alokasi anggaran sebesar Rp.733.442.782.051,- diawal tahun anggaran yang bertambah sehingga menjadi Rp.735.973.604.406,- pada perubahan anggaran Tahun 2021.

Pada sektor Belanja Pegawai mengalami peningkatan dari perencanaan awal sebesar Rp.320.611.867.056,- bertambah 3,92 persen atau Rp.12.571.550.842,- sehingga Belanja Pegawai pada anggaran perubahan menjadi Rp.333.183.417.898,-. Penambahan alokasi anggaran, hanya terjadi pada Belanja Pegawai. Sedangkan belanja-belanja lainnya pada Belanja Operasi mengalami penyesuaian.

Tabel 2.6. Perubahan Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (%)
1.	Belanja Pegawai	320.611.867.056,00	333.183.417.898,00	3,92.
2.	Belanja Barang dan Jasa	400.240.784.091,00	396.006.921.604,00	-1,06
3.	Belanja Bunga	2.500.000.000,00	1.020.000.000,00	-59,20
4.	Belanja Hibah	8.090.130.904,00	5.463.380.904,00	-32,47
5.	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	299.884.000,00	-85,01
JUMLAH		733.442.782.051,00	735.973.604.406,00	0,35

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

Belanja Barang dan Jasa yang ditargetkan Rp.400.240.784.091,- mengalami penurunan hingga 1,06 persen atau Rp.4.233.862.48,- sehingga turun menjadi Rp.396.006.921.604,-. Juga Belanja Bunga yang terkoreksi signifikan sebesar 59,20 persen atau Rp.1.480.000.000,- dari alokasi awal tahun anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- sehingga turun menjadi Rp.1.020.000.000,-. Selanjutnya yang juga mengalami penyesuaian adalah Belanja Hibah dari target Rp.8.090.130.904,- turun sebesar 32,47 persen atau Rp.2.626.750.000,- sehingga disesuaikan menjadi Rp.5.463.380.904,-, serta yang mengalami penurunan terbesar adalah Belanja Bantuan Sosial sebesar 85,01 persen atau Rp.1.700.116.000,- dari perencanaan diawal tahun anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- turun menjadi Rp.299.884.000,-

(2) **Belanja Modal**

Untuk Belanja Modal yang sebelum perubahan anggaran dialokasikan sebesar Rp.203.333.968.342,- bertambah sebanyak 22,11 persen atau Rp.44.966.917.533,- menjadi Rp. 248.300.885.875,-

Tabel 2.7. Perubahan Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (%)
1.	Belanja Modal Tanah	13.512.170.800,00	3.595.000.000,00	-73,39
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.088.821.032,00	38.676.905.923,00	16,91
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.443.652.460,00	131.637.906.554,00	49,07
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	68.062.599.050,00	74.172.698.398,00	8,66
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	226.725.000,00	218.375.000,00	-3,68
JUMLAH		203.333.968.342,00	248.300.885.875,00	22,11

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

Pos Belanja Modal Tanah menjadi pos belanja yang paling besar mengalami penyesuaian atau penurunan alokasi anggaran. Belanja Modal Tanah dari alokasi anggaran Rp.13.512.170.800,- turun sebesar 73,39 persen atau Rp.9.917.170.800,- sehingga berubah menjadi Rp.3.595.000.000,-. Pos

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, juga menjadi pos belanja yang mengalami penurunan anggaran dari Rp.226.725.000,- menjadi Rp.218.375.000,- atau turun sebesar 3,68 persen atau Rp.8.350.000,-.

Sedangkan 3 pos belanja lainnya ; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, bertambah alokasi anggarannya. Pos Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin dari target Rp.33.088.821.032,- meningkat sebanyak 16,91 persen atau Rp.5.588.084.891,- menjadi Rp.38.676.905.923,-. Selanjutnya, pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pos belanja yang terbesar penambahan alokasi anggarannya, dari Rp.88.443.652.460,- meningkat menjadi Rp.131.637.906.554,- atau sebanyak 49,07 persen yang sepadan dengan Rp.43.194.254.094 di anggaran perubahan Tahun 2021. Sedangkan pos Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi juga meningkat sebanyak 8,66 persen atau Rp.6.110.099.348,- dari Rp.68.062.599.050,- diawal tahun anggaran, bertambah menjadi Rp.74.172.698.398,- di anggaran perubahan.

(3) Belanja Tidak Terduga

Untuk pos Belanja Tidak Terduga yang sebelum perubahan anggaran dialokasikan sebesar Rp.15.000.000.000,- mengalami penambahan alokasi anggaran sebanyak 66,21 persen atau Rp.9.930.781.000,-, sehingga meningkat menjadi Rp.24.930.781.000,-

(4) Belanja Transfer

Untuk Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2021 tidak dialokasikan baik pada anggaran pokok maupun pada anggaran perubahan.

3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Parepare Tahun 2021, masih cenderung sama dengan tahun sebelumnya, yaitu tidak melakukan pinjaman daerah sehingga jika terjadi selisih antara Belanja dan pendapatan maka akan ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Parepare mengupayakan peningkatan serapan belanja pemerintah untuk meningkatkan realisasi belanja sehingga SiLPA Tahun 2021 dapat diminimalisir

Untuk anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan pada awal tahun anggaran mencapai Rp.25.984.000.000,- yang diperubahan anggaran meningkat sebanyak 27,66 persen atau Rp.7.187.128.659, sehingga alokasi anggaran untuk Pembiayaan Daerah meningkat menjadi Rp.33.171.128.659,-

Pos alokasi Pembiayaan Daerah yang mengalami perubahan, yaitu ; Penerimaan Pembiayaan yang sebelum perubahan anggaran dialokasikan sebesar Rp.34.000.000.000,- dan setelah perubahan anggaran bertambah 21,04 persen atau sebanyak Rp.7.187.128.659,-, sehingga alokasi anggaran Penerimaan Pembiayaan meningkat menjadi Rp.41.187.128.659,-. Sedangkan pos Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan di awal tahun anggaran dan perubahan anggaran tidak mengalami perubahan sehingga tetap dengan alokasi Rp.8.016.000.000,-.

Tabel 2.8. Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (%)
1.	Penerimaan Pembiayaan	34.000.000.000,00	41.187.128.659,00	21,04
2.	Pengeluaran Pembiayaan	8.016.000.000,00	8.016.000.000,00	0,00
JUMLAH		25.984.000.000,00	33.171.128.659,00	27,66

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan, yakni : Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, serta Urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Urusan konkuren atau urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Untuk urusan pemerintahan wajib terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pemerintah Kota Parepare pada Tahun Anggaran 2021 melaksanakan 6 urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar dan dilaksanakan oleh 9 perangkat daerah, sedangkan 18 urusan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar dilaksanakan oleh 13 perangkat daerah. Untuk urusan pilihan yang sebanyak 5 urusan dilaksanakan oleh 3 perangkat daerah. Penguatan dan dukungan pelaksanaan kewenangan daerah sebagaimana dijelaskan diatas, maka Pemerintahan Daerah ditunjang dengan lahirnya fungsi pendukung, penunjang, pengawasan, kewilayahan, serta pemerintahan umum. Untuk unsur pendukung sebanyak 2 urusan dikerjakan oleh 2 perangkat daerah, unsur penunjang dengan 4 urusan dilaksanakan 4 perangkat daerah, 1 perangkat daerah melaksanakan unsur pengawasan, 4 perangkat daerah menjalankan fungsi unsur kewilayahan, serta fungsi pemerintahan umum dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah.

Pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah merupakan sektor publik yang tidak lepas dari kepentingan umum, sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan. Untuk pengukuran kinerja dimaksud, maka ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan harus digunakan.

Capaian kinerja 176 program, 475 kegiatan dan 1.547 sub kegiatan Tahun Anggaran 2021, serta keluarannya masing-masing sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen anggaran dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
1.	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Alokasi anggaran sebesar Rp.164.483.525.230,- dengan realisasi Rp.151.397.575.046 atau 92,04 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya kegiatan penunjang urusan pemerintahan, dengan target 100 %	99,29 %	99,29 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2) Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJiP, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev dan PUG, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg memperoleh gaji dan tunjangan, dengan target 1.582 orang	1.582 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Terwujudnya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan, dengan target 57 orang	57 orang	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran, dengan target 14 dokumen	14 dokumen	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah peserta yang ikut bimtek, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek, dengan target 4 orang	4 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan dalam administrasi umum, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen/ bahan listrik, dengan target 8 jenis	8 jenis	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor, dengan target 4.093 bahan	4.093 bahan	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan, dengan target 145.700 lembar	145.700 lembar	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan/ surat kabar/ majalah, dengan target 12 jenis	12 jenis	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan Material	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah bahan ATK, dengan target 1.650 bahan - Jumlah bahan ATK SKB, dengan target 707 bahan - Jumlah bahan/alat kebersihan, dengan target 20 jenis 	1.650 bahan 707 bahan 20 jenis	100 % 100 % 100 %		
			(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah penyediaan mami rapat, dengan target 1.390 pors	1.390 Porsi	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				- Jumlah rapat koordinasi, dengan target 131 kali - Jumlah rapat koordinasi SKB, dengan target 6 kali	131 kali 6 kali	100 % 100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeler, dengan target 22 buah	22 buah	100 %		
			(2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung, dengan target 5 jenis	5 jenis	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, dengan target 3.500 surat	3.500 surat	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang terbayar, dengan target 360 tagihan	360 tagihan	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas/jasa yang terbayarkan, dengan target 63 orang	63 orang	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah, dengan target 100 %	95 %	95 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa perizinan randis, dengan target 132 unit	127 unit	95 %		
			(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara, dengan target 104 unit	99 unit	95 %		
			(3) Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubeleur kantor yang terpelihara, dengan target 3 jenis	3 jenis	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara, dengan target 5 jenis	5 jenis	100 %		
			(5) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara, dengan target 1 gedung	1 gedung	100 %		
			(6) Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah lapangan parkir yang dibangun, dengan target 40 meter	40 meter	100 %		
			2) Program Pengelolaan Pendidikan. Alokasi anggaran sebesar Rp.36.565.521.745,- dengan realisasi Rp.34.243.612.333- atau 93,65 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya angka rata-rata lama sekolah, dengan target 100 %	97,53 %	97,53 %		
			a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase APK, APM, APS, angka Pendidikan yg ditamatkan, angka melanjutkan, dengan target 100 %	98,64 %	98,64 %		
			(1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah WC dan pagar yang terbangun, dengan target 3 sekolah	3 sekolah	100 %		
			(2) Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah sekolah yang nmendapatkan meubeleur, dengan target 5 sekolah	5 sekolah	100 %		
			(3) Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa yang menerima pakaian seragam gratis, dengan target 600 siswa	600 siswa	100 %		
			(4) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa kurang mampu yang menerima beasiswa, dengan target 308 orang	308 orang	100 %		
			(5) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang menerima sarana pendidikan, dengan target 20 sekolah	20 sekolah	100 %		
			(6) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah dan siswa yang mengikuti ujian nasional, dengan target 99 sekolah & 25.593 siswa	99 sekolah 25.587 Siswa	98,67 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(7) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah cabang olahraga, dengan target 9 cabang - Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan IPTEK, dengan target 800 siswa - Jumlah peserta OSN, dengan target 112 peserta 	9 cabang 790 siswa 105 peserta	95 %		
			(8) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah tenaga PTT pada SD, dengan target 55 orang	55 orang	100 %		
			(9) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti diklat, lomba, evaluasi, sertifikasi, dengan target 556 orang - Jumlah penetapan angka kredit, dengan target 2 periode - Jumlah cabang olahraga yang dilombakan, dengan target 12 cabang olahraga 	511 orang 2 periode 12 cabang	95,00 %		
			(10) Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta bimtek, dengan target 80 orang - Jumlah sekolah yang mengikuti bimtek, dengan target 135 sekolah - Jumlah sekolah yang terpantau sekolah ramah anak, dengan target 113 sekolah 	80 orang 135 sekolah 113 sekolah	100 % 100 % 100 %		
			(11) Pengelolaan dana BOS SD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sekolah penerima BOS, dengan target 91 sekolah - Jumlah tim BOS, dengan target 17 orang 	91 sekolah 17 orang	100 % 100 %		
			b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase APK, APM, APS, angka Pendidikan yg ditamatkan, angka melanjutkan dengan target 100 %	99 %	99 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah WC yang dibangun, dengan target 4 sekolah	4 sekolah	100 %		
			(2) Rehabilitasi Sedang/ Berat, Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang sekolah yang direhab, dengan target 8 sekolah	8 sekolah	100 %		
			(3) Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa yang menerima pakaian seragam gratis, dengan target 259 siswa	259 orang	100 %		
			(4) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa kurang mampu yang menerima beasiswa, dengan target 212 siswa	212 orang	100 %		
			(5) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang menerima pengadaan peralatan TIK dan media, dengan target 1 sekolah	1 sekolah	100 %		
			(6) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah siswa yang terlayani Pendidikan gratis, dengan target 5.467 siswa - Jumlah jasa pengadaan aplikasi PPDB, dengan target 1 kegiatan - Jumlah sekolah penerima BOP serta yg mengikuti UN, dengan target 71 sekolah 	5.460 siswa 1 kegiatan 71 sekolah	95,00 %		
			(7) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah cabang olahraga O2SN, dengan target 11 cabang olahraga - Jumlah sekolah yang mengikuti Hafidz Qur'an, dengan target 36 sekolah - Jumlah siswa yang mengikuti lomba OSN, dengan target 108 siswa 	11 cabang 36 sekolah 96 siswa	95,00 %		
			(8) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga PTT pada SMP, dengan target 29 orang	29 orang	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(9) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti dikat, lomba, evaluasi, sertifikasi, dengan target 370 orang - Jumlah penetapan angka kredit, dengan target 2 periode - Jumlah cabang olahraga yang dilombakan, dengan target 12 cabang olahraga 	345 orang	96 %		
			(10) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jasa kantor, dengan target 12 bulan - Jumlah peserta bimtek, dengan target 40 orang 	12 bulan	100 %		
			(11) Pengelolaan Dana BOS SMP	Jumlah sekolah penerima BOS, dengan target 22 sekolah	22 sekolah	100 %		
			c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase APM PAUD, dengan target 100 %	92,88 %	92,88 %		
			(1) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah TK yang mendapat bantuan APE, dengan target 3 sekolah	3 sekolah	100 %		
			(2) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah TK yang menerima BOP, dengan target 3 TK negeri & 10 TK swasta	3 TK negeri, 7 TK swasta	96,00 %		
			(3) Persiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang dimonitring dan dievaluasi, dengan target 70 sekolah	70 sekolah	100 %		
			(4) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah tenaga PTT yang diberi insentif, dengan target 160 orang	160 orang	100 %		
			(5) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti peningkatan kompetensi, dengan target 45 orang	45 orang	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(6) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lomba yang diadakan dalam gebyar PAUD, dengan target 5 lomba - Jumlah PAUD holistik yang terbina, dengan target 8 PAUD 	5 lomba	100 %		
			d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Tercapainya angka melek huruf dengan target 100 %	95,00 %	95 %		
			(1) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peralatan kantor SKB yang terpelihara, dengan target 1 gedung & 5 jenis	1 gedung 5 jenis	100 %		
			(2) Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengadaan mebel SKB, dengan target 3 jenis	3 jenis	100 %		
			(3) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta ujian paket, dengan target 16 panitia & 100 peserta	16 panitia, 100 peserta	100 %		
			(4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti kursus, dengan target 76 orang/ lembaga	76 orang	100 %		
			3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dengan realisasi Rp.39.150000 atau 97,88 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Rasio guru/siswa sekolah pendidikan dasar, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase rasio guru/siswa sekolah pendidikan dasar, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta penginput Dapodik, dengan target 135 orang	135 orang	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
2.	Kesehatan	DINAS KESEHATAN	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.33.492.918.195,- dengan realisasi Rp.31.997.328.251,- atau 95,53 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi serta administrasi umum dan keuangan dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian perencanaan dan evaluasi kinerja yang benar dan tepat waktu, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun (Renja 2022, Perubahan Renja 2021, dan Perubahan Renstra 2018-2023), dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD tahun 2021, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD tahun 2021, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD Tahun 2021, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koodinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan DPA SKPD Tahun 2021, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP 2020 dan Perjanjian Kinerja 2021, dan Rencana Aksi 2021, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah, target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian keuangan yang benar dan tepat waktu, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan, dengan target 436 orang	436 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi, dengan target 1.136 SPJ	1.136 SPJ	100 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran SKPD, dengan target 14 dokumen	14 dokumen	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/kursus singkat, dengan target 3 orang	3 orang	100 %		
			(2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek, dengan target 4 orang	4 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, dengan target 3 jenis	3 jenis	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis penyediaan bahan logistik kantor, dengan target 3 jenis	3 jenis	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan target 2 jenis	2 jenis	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan media cetak yang tersedia, dengan target 5 bahan bacaan	5 bahan bacaan	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(6) Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas, dengan target 20 laporan	20 laporan	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dengan target 5 jenis	5 jenis	90 %		
			(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dengan target 5 jenis	5 jenis	90 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola, dengan target 1.200 surat	1.200 surat	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya telepon, listrik dan air, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan terbayar pajak kendaraannya, dengan target 2 unit	2 unit	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara dan terbayar pajak kendaraannya, dengan target 5 unit	5 unit	100 %		
			(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan target 3 jenis	3 jenis	100 %		
			(4) Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(5) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya (Utang 2016)	Terbayarnya utang retensi pengadaan pagar rumah jabatan kadinkes, dengan target 1 paket	1 paket	0 %		
			2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Alokasi anggaran sebesar Rp.67.562.325.596,- dengan realisasi Rp.56.914.284.163,- atau 84,24 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	91 %	91 %		
			a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota, dengan target 100 %	73 %	73 %		
			(1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terbangunnya kelengkapan bangunan RSH Ainun Habibie, dengan target 1 paket	1 paket	0 %	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalokasikan bantuan keuangan	Memanfaatkan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022
			(2) Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya	Terbayarnya utang pengawasan pembangunan cerobong asap gedung Labkesda, dengan target 1 paket	1 paket	0 %	Rekanan tidak mengurus utang dimaksud	Telah dilakukan penyampaian tertulis

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terbayarnya utang perencanaan dan pengawasan rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit Khusus Kusta Lauleng, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah poskeskeskel dan posyandu yang direhab, dengan target 1 poskeskel dan 6 posyandu	1 poskeskel, 6 posyandu	95 %		
			(5) Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan sarana posyandu, dengan target 5 jenis	5 jenis	100 %		
			(6) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(7) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(8) Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat, vaksin, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(9) Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan bahan habis pakai, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(10) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang dilakukan kalibrasi pada alat kesehatannya, dengan target 8 PKM	8 PKM	100 %		
			(11) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman Ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah sarana kesehatan yang mendapatkan distribusi obat, vaksin dan BMHP, dengan target 10 sarana	10 sarana	100 %		
			b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dengan target 100 %	90 %	90 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani, dengan target 3.167 ibu hamil	2.775 ibu hamil	88 %		
			(2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang dilayani, dengan target 3.023 ibu bersalin	2.615 ibu bersalin	87 %		
			(3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang dilayani, dengan target 2.880 bayi baru lahir	2.611 bayi baru lahir	91 %		
			(4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang dilayani, dengan target 14.919 balita	11.299 balita	76 %		
			(5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang dilayani, dengan target 12.000 usia pendidikan dasar	4.128 anak usia pendidikan dasar	34 %		
			(6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang dilayani, dengan target 2.900 usila	2.858 usila	99 %		
			(7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah pasien penderita diabetes melitus yang dilayani, dengan target 400 pasien	327 pasien	82 %		
			(8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang dilayani, dengan target 203 pasien	200 pasien	99 %		
			(9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang dilayani, dengan target 1.459 terduga TB	1.459 terduga TB	100 %		
			(10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani, dengan target 4.518 orang beresiko	2.921 orang beresiko	64,65 %		
			(11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luarbiasa (KLB)	Jumlah kontak erat yang dilacak, dengan target 849 kontak erat	849 kontak erat	100 %		
			(12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah sasaran yang telah divaksin Covid-19, dengan target 119.206 sasaran	89.058 orang	75 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita, dengan target 1.266 balita	1.266 balita	100 %		
			(14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang aktif, dengan target 14 Pos UKK	10 Pos UKK	72 %		
			(15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dengan target 22 kelurahan	22 kelurahan	100 %		
			(16) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah media penyebarluasan informasi kesehatan, dengan target 8 media	8 media	100 %		
			(17) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kasus penyakit menular yang diobservasi, dengan target 42 kasus	42 kasus	100 %		
			(18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah kasus deteksi dini gangguan jiwa dan napza, dengan target 30 kasus	30 kasus	100 %		
			(19) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah calon jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan target 120 CJH	120 CJH	100 %		
			(20) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kelurahan <i>universal child immunization</i> (UCI), dengan target 22 kelurahan	22 kelurahan	100 %		
			(21) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk PBI APBD, dengan target 49.806 penduduk	36.688 penduduk	74 %		
			(22) Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Terlaksananya sosialisasi dampak napza, dengan target 1 kali	1 kali	100 %		
			(23) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah specimen yang diambil dan dikirim, dengan target 1,473 sampel	1.473 sampel	100 %		
			(24) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah tatanan kota sehat yang dicapai, dengan target 7 tatanan	7 tatanan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(25) Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pasien yang berkunjung, dengan target 100 pasien	46 pasien	46 %		
			(26) Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan UKM yang terlaksana di puskesmas, dengan target 13 UKM	13 UKM	100 %		
			(27) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kasus yang ditangani <i>Call Center</i> 112, dengan target 10.366 kasus	10.366 kasus	100 %		
			(28) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang mendapatkan bimbingan akreditasi, dengan target 1 PKM	1 PKM	100 %		
			(29) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah kasus KIPI yang diinvestigasi, dengan target 22 kasus	22 kasus	100 %		
			(30) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah pelacakan kasus, dengan target 50 kali	50 kali	100 %		
			c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah puskesmas yang melaksanakan sistem informasi puskesmas, dengan target 8 PKM	8 PKM	100 %		
			(1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan sistem informasi puskesmas, dengan target 8 PKM	8 PKM	100 %		
			d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah sakit/klinik dan fasyankes lainnya yang dibina dan diawasi, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengendalian dan Pengawasan, serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah rumah sakit/klinik dan fasyankes lainnya yang diawasi, dengan target 13 fasyankes	13 fasyankes	100 %		
			(2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya persiapan puskesmas menuju BLUD puskesmas, dengan target 8 PKM	8 PKM	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Alokasi anggaran sebesar Rp.12.353.951.155,- dengan realisasi Rp.11.163.318.150,- atau 90,36 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Rasio tenaga medis per satuan penduduk, dengan target 98 per 100.000 penduduk	157 per 100.000 penduduk	160 %		
			a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang diberikan rekomendasi perizinan, dengan target 38 orang	38 orang	100 %		
			(1) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang diberikan rekomendasi perizinan, dengan target 38 orang	38 orang	100 %		
			b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang diberikan pembinaan dan pengawasan, dengan target 38 orang	38 orang	100 %		
			(1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan Insentif Covid-19, dengan target 213 tenaga kesehatan	213 tenaga kesehatan	100 %		
			(2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang diberikan pembinaan dan pengawasan, dengan target 38 orang	38 orang	100 %		
			c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan, dengan target 1 kali	1 kali	100 %		
			(1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan, dengan target 1 kali	1 kali	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman Alokasi anggaran sebesar Rp.192.438.400,- dengan realisasi Rp.81.065.400,- atau 42,13 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase sarana kesehatan, penghasil dan distribusi alkes dan produk makanan yang diperiksa dan dibina, dengan target 100 %	88 %	88 %	Masih kurangnya sampel makanan yang dilakukan pemeriksaan dan pengiriman ke BPOM Makassar	Meningkatkan koordinasi dengan BPOM Makassar
			a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek dan toko obat yang diawasi, dengan target 45 sarana	45 sarana	100 %		
			(1) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek dan toko obat yang diawasi, dengan target 45 sarana	45 sarana	100 %		
			b. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah PKRT yang dibina dan diawasi, dengan target 18 PKRT	18 PKRT	100 %		
			(1) Pengendalian dan Pengawasan, serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah PKRT yang dibina dan diawasi, dengan target 18 PKRT	18 PKRT	100 %		
			c. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT yang dibina dan diawasi, dengan target 46 P-IRT	46 P-IRT	100 %		
			(1) Pengendalian dan Pengawasan, serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Jumlah P-IRT yang dibina dan diawasi, dengan target 46 P-IRT	46 P-IRT	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					
			d. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah stiker pembinaan yang terpasang pada makanan jajanan dan sentral makanan jajanan, dengan target 500 stiker	500 stiker	100 %		
			(1) Pengendalian dan Pengawasan, serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentral Makanan Jajanan	Jumlah stiker pembinaan yang terpasang pada makanan jajanan dan sentral makanan jajanan, dengan target 500 stiker	500 stiker	100 %		
			e. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan PostMarket pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah pemeriksaan sampel makanan yang diperiksa, dengan target 36 sampel	15 sampel	42 %		
			(1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah pemeriksaan sampel makanan yang diperiksa, dengan target 36 sampel	15 sampel	42 %		
			5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Alokasi anggaran sebesar Rp.1.339.757.450,- dengan realisasi Rp.1.053.542.417,- atau 78,64 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan pembinaan kelompok potensial masyarakat, dengan target 100 %	90 %	90 %		
			a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kader posyandu yang diberikan insentif kader, dengan target target 720 kader	720 kader	100 %		
			(1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kader posyandu yang diberikan insentif kader, dengan target 720 kader	720 kader	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu yang dibina, dengan target 130 posyandu	130 posyandu	100 %		
			(1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah posyandu yang dibina, dengan target 130 posyandu	130 posyandu	100 %		
		RSUD ANDI MAKKASAU	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.26.312.597.250,- dengan realisasi Rp.27.425.753.341,- atau 104,23 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Pelaporan capaian hasil kinerja keuangan tepat waktu, dengan target 100%.	100 %	100 %		
			a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan ASN yang menerima gaji dan tunjangan, dengan target 100 %.	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima tunjangan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan. Alokasi anggaran sebesar Rp.128.412.026.295,- dengan realisasi Rp.120.464.826.278,- atau 93,81 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:	Meningkatnya fasilitas layanan Kesehatan, dengan target 100 %	100 %	98,94 %		
			a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan, dengan target 16 paket	15 paket	97,88 %		
			(1) Pengembangan Rumah Sakit	Terlaksananya pembangunan, dengan target 3 gedung rawat inap, 6 gedung penunjang pelayanan, 1 prasarana air bersih dan 1 alat pemenuhan pasokan cadangan listrik alat MRI/UPS	3 bangunan, 5 gedung penunjang pelayanan, 1 alat UPS	91,00 %	Limit waktu pengadaan yang tidak memungkinkan	Pengadaan hepafilter dianggarkan ulang di APBD 2022.

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Rehabilitasi dan Pemeeliharaan Rumah Sakit.	Jumlah sarana penunjang yang direhabilitasi, dengan target 4 paket	4 paket	100 %		
			(3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas.	Pembangunan penampungan limbah B3, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(4) Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang, Pengadaan Obat, Vaksin, Pengadaan Bahan Habis Pakai.	Jumlah alat kesehatan, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		
			b. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UMKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular, dengan target 1 kegiatan.	1 kegiatan	100 %		
			(2) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, dengan target 1 kegiatan.	1 kegiatan	100 %		
			(3) Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedia sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit, dengan target selama 1 tahun.	1 tahun	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
3.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.5.033.241.947,- dengan realisasi Rp.5.055.402.875,- atau 100,44 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran, dengan target 100 persen	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renstra, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan penyelenggaraan pengarusutamaan gender SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi LAKIP/ LPPD/ LKPI, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan SKPD, dengan target 100 persen	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar gaji dengan target 70 orang	70 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN/PTT yang terbayarkan jasa, dengan target 78 orang	78 orang	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan (Neraca, CALK, LO, LPE), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksannya pengelolaan administrasi barang milik daerah SKPD, dengan target 100 persen	100 %	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat, dengan target 7 orang	7 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannya pengelolaan administrasi umum SKPD, dengan target 100 Persen	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bahan listrik, dengan target 11 unit	13 unit	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik, dengan target 7 unit	7 unit	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, dengan target 36.500 lembar	36.500 lembar	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/ koran/ majalah dan jasa layanan informasi, dengan target 12 koran	12 koran	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan/ Material	- Jumlah ATK, dengan target 1 paket - Jumlah tagihan jasa kebersihan target 1 orang	50 paket 1 orang	100 %		
			(6) Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum yang disediakan, dengan target 1.050 dos	1.200 dos	100 %		
			(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas, dengan target 60 kali	60 kali	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksannya pengadaan BMD SKPD, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang diadakan, dengan target 1 unit	0	0 %	Rekanan tidak siap dengan durasi waktu pengadaan	Diusulkan pada tahun selanjutnya
			(2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanannya penyediaan jasa penunjang SKPD, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, dengan target 750 surat	709 surat	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, dengan target 96 rekening	96 rekening	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang dipelihara, dengan target 43 unit	43 unit	100 %		
			(4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor, dengan target 100 persen - Jumlah iuran BPJS terbayar, dengan target 100 persen	100 % 100 %	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanannya pemeliharaan barang milik daerah SKPD, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan terbayar pajak, dengan target 35 unit - Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Dinas PUPR, dengan target 1 paket - Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat besar, dengan target 1 paket	35 unit 1 paket 1 paket	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang direhab berat, dengan target 3 unit	3 unit	100 %		
			(3) Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubeler yang dipelihara, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan yang dipelihara, dengan target 25 unit - Jumlah perlengkapan kantor, dengan target 1 paket	25 unit 1 paket	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase aset terpelihara, dengan target 15 unit	15 unit	100 %		
			(6) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan yang dipelihara, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			2) Program Pengelolaan Sumber Air (SDA) Alokasi anggaran sebesar Rp.10.280.440.320,- dengan realisasi Rp.6.391.000.804,- atau 62,17 persen yang dilaksanakan dalam kegiatan :	Persentase Irigasi dalam kondisi baik, dengan target 93,00 %	93,00 %	93,00 %		
			a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu), dengan target 100 persen	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan sinkronisasi teknis (rakortek) pemanfaatan SDA, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(2) Pembangunan Tanggul Sungai	Pembangunan tanggul dan anjungan muara Sungai <i>Karajae</i> , dengan target 1 paket 622 meter	293,5 meter	52,7 %		
			(3) Pembangunan <i>Sea Wall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai	Panjang pengaman pantai terbangun (Pembangunan Tanggul Pasar Senggol), dengan target 1 paket 300 meter	317 meter	100 %		
			(4) Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Pemeliharaan rutin/talud/tanggul, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya pengembangan dan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	- Rehabilitasi saluran irigasi <i>Lamerri</i> , dengan target 1 paket	1 paket	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				- Rehabilitasi daerah irigasi <i>Caramele</i> , dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pengawasan teknis/supervisi kegiatan rehab saluran irigasi, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- <i>e-paksi</i> kegiatan rehab saluran irigasi, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Alokasi anggaran sebesar Rp.4.105.791.050,- dengan realisasi Rp.3.726.590.273,- atau 90,76 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase penduduk yang terpenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kota Parepare, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan sumur dalam air minum (DAK)/pembangunan reservoir di Kelurahan Galung Maloang, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				Pembangunan sumur dalam di Kelurahan Bumi Harapan, dengan target 1 paket	1 paket	92 %		
			4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Alokasi anggaran sebesar Rp.2.661.931.000,- dengan realisasi Rp.2.649.341.000,- atau 99,53 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase penduduk yang memperoleh pelayanan pengelolaan air limbah domestik, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dengan target 100%	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah <i>septik tank</i> yang terbangun, dengan target 109 titik	109 titik	100 %		
			(2) Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah jamban yang terbangun, dengan target 18 titik, 22 titik	18 titik, 22 titik	100 %		
			5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Alokasi anggaran sebesar Rp.8.536.380.600,- dengan realisasi Rp.6.428.931.425,- atau 75,31 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat, dengan target 88 persen	88 %	88 %		
			a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/ kota, dengan target 100 %	95 %	95 %		
			(1) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	- Terbangunnya bangunan pengendali banjir Lumpue, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan kolam tunggu Pasar Seni, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan sistem drainase perkotaan dan lingkungan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan drainase dan plat penutup Cappagalung, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perencanaan teknis pembangunan drainase Tahun 2022, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Pengadaan pompa, pompa air dan listrik, dengan target 1 paket	-	-	Durasi waktu pelaksanaan yang berpotensi tidak tepat waktu	Mengoptimalkan perencanaan kegiatan

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				- Pengawasan saluran drainase/gorong-gorong (Utang 2020), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Pengawasan banjir Kawasan Lumpue (Utang 2020), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(2) Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	- Rehabilitasi drainase Kecamatan Ujung, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan plat penutup selokan belakang SMK 1 Lumpue, dengan target 1 paket	45,70 meter	96 %		
				- Pembangunan plat penutup belakang SD 24, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan plat penutup selokan Kelurahan Ujung Lare, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perencanaan teknis/pengawasan teknis, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	- Rehabilitasi drainase lorong Gereja Sion Jl. Industri Kecil, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perbaikan drainase Jl. H. P. Najamuddin, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rehabilitasi drainase Jl. Bersahaja, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rehabilitasi drainase Jl. Kusuma Lorong, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rehabilitasi drainase Jl. Jend.Sudirman (<i>Salon Icha</i>), dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rehabilitasi drainase Jl. Nenas, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				- Rehabilitasi drainase Jl. Tirta Dharma, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rehabilitasi drainase Kecamatan Ujung, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rehabilitasi drainase Jl. Kalimantan dan Jl. Irian, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perbaikan drainase Jl. Takkalao, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rehabilitasi drainase Jl. Wirabuana, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rehabilitasi Jl. Manunggal dan depan TK. Attauhid Kelurahan Bukit Harapan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perbaikan drainase tersebar (Cempae, BTN Soreang, Jl. Taebe), dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rehab saluran drainase Jl. Manunggal, dengan target 1 paket	1 paket	90 %		
				- Perencanaan teknis rehabilitasi drainase Tahun 2022, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Pemeliharaan rutin drainase, dengan target 2.008 meter	2.008 meter	100 %		
			6) Program Penataan Bangunan Gedung Alokasi anggaran sebesar Rp.6.844.041.000,- dengan realisasi Rp.4.124.538.800,- atau 60,26 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase capaian fasilitas perkotaan, dengan target 100%	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Terlaksannya penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (FLS), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	<ul style="list-style-type: none">- Pengarsipan dokumen IMB, dengan target 1 paket- Penyediaan papan izin mendirikan bangunan, dengan target 1 paket- Penyusunan data base, target 1 paket	1 paket 1 paket 1 paket	100 % 100 % 100 %		
			(2) Perencanaan, Pembangunan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan mall pelayanan publik, dengan target 1 gedung	1 gedung	100 %		
				<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan teknis pembangunan pintu gerbang Parepare-Sidrap Tahun 2022, dengan target 1 dokumen	0	-	Waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan	
				<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan Kantor Polres, dengan target 1 paket	0	-	Waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan	
				<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan rumah Dinas Kejaksaan Negeri Parepare, dengan target 1 bangunan	1 bangunan	100 %		
			(3) Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategi Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none">- Rehabilitasi Mesjid Agung, dengan target 100 %	100 %	100 %		
				<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan pusat kuliner Cempae, dengan target 22 unit	22 unit	93 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				- Pemeliharaan Mesjid Agung (Lanjutan /Utang 2020), dengan target 100 %	100 %	100 %		
			7) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Alokasi anggaran sebesar Rp.68.108.768.375,- dengan realisasi Rp.50.186.986.275,- atau 73,69 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase capaian fasilitas perkotaan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	- Analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan pemantauan lingkungan hidup <i>Rest Area Mattirotasi Waterpark</i> , dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Review perencanaan <i>Mattirotasi Waterpark Target</i> , dengan target 100 %	100 %	100 %		
				- Kajian penentuan lokasi <i>Rest Area Mattirotasi Waterpark</i> (utang 2020), dengan target 100 %	100 %	100 %		
				- Kajian penentuan lokasi Anjungan Cempae (Utang 2020), dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(2) Penataan Bangunan dan Lingkungan	- Pembangunan Mesjid (DID), dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan Anjungan Cempae, dengan target 1 paket	97.488 meter	100 %		
				- Rehabilitasi alun-alun kota (Lapangan A. Makassar), dengan target 1 paket	1 paket	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				- Pembangunan mesjid terapung, dengan target 1 bangunan	1 bangunan	15,258 %	Beberapa material dibuat di luar daerah	
				- Perencanaan DED Anjungan Cempae (Utang 2019), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Pembangunan tambahan pasar dan pagar Pasar Lakessi (DID) (Lanjutan 2019), dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perencanaan DED <i>Mattirotasi Waterpark</i> (Utang 2019), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Rehabilitasi lapangan alun-alun kota (Lapangan A. Makassar) (Utang 2019), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Pembangunan portal/pengaman lapangan alun-alun kota (Utang 2019), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			8) Program Penyelenggaraan Jalan Alokasi anggaran sebesar Rp.42.485.735.791,- dengan realisasi Rp.36.722.661.015,- atau 86,44 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase jalan lingkungan dan lorong yang tertangani, dengan target 97,20 %	97,20 %	97,20 %		
			a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta sarana pendukungnya, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pembangunan Jalan	- Pembangunan akses A. Mappangara Lapadde, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan jalan akses Kelapa Gading Bumi Harapan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				- Pembangunan jalan akses Sosial Umpar Bukit Harapan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan Jalan Amal Bakti samping STAIN, Bukit Harapan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan Jalan STM-belakang Mesjid Agung Ujung Baru, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan Jalan Nurusamawati dari Samping ke Belakang Pondok Fajri Bumi Harapan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan Jalan Permukiman Lanyer RT.01/RW.04 Galung Maloang, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan Jalan Petta Unga RT.03/RW.06 Wt. Soreang Perpanjangan Lorong I H.M. Arsyad Petta Unga Wt. Soreang, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan akses Jalan Industri Kecil, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan Jalan Pao Balie, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perencanaan teknis, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Supervisi teknis, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Dokumen lingkungan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perencanaan teknis Paket 2, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				- Supervisi teknis Paket 2, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- UKL/UPL Paket 2, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Pembangunan jalan lingkaran tengah, dengan target 1 paket	1 paket	70 %		
				- Perencanaan teknis, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Pengawasan teknis, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Study kelayakan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Dokumen lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 paket	100 %		
				- Pembangunan Jalan TMMD Lemoe, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan akses Jalan Laupe-Jalan Hikmah (Kampung Duri), dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan Jalan Akses Jl. Sibali tembus Takkalao (Lanjutan), dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Supervisi teknis Paket 2, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(2) Rekonstruksi Jalan	- Pembangunan duiker, drainase dan plat penutup selokan di Kebun Sayur Lakessi, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pembangunan duiker Jl. Petta Unga Wt. Soreang, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Peningkatan akses Jl. H. P. Najamuddin RT.4/RW.2 Bumi Harapan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				- Peningkatan akses Jl. Pelita Utara - Jl. Ajattapareng - Jl. Amin Laengke Lakessi, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Peningkatan Jalan (Betonisasi) Jl. BTN Pepabri Lapadde, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Peningkatan Jalan Perkuburan Sibolata Lapadde, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Peningkatan Jalan Al. Amin Lapadde, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perbaikan Jl. Persatuan RT.02 /RW.03 Kelurahan Lapadde (belakang perumahan), dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perbaikan Jl. Samping Mesjid Al Khaerat RT.1 RW 06 Lapadde, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perbaikan Jl. Sejahtera 2 RT.2RW.3 Lapadde, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Peningkatan Jalan Lapadde, target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perencanaan teknis, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Supervisi teknis, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Dokumen lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Perencanaan teknis Paket 2, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Supervisi teknis Paket 2, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				- Rekontruksi jalan (DAK) rekontruksi Jalan Hikmah Bumi Harapan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rekontruksi Jln. Makarennu Wt.Bacukiki, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rekontruksi Jl. Minrulange Bumi Harapan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Survey kondisi jalan (DD1), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Survey kondisi jembatan (DD2), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Penyelenggara rapat koordinasi, dengan target 20 kali	20 kali	100 %		
				- Supervisi teknis rekontruksi/ peningkatan jalan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Perencanaan teknis, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Dokumen lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Perencanaan teknis (Usulan DAK 2022), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Dokumen lingkungan (Usulan DAK 2022), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Rehabilitasi Jalan	- Botonisasi Jl. Mappagulung Bukit Indah, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perbaikan Jl. Lontara dan Jl. A. Dewang Bumi Harapan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perbaikan Jl. Lagaligo, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perbaikan Jl. Lasitardanus Bukit Harapan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				- Perencanaan teknis, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Supervisi teknis, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Dokumen lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Perencanaan teknis (Usulan DAK 2022), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Dokumen lingkungan (Usulan DAK 2022), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Rehabilitasi Jl. Manunggal dan Jl. Lapangape, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rehabilitasi Jl. Pepabri, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rehabilitasi duiker Jl. Beringin, dengan target 1 paket	1 paket	96 %		
				- Perencanaan teknis Paket 2, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Supervisi teknis Paket 2, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Dokumen lingkungan Paket 2, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Rehabilitasi Jalan (DID) Rehabilitasi Jl. Akses Stadion Gelora Mandiri (DID) Lompoe, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rehabilitasi Jl. A. Mappatola (DID) Ujung Sabbang, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rehabilitasi Jl. A. Cammi (DID) Mallusetasi, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				- Rehabilitasi Jl. Alwi Abd. Jalil Habibie (DID) Ujung Sabbang, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rehabilitasi Jl. M. Arsyad (DID) Ujung Baru, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Rehabilitasi Jl. Nenas (DID) Tiro Sompe, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Perencanaan teknis, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Supervisi teknis, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Dokumen lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Rehabilitasi berkala jalan (Lanjutan 2020), dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pengawasan teknis, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Pemeliharaan Rutin Jalan	- Pemeliharaan rutin jalan (tersebar), dengan target 2.376 meter	2.376 meter	100 %		
				- Meterisasi lampu penerangan jalan umum, dengan target 6.700 meter	6.700 meter	100 %		
				- Pemantauan dan pengawasan lampu PJU, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
				- Pemeliharaan rutin lampu hias dan lampu taman, dengan target 20 titik	20 titik	100 %		
				- Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan umum, dengan target 7.300 titik	7.300 titik	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				- Penataan dan peningkatan kualitas lorong, dengan target 54 titik - Penataan jalan lingkungan, dengan target 48 titik	54 titik 48 titik	100 %		
				- Pendataan dan penomoran lampu jalan, dengan target 850 titik lampu	850 titik	100 %		
				- Pendataan meterisasi dan non meterisasi lampu PJU, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
				- Penyediaan jasa pemeliharaan lampu PJU, dengan target 38 orang	38 orang	100 %		
				- Penyediaan pakaian kerja dan aksesoris petugas PJU, dengan target 30 set	45 set	100 %		
				- Revitalisasi lampu jalan umum, dengan target 200 titik	200 titik	100 %		
				- Validasi meterisasi lampu PJU, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
				- Pemeliharaan kendaraan operasional PJU, dengan target 14 unit	14 unit	100 %		
				- Peralatan kerja PJU, dengan target 6 unit	10 unit	100 %		
				- Rehabilitasi lampu hias Jalan Mattirotasi (DID), dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Relokasi tiang dan pemasangan jaringan dan lampu Jalan Jl. Jend Ahmad Yani (Depan Dinas Lingkungan Hidup-Batas Parepare Sidrap)(DID), dengan target 1 paket	1 paket	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				- Rehabilitasi pintu gerbang Batas Kota Parepare-Barru (DID), dengan target 1 paket	1 paket	67,44 %		
				- Pembangunan aksesoris kota (DID), dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(5) Pembangunan Jembatan	- Pembangunan jembatan kembar perencanaan teknis, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Study kelayakan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Dokumen lingkungan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Rehabilitasi Jembatan	- Pemeliharaan jembatan perencanaan teknis (Usulan DAK 2023), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
				- Dokumen lingkungan (Usulan DAK 2023), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Alokasi anggaran sebesar Rp.211.360.000,- dengan realisasi Rp.198.997.408,- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk bentuk :	Ketaatan terhadap RTRW, dengan target 100%	100%	100 %		
			a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksanya penetapan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kota Parepare, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Penyusunan ranperda RDTR/RRTR dan peraturan zonasi kawasan pesisir Kota Parepare, penyusunan RRTR/RDTR Kota Parepare, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksanya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pendataan dan <i>survey rolling</i> tiap lokasi IMB, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(2) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	- Pelaksanaan penataan ruang daerah, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
				- Pendataan bangunan dalam Kota Parepare, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
4.	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.716.549.400,- dengan realisasi Rp.3.610.354.224,- atau 97,14 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan hasil pelaporan capaian kinerja, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(7) Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan PUG, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu, dengan target 100	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa penatausahaan keuangan, dengan target 219 jasa	219 jasa	100 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			c. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparat yg diikutkan diklat, dengan target 8 orang	9 orang	112,5 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bahan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, dengan target 634 bahan	634 bahan	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor, dengan target 566 bahan	566 bahan	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan, dengan target 20.952 bahan	20.952 bahan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan, dengan target 214 exemplar	214 exemplar	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bahan ATK, dengan target 2.253 bahan	2.463 bahan	109,3 %		
			(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas perjalanan, dengan target 64 laporan	89 laporan	139,06 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor, dengan target 12 unit	12 unit	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, dengan target 1500 surat	1.900 surat	126,6 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah tagihan, dengan target 60 tagihan	60 tagihan	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor, dengan target 132 tagihan	131 tagihan	99,24 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, dengan target 12 unit	12 unit	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara, dengan target 3 unit	3 unit	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3) Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebeleur, dengan target 23 unit	23 unit	100 %		
			(4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan, dengan target 44 unit	44 unit	100 %		
			(5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		
			2) Program Kawasan Permukiman. Alokasi anggaran sebesar Rp.13.714.167.760,- dengan realisasi Rp.12.029.356.135,- atau 87,71 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Jumlah lokasi lingkungan kumuh yang memperoleh bantuan, dengan target 4 lokasi	9 lokasi	225 %		
			a. Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah kelurahan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, dengan target 22 kelurahan	22 kelurahan	100 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah lorong yang di betonisasi, dengan target 66 lorong	85 lorong	128,78 %		
			b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Ha.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, dengan target 45 %	85,18 %	189,2 %		
			(1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah MBR/tidak layak huni yang difasilitasi di lingkungan kumuh, dengan target 130 unit	130 unit	100 %		
			3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Alokasi anggaran sebesar Rp.5.947.695.000,- dengan realisasi Rp.5.078.728.220,- atau 85,39 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan ketersediaan rumah layak huni, dengan target 100 %	95,86 %	95,86 %		
			a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan rumah tidak layak huni, dengan target 19 lokasi	19 lokasi	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha.	Jumlah rumah MBR/tidak layak huni yang difasilitasi, dengan target 161 unit	119 unit	73,91 %		
			4) Progran peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Alokasi anggaran sebesar Rp.90.000.000,- dengan realisasi Rp.90.000.000,- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Jumlah perumahan yang dilengkapi PSU, dengan target 29 perumahan	29 perumahan	100 %		
			a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang menyerahkan PSU ke Pemerintah Kota, dengan target 5 perumahan	9 perumahan	180 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah dokumen PSU, dengan target 5 dokumen	5 dokumen	100 %		
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.3.794.614.000,- dengan realisasi Rp.3.522.069.162,- atau 92,82 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, dengan target 15 dokumen	15 dokumen	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renja 2022, dokumen perubahan renja 2021 dan dokumen perubahan renstra 2018-2023, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Tersedianya dokumen RKA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Tersusunnya dokumen perubahan RKA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA	Tersusunnya dokumen DPA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA	Tersusunnya dokumen perubahan DPA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Satpol PP Parepare	Tersusunnya lakip, perjanjian kinerja dan rencana aksi, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah, dan dokumen PUG, dengan target 5 dokumen	5 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan, dengan target 24 dokumen	24 dokumen	100%		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah dokumen pengajuan dan verifikasi keuangan, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparat yang mengikuti diklat formal, diklat dasar dan diklat fungsional, dengan target 16 orang	16 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor, dengan target 51 bahan	51 bahan	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik, dengan target 330 bahan	330 bahan	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan pengadaan, dengan target 16.666 lembar	16.666 lembar	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor, dengan target 120 tagihan	120 tagihan	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan alat kebersihan dan ATK kantor, dengan target 330 bahan	330 bahan	100 %		
			(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya makan minum rapat dan terlaksananya koordinasi keluar daerah, 54 kali/laporan	54 kali/ laporan	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan operasional Tim PRC, dengan target 2 unit	2 unit	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat, dengan target 650 surat	650 surat	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Satpol PP Parepare	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan target 72 tagihan	72 tagihan	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor, honor PTT dan kebersihan, dengan target 7 orang dan 84 jasa	84 jasa	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya kualitas sarana dan prasarana, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, dengan target 23 unit	23 unit	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya perbaikan laptop, printer dan peralatan lainnya, dengan target 22 unit	22 unit	100 %		
			(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		
			2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Alokasi anggaran sebesar Rp.2.201.552.600,- dengan realisasi Rp.2.159.399.200,- atau 98,09 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:	Persentase penanganan gangguan trantibun, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan trantibun yang dapat diselesaikan, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	- Terbayarnya jasa deteksi dini, patroli, pengamanan dan pengawasan, dengan target 100 % - Terbayarnya upah jasa tenaga bantuan Pol PP, dengan target 103 orang	100 % 103 orang	100 %		
			(2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Tersedianya tim peduli reaksi cepat, petugas tindak internal dan penanganan demonstrasi, dengan target 12 bulan	12 bulan	100%		
			(3) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya laporan koordinasi trantibun dan linmas, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(4) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya pelatihan korsik, dengan target 20 orang dan 9 bulan	20 orang, 9 bulan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(5) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah operasi gabungan Satpol PP, TNI, Polri dan instansi terkait, dengan target 48 kali	48 kali	100 %		
			(6) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya perwali ketentraman ketertiban umum, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(7) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedianya laporan layanan aduan peduli, 12 dokumen	12 dokumen	100 %		
			b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah perda dan perkada yang ditegakkan, dengan target 44 perda	44 perda	100 %		
			(2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran perda yang tertangani, dengan target 100 %	100 %	100 %		
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.5.057.702.400,- dengan realisasi Rp.5.029.069.037,- atau 99,43 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100 %	99,38 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan, dengan target 4 dokumen	4 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan, target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan ASN, dengan target 37 orang	37 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah pemberian honor bagi penyelenggaraan administrasi keuangan, dengan target 264 jasa	264 jasa	100 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir (5) Tahun	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi kepegawaian yang dilaksanakan, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, dengan target 9 orang	9 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik yang dicadangkan, dengan target 10 jenis	10 jenis	100 %		
			(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target 2 jenis	2 jenis	100 %		
			(3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan, dengan target 6 jenis	6 jenis	100 %		
			(4) Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan, dengan target 4 jenis	4 jenis	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia, dengan target 191 exemplar	191 exemplar	100 %		
			(6) Penyediaan Bahan/Material	Jumlah komponen bahan/material, dengan target 35 jenis	35 jenis	100 %		
			(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dengan target 53 kali	53 kali	100 %		
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah surat keluar yang tersampaikan, dengan target 750 surat	750 surat	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah bulan tagihan yang dibayar, dengan target 48 tagihan	48 tagihan	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target 5 jenis	5 jenis	100 %		
			f. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100%	100 %	96,25 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Ketangkasan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara, dengan target 10 unit	10 unit	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara, dengan target 7 unit	11 unit	85,00 %	Adanya kendaraan dinas/operasional yang tidak memiliki kelengkapan STNK dan BPKB, sehingga pembayaran perizinan tidak bisa dilaksanakan.	Telah dilakukan koordinasi dengan Bidang Asset BKD dan pihak Samsat untuk diterbitkan surat STNK dan BPKB yang baru
			(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara, dengan target 9 unit	9 unit	100 %		
			(4) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara, dengan target 3 unit	3 unit	100 %		
			2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Alokasi anggaran sebesar Rp.218.199.700,- dengan realisasi Rp.197.285.400,- atau 99,91 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah danru dan wadanru, dengan target 72 jasa	72 jasa	100 %		
			(2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasional pemadam kebakaran, dengan target 103 kali	103 kali	100 %		
			(3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah petugas divisi penyelamatan, dengan target 29 orang	29 orang	100 %		
		B P B D	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.2.047.511.764,- dengan realisasi Rp.1.895.870.505,- atau 92,59 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target 9 dokumen	9 dokumen	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran RKA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran perubahan RKA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran DPA SKPD yang disusun, dengan target	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				1 dokumen				
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran perubahan DPA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun (LKjIP, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja), dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (Dok Evaluasi Renja/Renstra SKPD, Lap. PUG SKPD), dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah, dengan target 5 kegiatan	5 kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan, dengan target 21 orang	21 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, dengan target 186 jasa	183 jasa	98,38 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun, dengan target 12 laporan	1 dokumen	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian daerah, dengan target 100 %	100 %	50 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan, dengan target 2 orang	0 orang	0 %		
			(2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis, dengan target 6 orang	6 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah, dengan target 6 kegiatan	6 kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan kantor kecamatan dan kelurahan yang disediakan, dengan target 469 Bahan	305 bahan	65,03 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan, dengan target 1.117 Bahan	1.117 bahan	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan, dengan target 2.602 bahan	2.602 bahan	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, dengan target 60 eksemplar	60 eksemplar	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/ material yang disediakan, dengan target 632 bahan	617 bahan	97,62 %		
			(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan target 40 kali	40 kali	100 %		
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan, dengan target 3 kegiatan	3 kegiatan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, dengan target 450 surat	415 surat	92,22 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telpon, air dan listrik yang terbayar, dengan target 36 tagihan	24 tagihan	66,67 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga administrasi, tenaga kebersihan, tenaga keamanan kantor, premi BPJS ketenagakerjaan yang dibayarkan, dengan target 251 jasa	248 jasa	98,76 %		
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah, dengan target 5 kegiatan	5 kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajak kendaraannya, dengan target 5 unit	5 unit	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajak kendaraannya, dengan target 5 unit	5 unit	100%		
			(3) Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeulair, dengan target 10 unit	10 unit	100 %		
			(4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor, dengan target 41 unit	41 unit	100 %		
			(5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhab, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		
			2) Program Penanggulangan Bencana. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.115.327.236,- dengan realisasi Rp.943.140.973,- atau 84,56 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya pelayanan dasar melalui peningkatan perlindungan bagi masyarakat, dengan target 100 %	100 %	86 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan bagi warga, dengan target 150 peserta	150 peserta	100 %		
			(2) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(3) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan target 9 unit	-	0 %	HPS tidak cukup mengakomodir spesifikasi barang yang dibutuhkan	Melakukan perencanaan anggaran yang lebih tepat
			(4) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kelurahan tangguh, dengan target 22 kelurahan	22 kelurahan	100 %		
			(5) Penanganan Pasca Bencana	Jumlah laporan kejadian bencana, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(6) Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah peserta gladi, dengan target sebanyak 70 orang	70 orang	100 %		
			b. Pelayanan Pencarian dan Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan kejadian dengan, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
6.	Sosial	DINAS SOSIAL	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.2.764.070.970,- dengan realisasi Rp.2.726.169.619,- atau 98,63 % persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya kegiatan administrasi persuratan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah,	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				dengan target 100 %				
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perubahan renstra dan renja, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PUG dan dokumen monev - program kegiatan dan sub kegiatan, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan ASN, dengan target 27 ASN	27 ASN	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan, dengan target 22 jenis jasa keuangan dan 270 jasa	22 Jenis, 270 jasa	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kemampuan kepegawaian perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, dengan target 6 ASN	6 ASN	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum kesekretariatan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bahan komponen instalasi listrik/penerangan kantor, dengan target 188 buah	188 buah	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor, dengan target 1.520 buah	1.520 buah	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetak dan penggandaan untuk operasional kantor, dengan target 14.000 lembar	14.000 lembar	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan undang-undang dan - peraturan perundang-undangan yang tersedia, dengan target 168 eksamplar	168 eksamplar	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah penyediaan bahan atk untuk operasional kantor, dengan target 407 buah	407 buah	100 %		
			(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah koordinasi & konsultasi dalam dan luar provinsi yang dilaksanakan, dengan target 52 kali - Jumlah penyediaan makan dan snack rapat-rapat kesekretariatan, dengan target 228 dos 	52 Kali 228 dos	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan peralatan kantor, dengan target 5 unit	5 unit	100 %		
			(2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan/ rehabilitasi gedung kantor, dengan target 2 unit	2 unit	100 %		
			(3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target 18 unit	18 unit	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah administrasi persuratan, dengan target 758 surat	758 surat	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa rekening tagihan, dengan target 60 jasa	60 jasa	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa PTT, tenaga kebersihan dan jaminan keselamatan kerja PTT, dengan target 206 jasa	206 jasa	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan rutin/berkala barang milik daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional, dengan target 13 STNK - Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang akan dipelihara, dengan target 13 unit	13 STNK 13 unit	100 % 100 %		
			(2) Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebeleur kantor yang akan dipelihara, dengan target 12 unit	12 unit	100 %		
			(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang terpelihara, dengan target 2 unit	2 unit	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dipelihara, dengan target 9 jenis	9 jenis	100 %		
			2) Program Pemberdayaan Sosial Alokasi anggaran sebesar Rp.75.172.800,- dengan realisasi Rp.68.627.600,- atau 91,29 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pemberdayaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), dengan target 100 %	98,33 %	98,33 %		
			a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), dengan targer 100 %	98,33 %	98,33 %		
			(1) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jasa TKSK yang melaksanakan penanganan PMKS, dengan target 60 jasa	60 jasa	100 %		
			(2) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi kesetiakawanan sosial nasional, dengan target 6 kali	5 kali	95 %		
			(3) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah permasalahan keluarga yang tertangani, dengan target 30 orang	28 orang	92,61 %		
			3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Alokasi anggaran sebesar Rp.112.581.000,- dengan realisasi Rp.89.413.546,- atau 79,42 % persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pelayanan Sosial dan psikososial PMKS warga negara migran korban tindak kekerasan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Persentase pelayanan sosial dan psikososial warga negara misgran korban tindak kekerasan, dengan target 100 %	100%	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan	- Jumlah pelayanan pemulangan orang terlantar ke daerah asal, dengan target 88 layanan - Jumlah pelayanan sosial dan psikososial bagi klien pada Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), dengan target 96 layanan	88 orang 96 layanan	100 % 100 %		
			4) Program Rehabilitasi Sosial Alokasi anggaran sebesar Rp.2.330.683.600, dengan realisasi Rp.2.203.611.600,- atau 94,55 % persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas penerima manfaat, dengan target 75 orang	75 orang	100 %		
			(2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah pengurus LKSA yang mendapatkan bimbingan, dengan target 27 orang	27 orang	100 %		
			(3) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah petugas/ pendamping sosial penyandang disabilitas, dengan target 6 orang	6 orang	100 %		
			b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase rehabilitasi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah anggota tim koordinasi dan pendamping sosial bantuan pangan non tunai, dengan target 40 orang	40 orang	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Pemberian Layanan Kedaruratan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah layanan pemakaman bagi masyarakat kurang – mampu, dengan target 146 layanan - Jumlah layanan pemakaman bagi korban Covid-19, dengan target 118 layanan 	146 Layanan	100 %		
			(3) Penyediaan Permakanan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penerima peduli beras miskin, dengan target 2.127 orang 	2.127 orang	100 %		
				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah UEP Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mendapatkan stimulasi, dengan target 31 orang 	31 orang	100 %		
			(4) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah petugas/pendamping sosial penyandang disabilitas, dengan target 6 orang	6 orang	100 %		
			5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Alokasi anggaran sebesar Rp.4.478.198.650,- dengan realisasi Rp.4.040.645.440,- atau 90,23 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase perlindungan dan jaminan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase layanan sosial dan psikososial PMKS anak terlantar, gelandangan dan pengemis, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah razia anak jalanan yang dibina, dengan target 48 kali Jumlah razia gelandangan dan pengemis, dengan target 48 kali	48 Razia 48 razia	100 % 100 %		
			(2) Rujukan Anak-Anak Terlantar	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelayanan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum, dengan target 20 anak - Jumlah pelayanan sosial dan psikososial anak penyandang 	20 anak 35 anak	100 % 100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				masalah kesejahteraan sosial, dengan target 35 anak				
			b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi data terpadu kesejahteraan sosial melalui melalui Sistem layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), dengan target 70 orang	70 orang	100 %		
			(2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jasa pendampingan sosial Program Keluarga Harapan, dengan target 90 jasa	90 jasa	100 %		
			(3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah lansia yang memperoleh stimulasi pemenuhan kebutuhan pokok, dengan target 285 orang	285 orang	100 %		
			6) Program Penanganan Bencana Alokasi anggaran sebesar Rp.273.000.000,- dengan realisasi Rp.187.092.720,- atau 68,53 % persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, dengan target 100 %	95 %	95 %		
			a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase penanganan PMKS korban bencana alama dan bencana sosial, dengan target 100 %	95 %	95 %		
			(1) Penyediaan Makanan	Jumlah pengerahan petugas dan dapur umum lapangan perlindungan sosial bagi korban bencana, dengan target 90 kali	81 kali	90 %		
			(2) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah jasa tenaga pengelola layanan bantuan logistik bencana, dengan target 79 jasa	79 jasa	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Alokasi anggaran sebesar Rp.129.380.000,- dengan realisasi Rp.124.190.485,- atau 95,99 % persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pengelolaan dan pelestarian nilai kepahlawanan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase pelestarian nilai kepahlawanan, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah jasa tenaga kebersihan 1 TMP dan 2 monumen pahlawan, dengan target 48 jasa	48 jasa	100 %		

Tabel 3.2. Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
1.	Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.4.183.251.470,- dengan realisasi Rp.4.605.077.750,- atau 84,26 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapaiannya layanan administrasi perkantoran, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renstra dan renja SKPD, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Perubahan SKPD, target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA Perubahan SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi perangkat daerah dan laporan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji ASN, dengan target 50 orang	50 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, dengan target 349 jasa	349 jasa	100 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tercapainya dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/ semesteran, dengan target 4 dokumen	4 dokumen	100 %		
			c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya pegawai yang mendapatkan bantuan pendidikan dan pelatihan, dengan target 5 orang	5 orang	100 %		
			d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik/ penerangan, dengan target 7 unit	7 unit	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya bahan logistik kantor, dengan target 7 jenis	7 jenis	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan bahan cetak dan penggandaan, dengan target 16.800 eksamplar	16.800 eksamplar	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, dengan target 181 eksamplar	181 Eksamplar	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(5) Penyediaan Bahan/ Material	Tercapainya jasa petugas kebersihan dan tersedianya bahan ATK operasional kantor, dengan target 36 jasa & 26 unit	36 jasa, 26 unit	100 %		
			(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dan rapat koordinasi dan konsultasi, dengan target 28 kali	28 kali	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya target 6 unit	100 %	100 %		
			(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dengan target 6 unit	6 unit	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	85 %	92,50 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya jasa surat menyurat, dengan target 500 surat	425 surat	85 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya tagihan rekening telepon, air dan listrik, dengan target 108 rekening	108 rekening	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor, dengan target 288 jasa	288 jasa	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas dan terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas, dengan target 8 unit dan 8 jenis	8 unit, 8 jenis	100 %		
			(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor dan terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor, dengan target 27 unit dan 10 unit	27 unit, 10 unit	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Alokasi anggaran sebesar Rp.539.285.180,- dengan realisasi Rp.434.238.706,- atau 80,52 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya tenaga kerja yang mendapat pelatihan, dengan target 63,30 %	76,56 %	81,61 %		
			a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencaker yang mendapatkan kompetensi, dengan target 240 orang	160 orang	66,67 %	Terbatasnya paket pelatihan berbasis kompetensi	Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pelatihan berbasis kompetensi
			(1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya pelatihan dan bantuan peralatan kepada masyarakat dan terlaksananya pelatihan keterampilan kerja, dengan target 172 orang dan 265 orang	172 orang, 265 orang	100 %		
			(2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya instruktur yang mengikuti <i>upgrading</i> , dengan target 4 orang	4 orang	100 %		
			b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina, dengan target 20 LPKS	20 LPKS	100 %		
			(1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya pembinaan LPK, dengan target 20 LPKS	20 LPKS	100 %		
			c. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pengukuran produktivitas, dengan target 30 orang	30 orang	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya pengukuran kompetensi tenaga kerja, dengan target 30 orang	30 orang	100 %		
			3) Program Penempatan Tenaga Kerja Alokasi anggaran sebesar Rp.65.699.200,- dengan realisasi Rp.64.904.300,- atau 98,79 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapaiannya serapan tenaga kerja, dengan target 800 lowongan	871 lowongan	109 %		
			a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah serapan tenaga kerja melalui kegiatan pelayanan antar kerja di daerah, dengan target 25 orang	25 orang	100 %		
			(1) Pelayanan Antar Kerja	Terlaksananya serapan tenaga kerja melalui kegiatan pelayanan antar kerja daerah, dengan target 25 orang	25 orang	100 %		
			b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan informasi pasar kerja, dengan target 12 kali/laporan	12 kali	100 %		
			(1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terlaksananya penyuluhan pencari kerja/siswa, dengan target 12 kali	12 kali	100 %		
			4) Program Hubungan Industrial Alokasi anggaran sebesar Rp.64.999.250,- dengan realisasi Rp.53.276.850,- atau 81,97 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapaiannya perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja di perusahaan, dengan target 64 %	76,09 %	84,11 %		
			a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang membuat peraturan perusahaan dan perusahaan yang memiliki serikat pekerja/serikat buruh, dengan target 150 perusahaan	100 %	100 %		
			(1) Penyelenggaraan Pendataan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terlaksananya pendataan di perusahaan, dengan target 150 perusahaan	150 perusahaan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial, dengan target 60 %	74,88 %	80,12 %		
			(1) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya penyelesaian kasus perselisihan, dengan target 22 kasus	22 kasus	100 %		
			(2) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi anggota dan sekretariat lembaga kerjasama tripartit daerah, dengan target 11 orang	11 orang	100 %		
2.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.306.743.600,- dengan realisasi Rp.2.599.449.320,- atau 78,61 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pemenuhan administrasi Perkantoran 100 %	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan hasil sistem capaian kinerja keuangan tepat waktu, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja, perubahan renja dan renstra, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja -SKPD	Jumlah dokumen LKJP dan perjanjian kinerja, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja dan laporan PUG, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang difasilitasi gaji dan tunjangan, dengan target 18 pegawai	18 pegawai	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan	Waktu pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang di fasilitasi administrasi kepegawaiannya, dengan target 18 pegawai	18 pegawai	100 %		
			(2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pelaksanaan monev penilaian kinerja pegawai, dengan target 4 kali	4 kali	100 %		
			(3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, dengan target 5 orang	5 orang	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan, dengan target 5 orang	5 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu pelaksanaan logistik kantor, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(3) Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Waktu pelaksanaan barang cetakan dan penggandaan, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu pelaksanaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan/Material	Waktu penyediaan bahan/material, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(6) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu pelaksanaan kunjungan tamu, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi, dengan target 10 kali dan 30 kali	10 kali dan 30 kali	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan kantor dan mesin lainnya, dengan target 7 jenis	7 jenis	100 %		
			(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya, dengan target 7 jenis	7 jenis	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, dengan target 600 lembar	685 lembar	114 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT yang dibayarkan jasa dan BPJS ketenagakerjaan, dengan target 17 orang	17 orang	100 %		
			g. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(2) Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara, dengan target 3 jenis	3 jenis	100 %		
			(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara, dengan target 5 jenis	5 jenis	100 %		
			(4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang direhab dan bangunan baru, dengan target 2 unit dan 1 unit	2 unit dan 1 unit	100 %		
			2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Alokasi anggaran sebesar Rp.1.012.235.000,- dengan realisasi Rp.787.600.200,- atau 77,80 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD, dengan target 24 %	24 %	100 %		
			a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Jumlah lembaga pemerintah/ SKPD yang melembagakan PUG, dengan target 33 SKPD	33 SKPD	100 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan Kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen APE, dengan target 46 dokumen	46 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG	Jumlah SKPD yang difasilitasi pelaksanaan PUG, dengan target 33 SKPD	33 SKPD	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis PPRG, dengan target 50 orang	50 orang	100 %		
			(4) Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi, dengan target 50 orang	50 orang	100 %		
			b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan, dengan target 80 organisasi	80 organisasi	100 %		
			(1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosialisasi dan Ekonomi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi, dengan target 30 orang	30 orang	100 %		
			(2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen kegiatan, dengan target 4 dokumen	4 dokumen	100 %		
			c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah utusan lembaga yang mengikuti penguatan, dengan target 50 utusan	50 utusan	100 %		
			(1) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah utusan lembaga yang mengikuti peningkatan kapasitas, dengan target 50 orang	50 orang	100 %		
			3) Program Perlindungan Perempuan Alokasi anggaran sebesar Rp.691.582.000,- dengan realisasi Rp.250.269.068,- atau 36,19 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan penanganan pengaduan perempuan termasuk TPPO, dengan target 100%	100 %	100 %		
			a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan yang ditangani, dengan target 100 kasus	41 kasus	41 %		
			(1) Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta satgas TPPO yang mengikuti rapat kerja dan monitoring, dengan target 40 orang	40 orang	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah layanan yang diberikan, dengan target 8 layanan	8 Layanan	100 %		
			(1) Penyediaan layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya operasional <i>Calling</i> PERAN, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Operasional P2TP2 target 12 bulan dan DAK Non Fisik, dengan target 1 kegiatan	12 bulan, 1 kegiatan	100 %		
			c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah anggota lembaga yang diberikan penguatan, dengan target 30 orang	30 orang	100 %		
			(1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	Terpenuhinya rumah <i>shelter</i> /rumah aman, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		
			(2) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah paralegal/ pendamping yang mengikuti peningkatan kapasitas, dengan target 30 orang	30 orang	100 %		
			(3) Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Jumlah kebutuhan spesifik, dengan target 20 paket	20 paket	100 %		
			4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga Alokasi anggaran sebesar Rp.156.300.000,- dengan realisasi Rp.107.449.000,- atau 68,75 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase lembaga Layanan pemberdayaan Perempuan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas keluarga, dengan target 3 kegiatan	3 kegiatan	100 %		
			(1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Kewenangan Kabupaten/ Kota					
			(2) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga	Jumlah media komunikasi, informasi dan edukasi, dengan target 3 jenis media	3 jenis media	100 %		
			(3) Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan keterampilan manajemen usaha, dengan target 50 orang	50 orang	100 %		
			b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender dan Hak Anak	Jumlah kelurahan dalam rangka penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan, dengan target 22 kelurahan	22 kelurahan	100 %		
			(1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah kebijakan teknis, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(2) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah SDM yang dilatih, dengan target 40 orang	40 orang	100 %		
			(3) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah kelurahan yang di fasilitasi dalam pembentukan lembaga penyedia layanan konseling ketahanan keluarga, dengan target 22 kelurahan	22 kelurahan	100 %		
			(4) Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Tersedianya layanan dalam rangka mewujudkan KG dan hak anak, dengan target 22 kelurahan	22 kelurahan	100 %		
			(5) Pelaksanaan Penyedia Layanan Komprehensif Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelurahan yang melaksanakan layanan komprehensif bagi keluarga, dengan target 22 kelurahan	22 kelurahan	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Alokasi anggaran sebesar Rp.55.000.000,- dengan realisasi Rp.29.350.000,- atau 53,36% persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase ketersediaan data gender dan anak yang valid, dengan target target 80%	80 %	100 %		
			a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Ketersediaan data gender dan anak, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(1) Penyediaan Data Gender dan Anak	Tersedianya profil gender dan anak, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penilaian APE, dengan target 46 dokumen	46 dokumen	100 %		
			6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Alokasi anggaran sebesar Rp.249.078.000,- dengan realisasi Rp.245.434.355,- atau 98,54 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Predikat Kota Layak Anak, dengan target Madya	Nindya	100 %		
			a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka pelembagaan pemenuhan hak anak, dengan target 4 kegiatan	4 kegiatan	100 %		
			(1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI), dengan target 1 asosiasi	1 asosiasi	100 %		
			(2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Parepare dan penilaian kota layak anak, dengan target 2 kegiatan	2 kegiatan	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan anak, dengan target 22 kelurahan	22 kelurahan	100 %		
			(1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Pembentukan perlindungan anak serta advokasi pencegahan perkawinan anak, dengan target 22 kelurahan	22 kelurahan	100 %		
			(2) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Hak Anak bagi Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah peserta pelatihan pemenuhan hak anak, dengan target 30 orang	30 orang	100 %		
			7) Program Perlindungan Khusus Anak Alokasi anggaran sebesar Rp.249.078.000,- dengan realisasi Rp.245.434.355,- atau 98,54 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani, dengan target 100%	100 %	100 %		
			a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah kabupaten/Kota	Jumlah kekerasan terhadap anak, dengan target 44 kasus	16	36,36 %		
			(1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye Hak Anak Perluasan ILA, dengan target 22 kelurahan	22 kelurahan	100 %		
			b. Penyediaan Layanan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Tersedianya forum anak di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan, dengan target 27 forum	27 forum	100 %		
			(1) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan konveksi hak anak (KHA), target 30 orang	30 orang	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan, dengan target 27 forum anak	27 forum anak	100 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Pengadaan sarana dan prasarana Pusat Kreatifitas Anak (PKA), dengan target 2 unit	2 unit	100 %		
			(2) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pemilihan duta anak tingkat Kota Parepare, dengan target 100 orang	100 orang	100 %		
			(3) Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Terlaksananya monev anak, dengan target 6 kali	6 kali	100 %		
3.	Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.2.221.040.345,- dengan realisasi Rp.2.108.657.666,- atau 94,94 persen persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pelayanan administrasi perkantoran, dengan target 100 persen	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, dengan target 11 dokumen	11 dokumen	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ dan LKJip yang tersusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PUG dan Evaluasi Kinerja yang tersusun, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pelaporan keuangan, dengan target 5 dokumen	5 dokumen	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN, dengan target 18 orang	18 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan, dengan target 176 jasa	176 jasa	100 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan/dokumen yang tersusun, dengan target 4 dokumen	4 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan/dokumen yang tersusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan/dokumen yang tersusun, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan pendidikan dan pelatihan, dengan target 1 kegiatan	1 kegiatan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek, dengan target 5 orang	5 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan penunjang administrasi umum, dengan target 7 kegiatan	7 kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bahan komponen listrik yang tersedia, dengan target 90 bahan	90 bahan	100 %		
			(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah lokasi taman untuk pangan, dengan target 4 demplot	4 demplot	100 %		
			(3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia, dengan target 215 bahan	215 bahan	100 %		
			(4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak yang tersedia, dengan target 3.000 lembar	3.000 lembar	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, dengan target 1.044 eksemplar	1.044 eksemplar	100 %		
			(6) Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan ATK dan bahan pembersih yang tersedia, dengan target 463 ATK dan 130 bahan pembersih	463 ATK, 130 bahan	100 %		
			(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan, dengan target 335 bahan, 66 kali koordinasi	335 bahan, 66 kali	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sub kegiatan penunjang sarana dan prasarana, dengan target 1 kegiatan	1 kegiatan	100 %		
			(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan, dengan target 5 unit	5 unit	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan penunjang layanan dinas, dengan target 3 kegiatan	3 kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola, dengan target 350 surat	350 surat	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening, dengan target 36 tagihan	36 tagihan	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa teknis dan kebersihan (bulan), dengan target 88 jasa	88 jasa	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penunjang pemeliharaan barang milik daerah, dengan target 3 kegiatan	3 kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara, dengan target 11 unit	11 unit	100 %		
			(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara, 25 jenis	25 jenis	100 %		
			(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara, dengan target 250 m ²	250 m ²	100 %		
			2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Alokasi anggaran sebesar Rp.158.136.385,- dengan realisasi sebesar Rp.158.100.635 atau 99,98 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tingkat ketersediaan pangan, dengan target 223 ton	224 ton	100 %		
			a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan penunjang kemandirian pangan, dengan target 2 kegiatan	2 kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah pendampingan <i>urban farming dan hidroponik</i> , dengan target 4 lokasi	4 lokasi	100 %		
			(2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah lokasi penataan pekarangan, dengan target 7 lokasi	7 lokasi	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Alokasi anggaran sebesar Rp.969.898.220,- dengan realisasi sebesar Rp.968.859.413 atau 99,89 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tingkat ketersediaan energi dan protein, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah sub kegiatan penunjang ketersediaan energi dan protein, dengan target 6 kegiatan	6 kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen NBM yang tersusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(2) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lokasi penataan kampung buah, kampung sayur (Inovasi Parepare Berbuah), dengan target 3 lokasi	3 lokasi	100 %		
			(3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah bibit tanaman untuk layanan BIDUAN, dengan target 26.500 polibag	26.500 polibag	100 %		
			(4) Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen distribusi dan info pangan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah pelaku TTI mobile, dengan target 20 orang	20 orang	100 %		
			b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah beras cadangan pemerintah daerah, dengan target 4 ton	4 ton	100 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan pengendalian cadangan pangan, dengan target 4 ton	5 ton	100 %		
			(2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah beras cadangan pemerintah daerah, dengan target 4 ton	5 ton	100 %		
			(3) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga penerima bahan pangan (Rumah Pangan Kita),	25 kepala	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				dengan target 25 kepala keluarga	keluarga			
			c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor pola pangan harapan, dengan target 88 PPH	88 PPH	100 %		
			(1) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen yang tersusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok penerima P2L, dengan target 8 kelompok	8 KWT	100 %		
			4) Program Penanganan Kerawanan Pangan Alokasi anggaran sebesar Rp.44.989.000,- dengan realisasi sebesar Rp.44.989.000,- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tingkat Penanganan Rawan Pangan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen analisis kerawanan pangan, dengan target 2 dokumen (SKPG & FSVA)	2 dokumen	100 %		
			(1) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah dokumen yang tersusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga rawan pangan yang tertangani, dengan target 20 kepala keluarga	20 kepala keluarga	100 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang ditangani (keluarga rawan pangan), dengan target 20 kepala keluarga	20 kepala keluarga	100 %		
			5) Program Pengawasan Keamanan Pangan Alokasi anggaran sebesar Rp.34.999.600,- dengan realisasi sebesar Rp.34.997.600,- atau 99,99 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Prosentase pengawasan mutu pangan, dengan target 100 persen	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan untuk pembinaan dan pengawasan mutu pangan, dengan target 1 kegiatan	1 kegiatan	100 %		
			(1) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pengawasan mutu, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
4.	Pertanahan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN	1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi Rp.74.470.712,- atau 74,47 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase penyelesaian sengketa tanah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa tanah, dengan target 5 kasus	5 kasus	100 %		
			(1) Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen sengket tanah, dengan target 5 dokumen	5 dokumen	100 %		
			2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.445.000.000,- dengan realisasi Rp.2.024.707.370,- atau 58,77 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase penetapan tanah untuk fasilitas umum, dengan target 100 %	60 %	60 %		
			a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah luas lahan yang dibebaskan/ganti rugi, dengan target 4 km ²	0,0345 km ²	0,862 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh	Jumlah lokasi lahan yang dibebaskan/ganti rugi, dengan target 5 lokasi	3 lokasi	60 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
			3) Program Pengelolaan Tanah Kosong Alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dengan realisasi Rp.65.290.000,- atau 43,53 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Jumlah luas lahan yang bersertifikat, dengan target 4 km²	0,0334 km²	0,835 %		
			a. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah lokasi lahan yang bersertifikat, dengan target 20 lokasi	14 lokasi	70 %		
			(1) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah sertifikat lahan yang dibebaskan, dengan target 20 sertifikat	14 sertifikat	70 %		
			4) Program Penatagunaan Tanah Alokasi anggaran sebesar Rp.55.000.000,- dengan realisasi Rp.45.190.000,- atau 82,16 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang diterbitkan, dengan target 0 %	0 %	100 %		
			a. Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah,dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah dokumen perencanaan dan persiapan pengadaan lahan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
5.	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.6.120.442.242,- dengan realisasi Rp.5.439.408.237,- atau 88,87 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pemenuhan penunjang pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100%	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target 11 dokumen	11 dokumen	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan ASN, dengan target 68 orang	68 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelolaan keuangan, dengan target 39 jabatan	39 jabatan	100 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi kepegawaian yang dilaksanakan, dengan target 1 jenis	1 jenis	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, dengan target 9 orang	9 orang	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah, dengan target 100 %	60 %	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik yang diadakan, dengan target 16 jenis	16 jenis	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik selama 1 tahun, dengan target 650 komponen	650 komponen	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah komponen bahan cetak dan penggandaan, dengan target 20.442 komponen	20.442 komponen	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar/ media online selama 1 tahun, dengan target 300 eksemplar, 21 media online	300 eksemplar, 21 media online	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan/Material	Jumlah komponen bahan/ material, dengan target 514 komponen bahan/alat pembersih, 1.043 komponen/alat tulis kantor	514 komponen, 1.043 komponen	100 %		
			(6) Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah dos makan minum tamu, dengan target 225 dos	225 dos	100 %		
			(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dos makan minum rapat dan perjalanan dinas, dengan target 797 dos dan 160 OH perjalanan dinas	797 dos, 160 OH	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target 100 %	60%	100 %		
			1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan, dengan target 2 unit	2 unit	100 %		
			f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang tersampaikan, dengan target 700 surat	700 surat	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan yang dibayar, dengan target 48 tagihan	48 tagihan	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga PTT, Jumlah tagihan BPJS, dan Jumlah lama penagihan, dengan target 180 OB, 180 OB dan 12 bulan	180 OB, 180 OB, 12 bulan	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jabatan, kendaraan dinas yang dipelihara dan STNK kendaraan dinas, dengan target 21 jabatan, 26 unit dan 20 STNK	21 jabatan 26 unit 20 STNK	100 %		
			b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK kendaraan operasional/lapangan yang dibayar pajaknya, dengan target 76 STNK	76 STNK	100 %		
			c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara, dengan target 29 unit	29 unit	100 %		
			d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasan bangunan yang dipelihara dan bangunan yang direhab, dengan target 2 bangunan, 250 m ²	2 bangunan, 250 m ²	100 %		
			2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup Alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dengan realisasi Rp74.841.000,- atau 99,79 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Pemenuhan database, dokumen dan akses lingkungan hidup, dengan target 100 %	60 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PPLH yang dihasilkan, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(1) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Alokasi anggaran sebesar Rp.461.306.250,- dengan realisasi Rp.437.452.225,- atau 94,83 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran indeks kualitas air, dengan target 100 % - Pengukuran indeks kualitas udara, dengan target 95,2 % - Proporsi lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan, dengan target 0,005 % 	96,2 % 95,2 % 0,005 %	100 % 100 % 100 %		
			a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen hasil evaluasi yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen - Jumlah Jenis Belanja UPTD PAL, dengan target 10 jenis - Jumlah armada PAL yang dipelihara, dengan target 2 unit 	1 dokumen 10 jenis 2 unit	100 %		
			(2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen - Jumlah masyarakat yang dibina, dengan target 100 orang 	1 dokumen 100 orang	100 %		
			(3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jasa uji sampel, dengan target 480 OSK - Jumlah jasa uji udara ambien, dengan target 240 OSK - Jumlah Jenis Belanja UPTD 	480 OSK 240 OSK 13	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				Laboratorium Lingkungan, dengan target 13 jenis	jenis			
			b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemenuhan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lokasi pemantauan (termasuk kawasan pesisir), dengan target 4 kecamatan - Jumlah regulasi insentif hemat air yang dibuat, dengan target 1 regulasi 	4 kecamatan 1 regulasi	100 %		
			c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemenuhan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah lubang resapan biopori yang dibuat, dengan target 875 lubang resapan biopori	875 lubang resapan biopori	100 %		
			4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Alokasi anggaran sebesar Rp.4.717.929.000,- dengan realisasi Rp.3.815.384.721,- atau 80,87 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dengan target 51,38 - Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan, dengan target 12,61 	51,38 12,61 %	100 % 100 %		
			a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pengelolaan Kehati, dengan target 60 %	60 %	100 %		
			(1) Pengelolaan Kebun Raya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jenis belanja KRJ, dengan target 9 jenis - Jumlah TPH yang diasuransikan, dengan target 192 OB - Jumlah TPH yang diasuransikan, dengan target 15 TPH 	9 jenis 192 OB 15 TPH	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				<ul style="list-style-type: none">- Jumlah pengayaan tanaman, dengan target 1 kegiatan- Jumlah prasarana yang dipelihara, dengan target 2 prasarana	1 kegiatan 2 prasarana			
			(2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah TPH yang diasuransikan, dengan target 44 TPH- Jumlah jasa pertamanan, dengan target 578 jasa- Pengadaan tanaman penghijauan, dengan target 1 kegiatan- Jumlah objek yang ditata, dengan target 3 objek- Jumlah operasional sarana dan RTH yang dipelihara, dengan target 4 sarana dan 39 taman- Jumlah tanaman hias, dengan target 1 kegiatan- Jumlah sarana dan taman yang dipelihara, dengan target 19 sarana dan 7 kolam- Jumlah luas RTH yang dipelihara, dengan target 500 m²- Jumlah luas median jalan yang dipelihara, dengan target 500 m²- Jumlah <i>database</i> RTH, dengan target 1 <i>database</i>	44 TPH 578 jasa 1 kegiatan 3 objek 4 sarana, 39 taman 1 kegiatan 19 sarana, 7 kolam 500 m ² 500 m ² 1 <i>database</i>	100 %		
			(3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah masyarakat yang dibina, dengan target 100 orang- Jumlah RAD yang dibuat, dengan target 1 RAD- Jumlah regulasi yang dibuat, dengan target 1 regulasi	100 orang 1 RAD 1 regulasi	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah taman yang dibangun, dengan target 1 taman - Jumlah sarana RTH yang diadakan, dengan target 3 unit - Jumlah bangunan yang direhab, dengan target 1 taman - Jumlah bangunan yang dibangun, dengan target 1 pagar - Jumlah kendaraan yang diadakan, dengan target 1 unit - Jumlah kegiatan hutang dan lanjutan, dengan target 3 kegiatan 	1 taman 3 unit 1 taman 1 pagar 1 unit 3 kegiatan	100 %		
			5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dengan realisasi Rp.39.959.150,- atau 99,90 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase Limbah B3 yang dipelihara, dengan target 30 %	30 %	100 %		
			a. Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah dokumen pengawasan limbah B3, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah dokumen pengawasan limbah B3, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Alokasi anggaran sebesar Rp.68.999.600,- dengan realisasi Rp.65.451.900,- atau 94,86 persen yang dilaksanakan dalam	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, dengan target 96 % - Persentase pemberian izin-izin lingkungan, dengan target 100 % 	96 % 100 %	100 % 100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			bentuk kegiatan :					
			a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan target 60 %	60 %	100 %		
			(1) Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah sarana PPLHD yang diadakan, dengan target 1 unit	1 unit	100%		
			(2) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah kendaraan pemantauan yang dipelihara, dengan target 1 unit - Jumlah pelaku usaha yang dibina, dengan target 100 pelaku usaha	1 unit 100 pelaku usaha	100%		
			7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Alokasi anggaran sebesar Rp.135.000.000,- dengan realisasi Rp.130.692.600,- atau 96,81 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Pemenuhan peningkatan pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dan masyarakat, dengan target 60 %	60 %	100 %		
			a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, dengan target 5 upaya	5 upaya	100 %		
			(1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah kemitraan yang terjalin, dengan target 1 komunitas - Jumlah kegiatan pembinaan, dengan target 3 lokasi - Jumlah peserta, dengan target 50 orang	1 komunitas 3 lokasi 50 orang	100 %		
			(2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi proklamasi yang dibina, dengan target 1 lokasi	1 Lokasi	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Alokasi anggaran sebesar Rp.174.000.000,- dengan realisasi Rp.167.720.100,- atau 96,39 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Pemenuhan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, dengan target 60 %	60 %	100 %		
			a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah upaya untuk mendukung penerimaan penghargaan lingkungan hidup, dengan target 2 upaya	2 upaya	100 %		
			(1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Jumlah sekolah yang dibina, dengan target 15 sekolah - Jumlah titik pantau Adipura, dengan target 95 titik	15 sekolah 95 titik	100 %		
			9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi Rp.49.700.000,- atau 99,40 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Penanganan pengaduan masyarakat, dengan target 100 %	100%	100%		
			a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pemenuhan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan target 60 %	60 %	100 %		
			(1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang dibina, dengan target 100 orang	100 orang	100 %		
			(2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di	Jumlah jasa anggota Satgas Gakkum, dengan target 36 orang per kegiatan	36 orang per kegiatan	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan					
			10) Program Pengelolaan Persampahan Alokasi anggaran sebesar Rp10.782.650.408,- dengan realisasi Rp9.355.201.556,- atau 86,76 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<ul style="list-style-type: none"> - Timbulan sampah yang ditangani, dengan target 98 % - Persentase jumlah sampah yang berkurang 3R, dengan target 24 % - Persentase jumlah sampah yang tertangani, dengan target 74 % - Persentase cakupan area pelayanan, dengan target 91 % - Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA, dengan target 75 	98 % 24 % 74 % 91 % 75	100 % 100% 100 % 100 % 100 %		
			a. Pengelolaan Sampah	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengelolaan persampahan, dengan target 60 %	60 %	100 %		
			(1) Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sampah anorganik yang diolah (cacah plastik), dengan target 2.800 kg - Jumlah pupuk kompos yang dihasilkan, dengan target 21.000 kg - Jumlah Bank Sampah Induk dan TPS3R yang beroperasi, dengan target 2 unit 	2.800 kg 21.000 kg 2 unit	100 %		
			(2) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peralatan pemeliharaan persampahan, dengan target 4.967 peralatan - Jumlah TPH yang diasuransikan, dengan target 375 orang - Jumlah sarana yang direhabilitasi, dengan target 10 kontainer dan 15 kendaraan - Jumlah lokasi prasarana yang diperbaiki, dengan target 1 lokasi 	4.967 peralatan 375 orang 10 kontainer,15 kendaraan 1 lokasi	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah armada persampahan yang dipelihara, dengan target 78 unit - Jumlah jasa kebersihan kota, dengan target 387 orang 	78 unit 387 orang			
			(3) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah masyarakat yang dilatih, dengan target 100 orang - Jumlah masyarakat yang dilatih, dengan target 44 orang - Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang diserahkan ke masyarakat, dengan target 287 sarana prasarana - Jumlah aplikasi yang dikembangkan, dengan target 1 aplikasi - Jumlah lokasi percontohan, dengan target 1 lokasi - Jumlah lokasi pembinaan, dengan target 22 kelurahan 	100 orang 44 orang 287 sarana prasarana 1 aplikasi 1 lokasi 22 kelurahan	100 %		
			(4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sarana dan prasarana persampahan, dengan target 90 unit - Jumlah instalasi yang dibuat, dengan target 1 instalasi 	90 unit 1 target	100 %		
6.	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.3.749.315.000,- dengan realisasi Rp.3.346.518.145,- atau 89,26 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan pelaporan perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah,	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				dengan target 100 %				
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP, perjanjian kinerja 2021 dan rencana aksi 2021 yang disusun, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan ASN, dengan target 36 orang	21 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan, dengan target 21 jasa	21 jasa	100 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD, dengan target 18 dokumen	18 dokumen	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan bantuan diklat, dengan target 6 orang	6 orang	100 %		
			(2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kebijakan pencatatan sipil, dengan target 6 kebijakan	6 kebijakan	100 %		
			(3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek implementasi perundang-undangan, dengan target 3 orang	3 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen/ bahan-bahan listrik, dengan target 7 bahan	7 bahan	100 %		
			(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, dengan target 9 jenis	9 jenis	100 %		
			(3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga, dengan target 10 set	10 set	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik, dengan target 8 bahan	8 bahan	100 %		
			(5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan, dengan target 30 eksamplar	30 eksamplar	100 %		
			(6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar dan majalah, dengan target 10 eksamplar	10 eksamplar	100 %		
			(7) Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material, dengan target 18 bahan	18 bahan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(8) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman, dengan target 2.400 dos	2.400 dos	100 %		
			(9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan target 140 kali	140 kali	100 %		
			(10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui perangkat SPBE, dengan target 1.500 dokumen	2.171 dokumen	145 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor, dengan target 13 unit	13 unit	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, dengan target 950 surat	972 surat	102 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayar, dengan target 36 rekening	36 rekening	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara, dengan target 16 unit	16 unit	100 %		
			(4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa BPJS ketenagakerjaan, dengan target 36 jasa	36 jasa	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang di pelihara, dengan target 16 unit	16 unit	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas jabatan, dengan target 16 unit	16 unit	100 %		
			(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki, dengan target 14 unit	14 unit	100 %		
			(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		
			2) Program Pendaftaran Penduduk Alokasi anggaran sebesar Rp.115.675.000,- dengan realisasi Rp.115.675.000,- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, dengan target 100%	100%	100 %		
			a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah data penduduk non permanen dan dokumen penduduk rentan adminduk yang diterbitkan, dengan target 100 orang	11 orang	100 %		
			(2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk, dengan target 4 jenis (formulir dan resi)	4 jenis	100 %		
			(3) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk (formulir, resi dan blanko permohonan), dengan target 4 jenis (formulir dan resi)	4 jenis	100 %		
			(4) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa	Jumlah dokumen pelaporan peristiwa kependudukan yang diterbitkan, jumlah kartu identitas anak yang diterbitkan dengan target 4.750 lembar	18.784	395 %		
			(5) Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pelaporan peristiwa kependudukan yang	2.269	1.973 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				diterbitkan dengan target 115 dokumen				
			3) Program Pencatatan Sipil Alokasi anggaran sebesar Rp.70.975.000,- dengan realisasi Rp.70.975.000,- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase kepemilikan akte catatan sipil, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen pelaporan peristiwa penting yang diterbitkan (akta lahir dan akta kematian), dengan target 3.500 lembar	6.925 lembar	198 %		
			(2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah formulir pelayanan pencatatan sipil, dengan target 10 jenis	10 jenis	100 %		
			4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Alokasi anggaran sebesar Rp.101.274.300,- dengan realisasi Rp.100.874.300,- atau 99,61 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah, dengan target 10 instansi	13 instansi	130 %		
			(2) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi koordinasi/validasi data kependudukan, dengan target 5.760 data	26.002 data	451 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah layanan produk kependudukan yang disosialisasikan, dengan target 23 jenis	23 jenis	100 %		
			(4) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat dengan target 4 kali	4 kali	100 %		
			(5) Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah data kependudukan yang disajikan dengan target 23 jenis layanan	23 jenis	100 %		
			5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan Alokasi anggaran sebesar Rp.9.750.000,- dengan realisasi Rp.9.750.000,- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase penyusunan profil kependudukan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Penyusunan Profil Kependudukan	Terwujudnya penyusunan profil kependudukan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah profil data kependudukan yang disusun, dengan target 25 eksamplar	25 eksamplar	100 %		
7.	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.2.202.367.851,- dengan realisasi Rp.2.581.563.571,- atau 116 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan hasil pelaporan capaian kinerja, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100%		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan PUG, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan, dengan target 12 bulan	12 bulan	122 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa penatausahaan keuangan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100%		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan, dengan target 14 dokumen	14 dokumen	100%		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian, dengan target 100%	100 %	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat yg diikutkan diklat, dengan target 10 orang	10 orang	100%		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum, dengan target 1 laporan	1 laporan	100%		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bahan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, dengan target 11 jenis	11 Jenis	100%		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor, dengan target 23 jenis	23 jenis	100%		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan, dengan target 1.000 kali	1.000 kali	100%		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan, dengan target 144 eksamplar	144 exemplar	100%		
			(5) Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan ATK, dengan target 1 paket	1 paket	100%		
			(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah makan dan minum, dengan target 500 paket - Jumlah laporan perjalanan dinas perjalanan, dengan target 80 laporan	500 paket 80 laporan	100%		
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 1 laporan	1 laporan	100%		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, dengan target 850 surat	850 surat	100%		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah tagihan air, listrik, telpon dan internet, dengan target 4 tagihan dalam 12 bulan	4 tagihan	100%		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor, dengan target 12 jasa/alat	12 jasa/alat	100%		
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 1 laporan	1 laporan	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional, dengan target 48 STNK	48 STNK	100%		
			(2) Pemeliharaan Mebel	- Jumlah unit mebeleur, dengan target 30 unit - Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara, dengan target 22 unit	30 unit, 22 unit	100%		
			(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya, dengan target 22 unit	22 unit	100%		
			(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara, dengan target 1 unit	1 unit	100%		
8.	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	1) Program Pengendalian Penduduk Alokasi anggaran sebesar Rp.211.461.855,- dengan realisasi Rp.165.420.655,- atau 78,23 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Jumlah kebijakan tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, dengan target 4 kecamatan	4 kecamatan	100 %		
			a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Laju pertumbuhan penduduk, dengan target 4 kecamatan	4 kecamatan	100 %		
			b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, dengan target 286 kader	286 kader	89,00 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah institusi yang mengisi formulir C1, R1, dan F1, dengan target 286 kader	286 kader	100 %		
			(2) Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil keluarga, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	50 %	Belum tersedianya data dari aplikasi yang akan dijadikan bahan profil	Menyediakan data
			(3) Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah rumah data di kampung KB, dengan target 1 rumah data	1 rumah data	95 %		
			(4) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah data dan tenaga pengelola data di kota Parepare, dengan target 100 orang	100 orang	100 %		
			(5) Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Terlaksananya orientasi sistem informasi keluarga, dengan target 40 orang pada 4 kecamatan	40 orang	100 %		
			2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Alokasi anggaran sebesar Rp.2.701.257.644,- dengan realisasi Rp.1.610.708.960,- atau 59,63 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Jumlah pembinaan Keluarga Berencana, dengan target 4 kecamatan	4 kecamatan	100 %		
			a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan advokasi KIE, dengan target 4 kecamatan	4 kecamatan	98 %		
			(1) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah media KIIE, dengan target 5 media KIE	4 media KIE	80 %	Terdapat item yang tidak bisa terbelanjakan (DAK Fisik)	Meningkatkan koordinasi dengan kementerian teknis

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik, serta Media Luar Ruang (BOKB DAK NON FISIK)	Jumlah kecamatan yang dilaksanakan pemutaran film KKBPK, dengan target 4 kecamatan	4 kecamatan	100 %		
			b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang diperdayakan, dengan target 20 PKB	20 PKB	100 %		
			(1) Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah kader yang melaksanakan pembinaan dilini lapangan, dengan target 202 kader	202 kader	100 %		
			(2) Penyediaan Sarana Pendukung Oprasional PKB/PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB, dengan target 4 balai	4 balai	100 %		
			(3) Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader pengelola program KB yang menerima, dengan target 202 kader	202 kader	100 %		
			c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi, serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Jumlah klinik yang di distribusikan alat kontrasepsi, dengan target 12 fasilitas kesehatan	12 fasilitas kesehatan	93,42 %		
			(1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.	Jumlah faskes yang memperoleh distribusi alokon dan sarana penunjang pelayanan KB, dengan target 12 faskes	12 faskes	100 %		
			(2) Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi, serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	- Jumlah petugas pengelola logistik alokon, dengan target 3 orang - Jumlah pengerakan untuk pelayanan KB, dengan target 20 akseptor MOP	3 orang 6 akseptor MOP	65 %	Minat calon akseptor MOP yang minim	Mengopti- malkan sosialisasi
			(3) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Jumlah peserta KB baru yang mengikuti orientasi metode kontrsepsi jangka panjang, dengan target 40 orang	40 orang	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	Jumlah pelayanan terpadu dengan posyandu, dengan target 22 posyandu	22 posyandu	100 %		
			(5) Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Peningkatan peserta KB pria, dengan target 100 orang	100 orang	100 %		
			(6) Dukungan Oprasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah pelayanan KB keliling, dengan target 300 orang	300 orang	100 %		
			(7) Peningkatan Kesertaan KB Pria	Masyarakat yang mendapatkan pelayanan KB, dengan target 90 oran	80 orang	89 %		
			d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran, serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah poktan yang ikut serta dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, dengan target 81 kelompok	81 kelompok	82,50 %		
			(1) Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah layanan akseptor dan pemakaian alat kontrasepsi, dengan target 850 orang	552 orang	65 %	Layanan belum optimal disebabkan Pandemi Covid-19	Memberikan layanan dengan penerapan protokol kesehatan
			(2) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (BOKB DAK NON FISIK)	Jumlah kampung KB yang memperoleh operasional kegiatan, dengan target 5 kampung KB	5 kampung KB	100 %		
			4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Alokasi anggaran sebesar Rp.229.651.100,- dengan realisasi Rp.198.770.084,- atau 86,55 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan kelompok kegiatan ber-KB, dengan target 4 kecamatan	4 kecamatan	100 %		
			a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan ber-KB, dengan target 22 kelurahan	22 kelurahan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Pembentukan Kelompok dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kelompok Bina Keluarga Remaja, Tribina dan UPPKS, Peserta Orientasi Pik Remaja dengan target 40 kelompok	40 kelompok	100 %		
			(2) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolah Ketahanan dan Kesejatraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta orientasi PIK Remaja, dengan target 3 orang	3 orang	100 %		
			(3) Promosi atau Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan, serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah forum generasi berencana, dengan target 1 orang - Jumlah peserta pemilihan duta generasi berencana Tingkat Kota Parepare, dengan target 60 orang - Jumlah <i>stakeholder</i> pengelola program KB yang mengikuti harganas dan rakerda, dengan target 110 orang 	1 orang 60 orang 110 orang	100 % 100 % 100 %		
			(4) Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah peserta pelatihan pendidik dan konselor sebaya sosialisasi bahaya narkoba dan HIV AIDS bagi remaja, dengan target 40 orang	40 orang	100 %		
			(5) Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah lomba kelompok masyarakat yang berprestasi, dengan target 16 lomba	16 lomba	100 %		
			(6) Sosialisasi IPK	Jumlah peserta penyuluhan pendewasaan perkawinan, dengan target 40 orang	40 orang	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB, dengan target 100 %	76,67 %	71 %		
			(1) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan Dan Kesetaraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta Kemah Bakti Pramuka Saka Kencana bagi remaja, dengan target 100 orang	100 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah BKB yang mengikuti temu kader, dengan target 40 orang	40 orang	100 %		
			(3) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta Jambore PIK Remaja, dengan target 80 orang	10 orang	12 %	Tidak optimal disebabkan Pandemi Covid-19	Dilaksanakan tahun selanjutnya dengan penerapan protokol kesehatan
9.	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN	1) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.4.044.275.300 dengan realisasi Rp.3.983.926.432,- atau 98,51 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan hasil pelaporan capaian kinerja, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah,	100 %	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				dengan target 100 %				
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen renstra/renja, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA – SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD, dengan target 4 dokumen	4 dokumen	100 %		
			(3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJP, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja dan pengarusutamaan gender, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan, dengan target 60 orang	60 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan dan pembayaran premi BPJS ketenagakerjaan, dengan target 294 jasa dan 61 premi	294 jasa, 61 premi	100 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah dokumen laporan akuntansi dan keuangan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan dan semesteran sebanyak 14 dokumen	14 dokumen	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pelatihan, dengan target 3 orang	3 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah bahan komponen instalasi listrik / penerangan, dengan target 114 bahan	114 bahan	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor, dengan target 10 bahan	10 bahan	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan, dengan target 5 jenis bahan dan 5.470 penggandaan	5 jenis, 5.470 penggandaan	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah media cetak yang menjadi bahan bacaan, dengan target 230 tagihan	230 tagihan	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan / Material	Jumlah alat tulis kantor, dengan target 35 jenis	35 jenis	100 %		
			(6) Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah nasi dos dan snack, dengan target 1.000 dos	1.000 dos	100 %		
			(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan target 40 kali	40 kali	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas, dengan target 3 unit	3 unit	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah persuratan, dengan target 1.331 surat	1.331 surat	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, air dan telpon, dengan target 84 tagihan	84 tagihan	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor, dengan target 60 jasa	60 jasa	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah pembayaran pajak tahunan STNK pemeliharaan dan biaya BBM kendaraan operasional, dengan target 10 unit	10 unit	100 %		
			(2) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor, dengan target 2 unit	2 unit	100 %		
			(3) Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor, dengan target 25 unit	25 unit	100 %		
			2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Alokasi anggaran sebesar Rp.1.060.810.000,- dengan realisasi Rp.1.054.482.200,- atau 99,40 % yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan hasil pelaporan capaian kinerja, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang, dengan target 48 unit	48 unit	100 %		
			(2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah rambu, trafik dan marka yang terpelihara, dengan target 50 unit	50 unit	100 %		
			b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase pengelolaan terminal penumpang Tipe C, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Terminal Tipe C	Jumlah jasa transport pengelola terminal Tipe C, dengan target 25 orang	25 orang	100 %		
			c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah jasa pemungut retribusi parkir, dengan target 20 orang	20 orang	100 %		
			d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian berkala kendaraan bermotor, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Jumlah paket sistem dan alat PKB (BLU) bukti lulus uji, meliputi <i>hardware</i> dan <i>software</i> sebanyak 1 paket sistem	1 paket sistem	100 %		
			(2) Peningkatan Kapasitas sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah jasa pemungut retribusi PKB, dengan target 10 orang	10 orang	100 %		
			(3) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji yang diadakan, dengan target 1.000 buah	1.000 buah	100 %		
			(4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian yang terpelihara, dengan target 5 unit	5 unit	100 %		
			e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum yang terselenggara, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			f. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil andalalin	Jumlah rekomendasi analisis dampak lalu lintas yang dikeluarkan, dengan target 20 rekomendasi	20 rekomendasi	100 %		
			g. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah jasa tenaga Brigade Motor (BM), dengan target 264 jasa	264 jasa	100 %		
			h. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 daerah kabupaten/kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jasa tenaga tim pendataan, dengan target 6 orang	6 orang	100 %		
10.	Komunikasi & Informatika	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Alokasi anggaran sebesar Rp.3.396.912.500,- dengan realisasi Rp.3.268.363.645,- atau 96,22 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah yang disusun, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun dengan target sebanyak 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP, perjanjian kinerja, rencana aksi SKPD yang disusun, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan, dengan target 5 laporan	5 laporan	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan, dengan target 33 orang	32 orang	96,97 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, dengan target 12 kali	12 kali	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun, dengan	1 laporan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			SKPD	target 1 laporan				
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD yang disusun, dengan target 12 laporan	12 laporan	100 %		
			c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah, dengan target 12 laporan	12 laporan	100 %		
			(1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah, dengan target 12 laporan	12 laporan	100 %		
			d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan target 2 laporan	2 laporan	100 %		
			(1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawai yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, dengan target 12 kali	12 kali	100 %		
			(3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal, dengan target 10 orang	17 orang	170%		
			e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu terlaksananya administrasi umum perangkat daerah, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor Kominfo dan Studio TV dan Radio Peduli yang disediakan, dengan target 211 bahan	211 bahan	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan, dengan target 484 bahan	484 bahan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan, dengan target 20.000 lembar	20.000 lembar	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, dengan target 144 eksemplar	116 eksemplar	80,55 %		
			(5) Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/ material yang disediakan, dengan target 630 bahan	850 bahan	134,92 %		
			(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan jumlah penyediaan makanan dan minum rapat, dengan target 40 kali	69 kali	172,5 %		
			f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan, dengan target 40 unit	50 unit	125 %		
			(1) Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan, dengan target 25 unit	30 unit	120 %		
			(2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan, dengan target 15 unit	20 unit	100 %		
			g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target 12 Bulan	12 bulan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, dengan target 850 surat	1.038 surat	122 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor (tenaga administrasi, tenaga kebersihan, tenaga	12 bulan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				keamanan kantor, Premi BPJS Ketenagakerjaan), dengan target 12 bulan				
			h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Waktu penyediaan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(3) Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala, dengan target 10 unit	17 unit	170 %		
			(4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala, dengan target 45 unit	85 unit	188 %		
			(5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhab, dengan target 3 unit	3 unit	100 %		
			2) PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Alokasi anggaran sebesar Rp.9.089.418.500,- dengan realisasi Rp.8.125.579.334,- atau 89,40 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan target 100 %	98,07 %	98,07 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan target 100 %	98,07 %	98,07 %		
			(1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	- Jumlah koordinasi informasi dan komunikasi publik, dengan target 10 kali - Jumlah naskah sambutan, dengan target 570 naskah	15 kali 466 naskah	115,88 %		
			(2) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah monitoring opini dan aspirasi publik, dengan target 30 kali	45 kali	150 %		
			(3) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas	Jumlah analisis isu Kota Parepare, dengan target 1.786	1.786	100 %		
			(4) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jasa pengelolaan konten, dengan target 96 jasa	96 jasa	100 %		
			(5) Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pengelolaan media komunikasi publik, dengan target 3.637 berita	3.960 berita	108,88 %		
			(6) Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pelayanan informasi publik, dengan target 490 kali	574 kali	117,14 %		
			(7) Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama media, dengan target 49 media	49 media	100 %		
			(8) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah koordinasi dengan mitra, dengan target 4 kali	4 kali	100 %		
			(9) Manajemen Komunikasi Krisis	- Jumlah aduan Sp4an Lapor, dengan target 320 aduan - Jumlah konferensi pers, dengan target 4 kali - Jumlah website Humas yang dikelola, dengan target 1 website	21 aduan 2 kali 1 website	52,18 %		
			(10) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM yang mendapat bimbingan, dengan target 30 orang	30 orang	100 %		
			(11) Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah uji konsekuensi DIDP, dengan target 16 kali	8 kali	50 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(12) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah informasi masyarakat melalui KIM, dengan target 1.400 berita - Jumlah interaktif antara masyarakat dengan Pemerintah Kota dalam menyampaikan aspirasi pembangunan, dengan target 9 kali 	242 berita	47,54%		
			(13) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik target sebanyak 9 unit	12 unit	133,33 %		
			3) PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Alokasi anggaran sebesar Rp.3.174.852.700,- dengan realisasi Rp.3.095.191.617,- atau 97,49 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pengelolaan aplikasi informatika, dengan target 100 %	112,43 %	112,43 %		
			a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi dengan akses internet, dengan target 100 %	126 %	126 %		
			(1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah hotspot di Parepare, dengan target 190 titik hotspot	240 titik	126 %		
			b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan pengelolaan <i>e-government</i> terintegrasi, dengan target 100 %	98,85 %	98,85 %		
			(1) Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring evaluasi dan konsultasi pemanfaatan TIK, dengan target sebanyak 33 SKPD	25 SKPD	75,76 %		
			(2) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data Kota Parepare, dengan target 1 pusat data	1 pusat data	100 %		
			(3) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, dengan target 1 <i>e-mail</i>	1 <i>e-mail</i>	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4) Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik, dengan target 10 kali	10 kali	100 %		
			(5) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah pelatihan IT dan <i>e-commerce</i> , dengan target 2 kali	2 kali	100 %		
			(6) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah portal web <i>pareparekota.go.id</i> , dengan target 1 portal	1 portal	100 %		
			(7) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah subdomain dan layanan aplikasi <i>smart city</i> dan jumlah layanan aduan masyarakat secara elektronik, dengan target 4 subdomain/ aplikasi	4 subdomain	100 %		
			(8) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring menara BTS, dengan target 390 kali	450 kali	115 %		
11.	Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	DINAS TENAGA KERJA	1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dengan realisasi Rp.20.257.500,- atau 81,03 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Terciptanya koperasi yang patuh dan sehat, dengan target 98,65 %	43,55 %	41,15 %		
			a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam, dengan target 30 koperasi	30 koperasi	100 %		
			(1) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya koperasi yang diawasi, dengan target 35 koperasi	35 koperasi	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi Rp.47.121.00,- atau 94,24 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Terciptanya koperasi yang berkualitas, dengan target 95 %	60,48 %	63,66 %		
			a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi simpan/ pinjam yang dinilai dan mendapat penghargaan, dengan target 75 KSP/USP	75 KSP/USP	100 %		
			(1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penilaian KSP/USP, dengan target 75 KSP/USP	75 KSP/USP	100 %		
			3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Alokasi anggaran sebesar Rp.390.303.600,- dengan realisasi Rp.389.399.200,- atau 94,24 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Terciptanya koperasi yang berkualitas, dengan target 95 %	24,19 %	25,46 %		
			a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian, dengan target 30 orang	125 orang	416 %		
			(1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian, serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya peningkatan kompetensi koperasi, dengan target 30 orang	30 orang	100 %		
			4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Alokasi anggaran sebesar Rp.390.303.600,- dengan realisasi Rp.389.399.200,- atau 94,24 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Terciptanya usaha mikro yang mendapatkan bantuan, dengan target 240 UMKM	84 Kelompok / UMKM	35 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pemberdayaan usaha mikro dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dengan target 84 UMKM	84 UMKM	100 %		
			(1) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksanannya pendataan UMKM dan rekonsiliasi data pagu wilayah, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(2) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksanannya pengembangan potensi usaha mikro dan penyelenggaraan promosi produk UKM, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(3) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksanannya pemberian bantuan kepada usaha mikro, dengan target 84 UMKM	84 UMKM	100 %		
12.	Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.3.870.200.750,- dengan realisasi Rp.3.594.236.351 atau 92,87 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran, dengan target 100 %	100 %	97,96 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja tahun 2021 dan perubahan renja 2021, dokumen renstra, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja tahun 2021 dan perubahan renja 2021, dokumen renstra, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dan penyusunan DPA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA, dengan target 1 dokumen SKPD	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev program, kegiatan dan sub kegiatan dan jumlah dokumen evaluasi PUG, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, dengan target 37 orang	37 orang	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, dengan target 37 orang	37 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dan administrasi keuangan, dengan target 271 Jasa	271 jasa	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian seragam petugas pelayanan, dengan target 8 orang	8 orang	100 %		
			(1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian seragam petugas pelayanan dengan target 8 orang	8 orang	100 %		
			(2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah validasi data pegawai per triwulan, dengan target 1 kegiatan	1 kegiatan	100 %		
			(3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pelaksanaan monev penilaian kinerja pegawai per triwulan, dengan target 1 kegiatan	1 kegiatan	100 %		
			(4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ASN, dengan target 3 orang	3 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangun kantor, dengan target 13 bahan	13 bahan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, dengan target 13 bahan	13 bahan	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor, dengan target 285 bahan	285 bahan	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan target 30 bahan	30 bahan	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor dengan target 144 eksemplar	144 eksemplar	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dan alat kebersihan dengan target 2 paket	2 paket	100 %		
			(6) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu dengan target 114 piecis	114 piecis	0.00 %		
			(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan jumlah makan dan minum rapat, dengan target 15 kali	15 kali	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dengan target 33 unit	33 unit	100 %		
			(1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dengan target 33 unit	33 unit	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat, dengan target 100 surat	100 surat	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat, dengan target 100 surat	100 surat	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan target 3 tagihan	3 tagihan	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium PTT, dengan target 18 premi	18 premi	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya biaya perizinan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan, dengan target 14 unit	14 unit	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya biaya perizinan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan, dengan target 14 unit	14 unit	100 %		
			(2) Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubilier kantor yang terpelihara, dengan target 10 unit	10 unit	100 %		
			(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara, dengan target 24 unit	24 unit	100 %		
			(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		
			(5) Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara, dengan target 3 unit	3 unit	100 %		
			2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Alokasi anggaran sebesar Rp.69.350.000,- dengan realisasi Rp.67.958.000,- atau 97.99 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentasi Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota berskala nasional (PMDN/PMA) dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan pemberian fasilitas/ intensif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya penetapan pemberian fasilitas/ intensif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan Profil potensi dan rencana umum penanaman modal, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan Profil potensi dan rencana umum penanaman modal, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil potensi penanaman modal, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			3) Program Promosi Penanaman Modal Alokasi anggaran sebesar Rp.74.834.700,- dengan realisasi Rp.74.302.700,- atau 99.29 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDM/PMA), dengan target Rp.173 milyar	Rp.173 milyar	100 %		
			a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Terlaksana promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			4) Program Pelayanan Penanaman Modal Alokasi anggaran sebesar Rp.328.862.050,- dengan realisasi Rp.328.171.900,- atau 99.79 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tersedianya pelayanan perizinan dan non perizinan dengan perkuatan aplikasi, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, dengan target 7 dokumen	7 dokumen	100 %		
			(1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, dengan target 7 dokumen	7 dokumen	100 %		
			(2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pendaftaran perizinan dan non perizinan, dengan target 2.450 laporan	2.450 laporan	100 %		
			(3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen laporan pengaduan masyarakat, jumlah dokumen perizinan dan non perizinan, dengan target 28 laporan	28 laporan	100 %		
			5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Alokasi anggaran sebesar Rp.322.573.000,- dengan realisasi Rp.219.095.250,- atau 67.92 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA), dengan target 122 unit bisnis	122 unit bisnis	93.33 %		
			a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal, dengan target 1 laporan	1 laporan	93.33 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal, dengan target 1 laporan	1 laporan	90.00 %		
			(2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pengawasan penanaman modal, dengan target 1 laporan	1 laporan	90.00 %		
			6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Alokasi anggaran sebesar Rp.72.868.750,- dengan realisasi Rp.62.653.150,- atau 85.98 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase kualitas layanan sistem informasi penanaman modal, dengan target 100%	100 %	100 %		
			a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sistem manajemen pelayanan publik, laporan <i>upgrade</i> dan <i>maintenance</i> layanan perizinan, dengan target 4 dokumen	4 dokumen	100 %		
			(1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan sistem manajemen pelayanan publik, laporan <i>upgrade</i> dan <i>maintenance</i> layanan perizinan, dengan target 4 dokumen	4 dokumen	100 %		
13.	Kepemudaan & Olahraga	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA & PARIWISATA	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.4.003.735.250,- dengan realisasi Rp.3.567.852.932,- atau 89,11 persen, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, dengan target 100 %	98,24 %	98,24 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan target 10 dokumen	10 dokumen	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan target 3 dokumen (renstra, renja dan renja perubahan)	3 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA – SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan target 1 tahun	1 tahun	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan, dengan target 33 ASN	33 ASN	100 %		
			(2) Pelaksanaam Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan, dengan target selama 1 tahun	1 tahun	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pendidikan, dengan target 8 orang	8 orang	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, dengan target 8 orang	8 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan bahan administrasi umum, dengan target 7 sub kegiatan	7 sub kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik, dengan target 135 bahan	135 bahan	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia, dengan target 11 jenis	11 jenis	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan, dengan target 3 jenis	3 jenis	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan yang, dengan target 180 eksemplar	180 eksemplar	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan / Material	Jumlah bahan material yang tersedia dengan target 1.437 bahan	1.437 bahan	100 %		
			(6) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minuman tamu yang tersedia, dengan target 410 dos	410 dos	100 %		
			(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan, dengan target 80 kali - Jumlah makan minum rapat yang tersedia, dengan target 1.025 dos 	80 kali 1.025 dos	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan, dengan target 18 unit	17 unit	90 %		
			(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang milik daerah yang diadakan, dengan target 18 unit	17 unit	90 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 3 sub kegiatan	3 sub kegiatan	97,67 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dengan target 1.000 surat	1.000 surat	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan, dengan target 3 tagihan yaitu tagihan listrik, air dan internet selama 1 tahun	3 jenis tagihan	98 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga PTT dan premi asuransi, dengan target 22 orang	22 orang	95 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara, dengan target 42 unit	42 unit	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan dinas yang pajaknya terbayarkan dengan target 11 unit - Jumlah BBM yang tersedia dengan target 7.395 Liter	11 unit 7.395 liter	100 %		
			(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara, dengan target 29 unit	29 unit	100 %		
			(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor, dengan target 1 unit	1 gedung	100 %		
			2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Alokasi anggaran sebesar Rp.837.070.550,- dengan realisasi Rp.824.344.750,- atau 98,48 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Meningkatnya peran serta dan kapasitas pemuda dalam pembangunan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Terlaksananya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda dan pemuda kader kabupaten/kota, dengan target 6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	100 %		
			(1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	- Jumlah laporan hasil pendataan dan pemutakhiran data wirausaha pemuda, dengan target 1 dokumen - Jumlah peserta bimtek wirausaha pemuda, dengan target 30 peserta	1 dokumen 30 peserta	100 %		
			(2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Jumlah peserta temu koordinasi forum bina kepemudaan, dengan target 40 peserta	40 peserta	100 %		
			(3) Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda	Jumlah peserta pentas kreativitas pemuda yang terpilih, dengan	6 orang	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	target 6 orang				
			(4) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Oplementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten /Kota	Hibah pemuda selama 1 tahun, dengan target 4 lembaga pemuda	4 lembaga pemuda	100 %		
			(5) Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Jumlah peserta pemilihan pemuda pelopor yang terpilih, dengan target 5 orang	5 orang	100 %		
			(6) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta paskibraka, dengan target 70 orang	70 orang	100 %		
			b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, dengan target 30 peserta	30 orang	100 %		
			(1) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan organisasi, dengan target 30 orang	30 orang	100 %		
			3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Alokasi anggaran sebesar Rp.3.803.704.650,- dengan realisasi Rp.2.459.246.273,- atau 64,65 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Meningkatnya daya saing keolahragaan, dengan target 100 %	97 %	97 %		
			a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan, dengan target 6 paket pekerjaan	5 paket	85 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota	Jumlah rehab sarana dan prasarana yang dilakukan, dengan target 6 paket	5 paket	85 %		
			b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana, dengan target 2 turnamen	2 turnamen	100 %		
			(1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota	Terlaksananya turnamen, dengan target 1 turnamen tennis meja	1 turnamen	100 %		
			(2) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota	Terlaksananya turnamen dengan target 1 turnamen tinju	1 turnamen tinju	100 %		
			(3) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan, dengan target 10 orang	10 orang	100 %		
			c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data pembinaan dan pengembangan prestasi tingkat daerah provinsi, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah data dan informasi sektoral olahraga yang tersedia, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah dokumen pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga selama 1 tahun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(1) Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah dokumen hibah olahraga selama 1 tahun dengan target 1 dokumen laporan pelaksanaan kegiatan	1 dokumen	100 %		
			e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pengembangan sarana dan prasana olahraga rekreasi, dengan target 1 lapangan	1 lapangan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara, dengan target 1 lapangan	1 lapangan	100 %		
			4) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Alokasi anggaran sebesar Rp.179.999.400,- dengan realisasi Rp.174.856.475,- atau 97.14 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kepramukaan, dengan target 100 %	99,33 %	99,33 %		
			a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan, dengan target 3 sub kegiatan	3 sub kegiatan	99,33 %		
			(1) Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah peserta pembinaan saka pemuda pariwisata, dengan target 40 peserta	40 peserta	100 %		
			(2) Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Hibah pramuka selama 1 tahun	1 tahun	100 %		
			(3) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan dengan target 10 kali	10 kali	98 %		
14.	Statistik	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	1) PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Alokasi anggaran sebesar Rp.152.000.000,- dengan realisasi Rp.150.498.794,- atau 99,01 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral, dengan target 100%	100 %	100 %		
			a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Waktu penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten/ kota, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	- Jumlah buku data PDRB, dengan target 30 buku	20 buku	88,89 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah buku data pokok daerah, dengan target 80 buku - Jumlah dokumen data informasi yang terstruktur, dengan target 1 dokumen 	80 buku 1 dokumen			
			(2) Membangun Metadata Statistik Sektoral	Sinkronisasi data statistik sektoral, dengan target 6 kali	6 kali	100 %		
			(3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah anggota forum satu data, dengan target 33 perangkat daerah	33 perangkat daerah	100 %		
			(4) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah koordinasi statistik sektoral, dengan target 4 kali	3 kali	75 %		
15.	Persandian	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dengan realisasi Rp.58.890.919,- atau 98,15 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Waktu pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota, dengan target 12 bulan	100 %	100 %		
			(1) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat, kursus atau pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional sandiman, dengan target 2 orang	1 orang	50%		
			(2) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah koordinasi persandian yang dilaksanakan, dengan target 10 kali	10 kali	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kab/kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Waktu operasionalisasi jaring komunikasi sandi, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
16.	Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	1) Program Pengembangan Kebudayaan Alokasi anggaran sebesar Rp.180.000.000,- dengan realisasi Rp.176.500.000- atau 98,06 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang ada di daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan	Jumlah peserta pawai, dengan target 298 orang	298 orang	100 %		
			b. Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas seni yang terbina, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah komunitas budaya dan peserta orientasi, dengan target 74 orang	74 orang	100 %		
			2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional Alokasi anggaran sebesar Rp.70.000.000,- dengan realisasi Rp.69.550.000- atau 99,36 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Terwujudnya kegiatan festival seni dan budaya, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas seni yang terbina, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan, dengan target	40 orang	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Kesenian Tradisional	40 orang				
			(2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah komunitas seni yang mendapat bantuan alat, dengan target 18 kelompok	18 kelompok	100 %		
			3) Program Pembinaan Sejarah Alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dengan realisasi Rp.25.000.000- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Terciptanya kegiatan cagar budaya yang dilestarikan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pembinaan Sejarah Lokal Dalam Satu Daerah	Persentase ketersediaan dokumen sejarah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah peserta FGD, dengan target 20 orang	20 orang	100 %		
			4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Alokasi anggaran sebesar Rp.270.000.000,- dengan realisasi Rp.257.113.400- atau 95,23 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan	Terciptanya kegiatan cagar budaya yang dilestarikan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah cagar budaya yang dilestarikan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan, dengan target 1 cagar budaya	1 cagar budaya	100 %		
			b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah cagar budaya yang dilestarikan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi, dengan target 3 cagar budaya	3 cagar budaya	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			5) Program Pengelolaan Permuseuman Alokasi anggaran sebesar Rp.489.878.500,- dengan realisasi Rp.489.878.500- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:	Terciptanya kegiatan cagar budaya yang dilestarikan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang terpelihara, dengan target 20 koleksi	20 koleksi	100 %		
			(2) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara, dengan target 1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
17.	Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.1444.750.000,- dengan realisasi Rp.2.980.996.516,- atau 94,79 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang optimal, dengan target 100%	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya efektifitas sistem administrasi keuangan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya kegiatan, dengan target 32 orang ASN	32 ASN	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan jasa, dengan target 372 jasa	372 jasa	100 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen koordinaasi dan laporan keuangan SKPD, dengan target 14 dokumen	14 dokumen	100 %		
			(6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semakin meningkatnya kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pendididkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pelatihan, dengan target 4 orang pegawai	4 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semakin meningkatnya efektifitas dan efisiensi administrasi umum, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik, dengan target 363 bahan	363 bahan	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan target 312 bahan	312 bahan	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya bahan/material, dengan target 12 bahan	12 bahan	100 %		
			(6) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu, dengan target sebanyak 1 kali	1 kali	100 %		
			(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terseleenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan target 32 kali	32 kali	100 %		
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang semakin efisien, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat, dengan target 500 eksemplar	500 eksemplar	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan target sebanyak 3 rekening	3 rekening	100 %		
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya efektifitas pemeliharaan barang milik daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan, dengan target 9 STNK	9 STNK	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional, dengan target 9 unit	9 unit	100 %		
			(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin, dengan target 25 unit	25 unit	100 %		
			(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi, dengan target 2 gedung kantor	2 gedung	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Terlaksannya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan lainnya, dengan target 25 unit	25 unit	100 %		
			2) Program Pembinaan Perpustakaan Alokasi anggaran sebesar Rp.434.750.000,- dengan realisasi Rp.413.315.850,- atau 95,07 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan dan minat baca masyarakat, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya keterampilan pengelola perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya pembinaan perpustakaan tingkat pendidikan dasar, dengan target 25 sekolah	25 sekolah	100 %		
			(2) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan, dengan target 1 kegiatan	1 kegiatan	100 %		
			(3) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, dengan target 1.443 eksamplar	1.443 eksemplar	100 %		
			b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya minat baca masyarakat kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus, serta Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi budaya baca dan literasi, dengan target 40 orang	40 orang	100 %		
			(2) Pemberiaan Penghargaan Gerakan Budaya Membaca Massal	Memberikan penghargaan dalam kegiatan budaya membaca massal, dengan target 40 orang	40 orang	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Melakukan kegiatan literasi berbasis inklusi social, dengan target peserta 24 orang	24 orang	100 %		
			(4) Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pemilihan duta baca tingkat kota, dengan target 40 peserta	40 peserta	100 %		
18.	Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN	1) Program Pengelolaan Arsip Alokasi anggaran sebesar Rp.50.750.000,- dengan realisasi Rp.44.485.800,- atau 87,66 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Semakin meningkatnya pengelolaan arsip berbasis IT, dengan target 100%	100 %	100%		
			a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pengelolaan arsip dinamis yang semakin baik, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terlaksananya penciptaan dan penggunaan arsip dinamis, dengan target 33 SKPD	33 SKPD	100 %		
			b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Semakin profesionalnya pengelolaan arsip statis daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis, dengan target 11 SKPD	11 SKPD	100 %		
			c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Semakin meningkatnya layanan kearsipan berbasis IT, dengan target 100 %	100 %	50 %	Terdapat 1 sub kegiatan mengalami refocusing anggaran	Dianggarkan pada tahun anggaran selanjutnya
			(1) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan, dengan target peserta 40 orang	40 orang	100 %		

Tabel 3.3. Capaian Pelaksanaan Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
1.	Kelautan & Perikanan	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN & PERIKANAN	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.38.000.000,- dengan realisasi Rp.37.725.000,- atau 99,28 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya target kualitas dokumen urusan penunjang pemerintahan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya ketersediaan dokumen rencana dan evaluasi kinerja, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja rapat koordinasi, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja SKPD LPPD/ LKPD/ LAKjlp, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Alokasi anggaran sebesar Rp.1.535.148.000,- dengan realisasi Rp.1.528.483.100,- atau 87,84 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya target produksi perikanan tangkap, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya produksi perikanan tangkap, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data yang tersedia, dengan target 8 dokumen	8 dokumen	100 %		
			(2) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana yang diberikan, dengan target 7 paket dan 3 unit	7 paket, 3 unit	100 %		
			(3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap, dengan target 1.278 unit	1.278 buah	100 %		
			b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya pemberdayaan nelayan kecil, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok yang di bina, dengan target 25 kelompok	25 kelompok	100 %		
			(2) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah anggota pokmas pesisir yang menerima BPJS Ketenagakerjaan, dengan target 110 orang	110 orang	100 %		
			3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Alokasi anggaran sebesar Rp.285.724.000,- dengan realisasi Rp.281.361.400,- atau 109,39 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya target pengelolaan perikanan budidaya, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasinya, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi	Jumlah sampel yang diuji, dengan target 50 sampel	50 sampel	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing					
			b. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tercapainya pemberdayaan pembudidaya Ikan-ikan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang layak, dengan target 30 kelompok	30 kelompok	100 %		
			c. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tercapainya pengelolaan pembudidaya ikan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat budidaya, dengan target 25 Jenis	25 jenis	100 %		
			(2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih yang diserahkan, dengan target 1.000 ekor	1.000 ekor	100 %		
			(3) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang diuji, dengan target 200 sampel	200 sampel	100 %		
			(4) Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah sampel mutu air budidaya, dengan target 200 sampel	200 sampel	100 %		
			4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Alokasi anggaran sebesar Rp.46.985.000,- dengan realisasi Rp.46.984.165,- atau 78,31 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya produksi pengolahan hasil Perikanan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terpenuhinya penerbitan tanda usaha, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta yang ikut bimtek, dengan target 30 orang	30 orang	100 %		
			b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya peningkatan konsumsi ikan masyarakat, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti lomba, dengan target 138 orang	138 orang	100 %		
2.	Pariwisata	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA & PARIWISATA	1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Alokasi anggaran sebesar Rp.412.872.850,- dengan realisasi Rp.400.139.122,- atau 96,92 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pemandu wisata dengan target 40 kali - Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara dengan target 7 unit 	40 kali 7 unit	100 %		
			b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, dengan target 1 sub kegiatan	1 sub kegiatan	100 %		
			(1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah satgas pariwisata yang terpilih, dengan target 12 orang - Jumlah peserta duta pariwisata yang terpilih, dengan target 12 orang 	12 orang 12 orang	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			c. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersedia pada TDUP daerah kabupaten/kota, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(1) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah dokumen data pariwisata yang tersedia, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			2) Program Pemasaran Pariwisata Alokasi anggaran sebesar Rp.789.488.600,- dengan realisasi Rp.753.816.000,- atau 95,48 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Meningkatnya wisatawan yang berkunjung, dengan target 100 %	97,50 %	97,50 %		
			a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang dilaksanakan dengan target 2 sub kegiatan	2 sub kegiatan	97,50 %		
			(1) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah media promosi pariwisata yang digunakan, dengan target 3 Jenis - Jumlah website yang digunakan, dengan target 1 website 	3 jenis 1 website	100 %		
			(2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penjemputan tamu – tamu daerah, dengan target 11 kali - Jumlah lomba yang diperlombakan dalam event <i>Salo Karajae</i> dengan target 4 lomba - Jumlah event lokal mingguan yang dilakukan, dengan target 11 kali - Jumlah promosi budaya dilaksanakan, dengan target 1 kali 	20 kali 4 lomba 5 kali 1 kali	95 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi Rp.194.321.900,- atau 97,16 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota yang dikembangkan, dengan target 1 unit monumen	1 unit	100 %		
			(1) Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang direhab, dengan target 1 unit monumen	1 monumen	100 %		
			4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi Rp.29.724.000,- atau 99,08 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Meningkatnya sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dilaksanakan, dengan target 8 kali	8 kali	100 %		
			(1) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pertemuan dan koordinasi ke luar daerah, dengan target 7 kali	7 kali	100 %		
			(2) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pertemuan dan kordinasi <i>Parepare Creative Tourism Forum</i> , dengan target 1 kali pertemuan	1 kali	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
3.	Pertanian	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN & PERIKANAN	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.10.959.630.200,- dengan realisasi Rp.10.070.200.778,- atau 99,30 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya target kualitas dokumen urusan penunjang pemerintahan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya ketersediaan dokumen rencana dan evaluasi kinerja, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tahun 2020, perjanjian kinerja tahun 2021, dan rencana aksi 2021, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pelayanan dokumen administrasi keuangan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pelayanan gaji dan tunjangan ASN, dengan target 67 orang	67 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan, dengan target 70 orang	70 orang	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya kinerja pelayanan administrasi kepegawaian PD, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan ASN, dengan target 15 orang	15 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya jumlah alat dan bahan yang digunakan, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik kantor, dengan target 12 jenis	12 jenis	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik, dengan target 720 bahan	720 bahan	100 %		
			(3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan kantor, dengan target 15 jenis	15 jenis	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor, dengan target 35 jenis	35 jenis	100 %		
			(5) Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu, dengan target 257 dos	257 dos	100 %		
			(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat koordinasi, dengan target 775 dos	775 kali	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya kinerja jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengadaan dan Peralatan Lainnya	Jumlah pengadaan dan peralatan lainnya, dengan target 22 unit	22 unit	100 %		
			(2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor sebanyak, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat, dengan target 1.000 surat	1.000 surat	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa yang terbayar, dengan target 108 tagihan	108 tagihan	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor, dengan target 7 orang	7 orang	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya jumlah barang milik daerah yang dipelihara, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya, dengan target 43 unit	43 unit	100 %		
			(2) Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang diperbaiki, dengan target 20 unit	20 unit	100 %		
			(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC dan perlengkapan kantor, dengan target 10 unit	10 unit	100 %		
			(4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/ direhabilitasi, dengan target 5 unit	5 unit	100 %		
			2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Alokasi anggaran sebesar Rp.633.431.650,- dengan realisasi Rp.625.187.450,- atau 89,31 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya target penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Tercapainya pengawasan penggunaan sarana pertanian, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah tim KP3 dan tim penyusunan RDKK, dengan target sebanyak 35 orang	35 orang	100 %		
			b. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya penyediaan dan peredaran bibit ternak hasil inseminasi buatan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah sarana inseminasi buatan, dengan target 460 ekor	460 ekor	100 %		
			c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pengendalian dan pengawasan penyediaan hijauan pakan ternak, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah kelompok ternak yang terseleksi, dengan target 3 kelompok	3 Kelompok	100 %		
			d. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tercapainya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengadaan Benih Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten Kota/Lain	Jumlah ternak besar dan ternak kecil, dengan target 84 ekor	84 ekor	100 %		
			(2) Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit rumput vetiver, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Alokasi anggaran sebesar Rp.1.706.830.000,- dengan realisasi Rp.1.675.314.550,- atau 99,72 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya target pengembangan prasarana pertanian, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pengembangan Prasarana Pertanian	Tercapainya pengembangan prasarana pertanian, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Ranperda LP2B, dengan target 1 ranperda	1 dokumen	100 %		
			b. Pembangunan Prasarana Pertanian	Tercapainya target pembangunan prasarana pertanian, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah air irigasi tanah dalam, dengan target 3 unit	3 unit	100 %		
			(2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung, dengan target 2 unit	2 unit	100 %		
			(3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		
			(5) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan, serta sarana pendukungnya, dengan target 3 unit	3 unit	100 %		
			(6) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		
			4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Alokasi anggaran sebesar Rp.190.687.150,- dengan realisasi Rp.190.584.800,- atau 146,60 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya target pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pelayanan pencegahan penyakit ternak dan zoonosis, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	- Jumlah peserta sosialisasi, dengan target 60 orang - Jumlah sampel, dengan target 1.000 sampel	60 orang 1.000 sampel	100 %		
			b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pelayanan laboratorium kesehatan hewan dan jasa medik veteriner, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pelayanan jasa laboratorium kesehatan hewan, dengan target 204 jasa	204 jasa	100 %		
			c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terpenuhinya cakupan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pelayanan sampel yang diperiksa, dengan target 850 sampel	850 sampel	100 %		
			5) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Alokasi anggaran sebesar Rp.123.839.000,- dengan realisasi Rp.113.555.380,- atau 108,15 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya target pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terpenuhinya cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah ternak besar tertanggung asuransi, dengan target 500 ekor	500 ekor	100 %		
			(2) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah luas sawah petani yang diasuransikan, dengan target 1.083 Ha.	1.083 Ha.	100 %		
			6) Program Penyuluhan Pertanian Alokasi anggaran sebesar Rp.138.000.000,- dengan realisasi Rp.137.145.875,- atau 91,43 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya pelaksanaan penyuluhan pertanian, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terpenuhinya pelaksanaan penyuluh pertanian, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah koordinasi penyuluhan, dengan target 25 kali- Jumlah penyuluh swadaya dan penyuluh pertanian, dengan target 51 orang- Jumlah peserta pertemuan program penyuluhan, dengan target 110 orang	25 kali 51 orang 110 orang	100 % 100 % 100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang ter-update, dengan target 15 kelompok	15 kelompok	100 %		
4.	Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.4.173.270.100,- dengan realisasi Rp.3.887.741.337,- atau 93,16 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun, dengan target 11 dokumen	11 dokumen	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan revisi renstra SKPD, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP yang tersusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan PUG yang tersusun, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan SKPD, dengan target 2 layanan	2 layanan	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangannya, dengan target 40 orang	40 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN pengelola keuangan SKPD, dengan target 20 orang	20 orang	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian SKPD, dengan target 1 layanan	1 layanan	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat sesuai tupoksi, dengan target 12 orang	12 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum SKPD, dengan target 6 layanan	6 layanan	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bahan komponen listrik bangunan kantor, dengan target 72 bahan	72 bahan	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor, dengan target 1.268 bahan	1.268 bahan	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan, dengan target 13.770 bahan	13.770 bahan	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar dan majalah, dengan target 249 eksemplar	249 eksemplar	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan/Meterial	Jumlah alat tulis kantor dan bahan pembersih, dengan target 1.414 bahan	1.414 bahan	100 %		
			(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bahan rapat dan koordinasi/ konsultasi SKPD, dengan target 33 kali	33 kali	100 %		
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan SKPD, dengan target 3 layanan	3 layanan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, dengan target 800 surat	816 surat	102 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan yang terbayar, dengan target 120 rekening	120 rekening	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa honorarium PTT dan BPJS ketenagakerjaan, dengan target 1.422 jasa	1.422 jasa	100 %		
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah, dengan target 5 layanan	5 layanan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, suku cadang dan perizinan kendaraan dinas, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, suku cadang, perizinan kendaraan dinas dan BBM pejabat, dengan target 18 unit	18 unit	100 %		
			(3) Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara, dengan target 4 unit	4 unit	100 %		
			(4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara, dengan target 19 unit	19 unit	100 %		
			(5) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara, dengan target 1 unit	1 unit	100%		
			2) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi Rp.17.585.000,- atau 87,93 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan layanan perizinan dan pendaftaran perusahaan, dengan target 85 %	79 %	92,94 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi izin usaha perdagangan, dengan target 200 rekomendasi	158 rekomendasi	79 %		
			(1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang disurvei legalitas usahanya, dengan target 180 pelaku usaha	158 pelaku usaha	87,77 %		
			3) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Alokasi anggaran sebesar Rp.1.374.604.000,- dengan realisasi Rp.1.363.189.100,- atau 99,17 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pasar aktif, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi yang dibangun/ dikelola, dengan target 5 pasar	5 pasar	100 %		
			(1) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi yang dibangun/ revitalisasi, dengan target 1 pasar	1 pasar	100 %		
			(2) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi yang dikelola/terpelihara, dengan target 4 pasar	4 pasar	100 %		
			b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pasar sehat dan aman, dengan target 5 pasar	5 pasar	100 %		
			(1) Pembinaan Dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah profil sarana distribusi perdagangan, dengan target 1 profil	1 profil	100 %		
			4) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Alokasi anggaran sebesar Rp.781.675.000,- dengan realisasi Rp.748.654.000,- atau 95,78 persen yang dilaksanakan dalam	Koefisien harga antar waktu, dengan target <1	<1	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			bentuk kegiatan :					
			a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan pokok dan penting yang tersedia, dengan target 13 komoditi	13 komoditi	100 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	Jumlah pemantauan ketersediaan bapokting, dengan target 14 pemantauan	14 pemantauan	100 %		
			b. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan penting yang dikendalikan, dengan target 40 komoditi	40 komoditi	100 %		
			(1) Pemantauan Harga dan Stok Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan harga barang kebutuhan pokok, dengan target 240 hari	240 hari	100 %		
			(2) Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar, dengan target 6 kali	6 kali	100 %		
			c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk yang diawasi, dengan target 5 jenis	5 jenis	100 %		
			(1) Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pemantauan ketersediaan pupuk bersubsidi, dengan target 12 pemantauan	12 pemantauan	100 %		
			5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Alokasi anggaran sebesar Rp.85.000.000,- dengan realisasi Rp.84.477.700,- atau 99,39 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase alat UTP yang ditera dan tera ulang, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah layanan tera dan tera ulang, dengan target 1 layanan	1 layanan	100 %		
			(1) Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	jumlah alat UTP yang ditera, tera ulang, dengan target 2.000 UTP	1.988 UTP	99,40 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
5.	Perindustrian	DINAS PERDAGANGAN	1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Alokasi anggaran sebesar Rp.4.358.818.600,- dengan realisasi Rp.4.146.128.228,- atau 95,12 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pertumbuhan nilai investasi industri, dengan target 1,5%	1,39 %	92,66 %		
			a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah industri potensial, dengan target 2 industri	2 industri	100 %		
			(1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan, dengan target 70 orang	70 orang	100 %		
			(2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen data calon penerima manfaat, dengan target 1 dokumen - Jumlah laporan monitoring bantuan IKM, dengan target 4 laporan - Jumlah pelaksanaan pemberian bantuan melalui pagu sektoral 1 paket dan operasional pemberian bantuan 1 kegiatan 	1 dokumen 4 laporan 1 paket, 1 kegiatan	100 %		
			(3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah IKM yang menerima fasilitasi sertifikat produk halal, dengan target 3 IKM - Jumlah pemberian bantuan peralatan melalui pagu wilayah, dengan target 1 paket 	3 IKM 1 paket	100 %		
			2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dengan realisasi Rp.14.987.000,- atau 99,91 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase penerbitan perizinan industri, dengan target 85 %	85 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah rekomendasi izin usaha industri, dengan target 20 rekomendasi	19 rekomendasi	95 %		
			(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan monitoring izin industri, dengan target 12 monitoring	12 monitoring	100 %		
			3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dengan realisasi Rp.14.284.000,- atau 95,23 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase ketersediaan data IKM ter-update, dengan target 100%	100 %	100%		
			a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi industri kecil dan menengah, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(1) Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah dokumen data IKM yang terlapor ke SIINas, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

Tabel 3.4. Capaian Pelaksanaan Unsur Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
1.	Sekretariat Daerah	BAGIAN PEMERINTAHAN	1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Alokasi anggaran sebesar Rp.794.750.000,- dengan realisasi Rp.771.306.492,- atau 97,05 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Presentase kelurahan yang tertib administrasi, dengan target 100 %	99 %	99 %		
			a. Administrasi Tata Pemerintahan	Tertib administrasi pemerintahan, dengan target 100 %	99 %	99%		
			(1) Penataan Administrasi Pemerintahan	- Jumlah RT/RW untuk di bina, dengan target 571 RT/RW - Jumlah kordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan target 75 %	428 RT/RW 75 %	75 % 100 %		
			(2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	- Jumlah data profil kelurahan, dengan target 22 Kelurahan - Jumlah dokumen monografi kelurahan, dengan target 22 kelurahan - Jumlah lomba kelurahan tingkat Kota Parepare, dengan target 22 kelurahan - Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kelurahan, dengan target 22 kelurahan - Terarahnya batas wilayah administrasi Kota Parepare, dengan target 22 kelurahan	22 kelurahan 22 kelurahan 22 kelurahan 22 kelurahan 22 kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
			(3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- Jumlah dokumen LKPJ, LPPD dan RLPPD, dengan target 3 dokumen - Jumlah Laporan Perkembangan SPM terhadap pelayanan publik, dengan target 1 laporan - Koordinasi bidang pemerintahan,	3 dokumen 1 laporan 100 %	100 % 100 % 100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				dengan target 100 %				
			b. Fasilitas Kerjasama Daerah	Peningkatan jumlah kerjasama daerah, dengan target 100 %	99 %	99 %		
			(1) Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah iuran Apeksi dan asosiasi sekda, dengan target 3 kali	2 kali	99 %		
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.653.656.800- dengan realisasi Rp.3.461.300.117,- atau 94,74 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapaiannya kegiatan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi bidang kesejahteraan rakyat, dengan target 29 kali	29 kali	100 %		
			b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak yang mendapat pembinaan tilawah, dengan target 40 orang - Jumlah juara FASI tingkat kota yang dikirim ke FASI tingkat provinsi, dengan target 40 orang - Jumlah kontingen ke STQ tingkat provinsi, dengan target 35 orang - Jumlah pengelola Zakat, Infaq dan shadaqah yang mengikuti pelatihan, dengan target 120 orang - Jumlah penyelenggaraan bidang keagamaan (takbir keliling dan shalat hari raya), dengan target 2 Kali - Jumlah penyelenggaraan kegiatan keagamaan (Maulid dan 	40 orang 40 orang 35 orang 120 orang 2 kali 2 kali	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				Isra' Mi'raj), dengan target 2 kali - Jumlah penyelenggaraan zikir dan taushiyah, dengan target 40 kali - Jumlah pertemuan kordinasi bidang keagamaan target 20 kali - Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan lomba STQ, dengan target 40 orang - Terselenggaranya kegiatan keagamaan di bulan Suci Ramadhan (Nuzulul Qur'an), dengan target 200 orang - Terselenggaranya lomba bernuansa keagamaan bagi anak usia PAUD/KB, TK, SD, SMP & SMA, dengan target 150 orang - Terselenggaranya pembinaan Tahfidz Al- Qur'an, dengan target 25 orang - Belanja hibah kepada badan, lembaga ormas, dengan target 12 lembaga - Belanja modal alat kantor dan rumah tangga target 63 unit/ buah/ lusin - Belanja modal dan bangunan gedung kantor target 3 kali/paket	40 kali 20 kali 40 orang 200 orang 150 orang 25 orang - Masjid : 7 - Ormas : 4 - Gereja : 1 63 unit 3 paket	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
		BAGIAN HUKUM	1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.468.663.500,- dengan realisasi	Cakupan hasil laporan capaian kinerja, dengan target 100 %	93,35 %	99 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Rp.3.238.116.719,- atau 93,35 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :					
			a. Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi hukum, dengan target 15 laporan	15 laporan	100 %		
			(1) Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> – Jumlah dokumen asistensi dan harmonisasi terhadap produk hukum yang ditetapkan, dengan target 50 ranperda /ranperwa dan 1.200 SK. – Jumlah koordinasi bidang hukum, dengan target 25 laporan. – Jumlah penyelesaian rekomendasi izin/prinsip, dengan target 35 rekomendasi – Jumlah penyusunan perda, dengan target 2 ranperda – Jumlah Ranperda yang telah diharmonasi, dengan target 12 ranperda 	62 ranperda/ranperwa, 1.183 surat keputusan 25 laporan 35 rekomendasi 2 ranperda 10 ranperda	111 % 100 % 100 % 100 % 83 %		
			(2) Fasilitas Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> – Tercapainya koordinasi permasalahan hukum, dengan target 5 laporan – Jumlah masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah berkurang, dengan target 5 kasus – Jumlah tindak lanjut hasil temuan pengawas yang diproses beserta penerbitan keterangan bebas temuan, dengan target 50 tindak lanjut 	5 laporan 5 kasus 50 tindak lanjut	100 % 100 % 100 %		
			(3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> – Jumlah legislasi daerah, dengan target 12 ranperda – Jumlah penginputan dan 	10 ranperda 10	83 % 100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				publikasi informasi hukum, dengan target 10 perda & 50 perwa – Jumlah penyuluhan hukum, dengan target 8 kali	perda, 50 perwa 8 kali	100 %		
		BAGIAN PEREKONOMIAN & SUMBER DAYA ALAM	1) Program Perekonomian dan Pembangunan. Alokasi anggaran sebesar Rp.812.600.000,- dengan realisasi Rp.697.147.245,- atau 88,81 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan dan pertemuan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang dihasilkan, dengan target 7 kali dan 2 laporan	9 pertemuan/ laporan	100 %		
			(1) Sub Kegiatan Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah koordinasi dan fasilitasi Bidang BUMD, BLUD dan UMKM, dengan target 7 kali pertemuan	7 kali	100 %		
			(2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan yang dihasilkan Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan target 2 laporan	2 laporan	100 %		
			b. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah sosialisasi, dengan target 2 kali pertemuan	2 kali	100 %		
			(1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Sosialisasi Bidang Energi dan Air dengan target 2 kali pertemuan	2 kali	100 %		
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1) Program Perekonomian dan Pembangunan Alokasi anggaran sebesar Rp.316.930.000 dengan realisasi Rp.295.522.830,- atau 93,25 persen yang dilaksanakan dalam	Peningkatan dan penguatan perekonomian dan pembangunan, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			bentuk kegiatan :					
			a. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase pelaksanaan administrasi pembangunan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah pelaporan, pembinaan administrasi dan penyusunan program yang dilakukan, dengan target 12 laporan	12 laporan	100 %		
			(2) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan yang ter-upload pada sistem Tepra dan rapat koordinasi yang dilaksanakan, dengan target 12 laporan	12 laporan	100 %		
			(3) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah rapat evaluasi monitoring dengan target 4 bulan	4 bulan	100 %		
			2) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.2.704.072.690,- dengan realisasi Rp.2.673.274.940,- atau 98,86 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Terciptanya penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terciptanya penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, dengan target 2 orang	2 orang	100 %		
			(2) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dengan target 1 kantor dan 3 rujab	1 kantor 3 rujab	100 %		
		BAGIAN PENGADAAN	1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran,	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
		BARANG/JASA	Alokasi anggaran sebesar Rp.291.199.600,- dengan realisasi Rp.270.063.000,- atau 92,74 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	dengan target 100 %				
			a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan, dengan target sebanyak : 1 buah kursi kerja pejabat, 3 unit AC <i>split</i> , 2 unit televisi, 2 <i>bracket</i> TV, 1 <i>door lock</i> pintu, 1 unit <i>sound system</i> , 6 unit laptop, 1 Macbook, 1 unit komputer/PC, 1 buah <i>hardisk external</i> , 3 printer inkjet, 1 unit router server.	1 buah kursi kerja pejabat, 3 unit AC split, 2 unit televisi, 2 bracket TV, 1 door lock pintu, 1 unit sound system, 6 unit laptop, 1 Macbook, 1 unit komputer/PC, 1 buah hardisk external, 3 printer inkjet, 1 unit router server	100 %		
			2) Program Perekonomian dan Pembangunan Alokasi anggaran sebesar Rp.1.567.160.000,- dengan realisasi Rp1.496.978.930,- atau 95,52 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi pemerintahan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah paket yang dilelang melalui ULP, dengan target	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				100 %				
			(1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), dengan target 933 paket	894 paket	95,82 %		
			(2) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah sistem untuk penyediaan administrasi layanan pengadaan secara elektronik, dengan target 1 sistem	1 sistem	100 %		
			(3) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
		BAGIAN ORGANISASI	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.875.750.000,- dengan realisasi Rp.807.089.229,- atau 92,16 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Prosentase terciptanya pelayanan administrasi perkantoran, dengan target 100%	100 %	100 %		
			a. Penataan Organisasi	Prosentase terpenuhinya penataan organisasi, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja, dengan target 1 dokumen- Jumlah dokumen evaluasi jabatan, dengan target 1 dokumen- Jumlah dokumen hasil monitoring kelembagaan, dengan target 1 dokumen- Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 % 100 % 100 % 100 %		
			(2) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah dokumen peta proses bisnis dan laporan penyelenggaraan pendampingan	1 dokumen dan 1	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				penyusunan peta proses bisnis, dengan target 1 dokumen dan 1 laporan - Jumlah dokumen SOP-AP SKPD, dengan target 1 dokumen - Jumlah dokumen survei kepuasan masyarakat, dengan target 1 dokumen - Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar propinsi, dengan target 17 laporan - Jumlah unit pelayanan publik yang disurvei, dengan target 40 unit pelayanan publik - Jumlah peserta <i>Executive Training Hight Impact Public Speaking & Powerful Presentation</i> (Pelatihan Seni Berbicara/ Presentasi di Depan Umum secara Optimal), dengan target 40 orang	laporan 1 dokumen 1 dokumen 21 laporan 40 unit 35 orang	100 % 100 % 123,53 % 100 % 87,50 %		
			(3) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi road map reformasi birokrasi, dengan target 1 dokumen - Jumlah dokumen LHKPN, dengan target 1 dokumen - Jumlah dokumen pembinaan budaya kerja, dengan target 1 dokumen - Jumlah dokumen LKjIP dan tapkin Kota Parepare, dengan target 2 dokumen - Jumlah koordinasi pendampingan penyusunan LakipSKPD, dengan target 2 kali	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 kali	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah aplikasi E-Sakip, dengan target 1 aplikasi - Jumlah dokumen road map reformasi birokrasi, dengan target 1 dokumen - Jumlah peserta <i>Training Total Service Performance</i> (Pelatihan Kinerja Pelayanan Prima), dengan target 40 orang 	1 aplikasi 1 dokumen 40 orang	100 % 100 % 100 %		
		BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Alokasi anggaran sebesar Rp.24.617.805.765,- dengan realisasi Rp.22.044.921.633,- atau 89,55 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapaiannya kegiatan administrasi persuratan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah aparat dalam menjalankan tugas, dengan target 120 PNS	120 PNS	100 %		
			b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan target 100 %	90 %	90 %		
			(1) Pendataan dan Pengelola Administrasi Kepegawaian	Jumlah pelaksana tugas asisten dan staf ahli dengan target 4 dokumen	4 dokumen	100 %		
			(2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal dengan target 25 orang	22 orang	88 %		
			c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah, dengan target 100 %	97 %	97 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor disediakan dengan, target 2.612	2.612 buah	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				buah				
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan dan bahan pembersih kantor, dengan target 1.560 bahan	1.560 bahan	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pembuatan buku agenda tahun 2021, dengan target 250 buku - Jumlah spanduk dan umbul, dengan target 90 buah 	250 buku 90 buah	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, dengan target 3.168 eksemplar	3.168 eksemplar	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah alat tulis kantor, dengan target 500 buah	500 buah	100 %		
			(6) Fasilitasi Kunjungan Tamu	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelayanan tamu bukan pejabat negara, dengan target 1.850 kali - Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dengan target 540 kali 	1.850 kali 540 kali	100 % 100 %		
			(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perjalanan dinas luar daerah KDH/WKDH, dengan target 85 kali - Jumlah perjalanan dinas sekretariat bagian umum dengan target 735 kali 	85 kali 520 kali	100 % 71 %		
			d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor, rujab walikota, rujab wakil walikota, rujab sekda dan mess pemda, dengan target 458 unit	458 unit	100 %		
			(2) Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah pengadaan studio audio	25	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dan peralatan komputer, dengan target 25 unit	unit			
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat, dengan target 5.000 surat	5.000 surat	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telpon dan air dengan target 672 rekening	672 rekening	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jasa sewa sound dan mesin, dengan target 48 kali - Jumlah jasa sewa tenda, dengan target 172 petak - Jumlah jasa sewa kursi, dengan target 3.450 buah 	48 kali 172 petak 3.450 buah	100 %		
			(4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah administrasi persuratan dan sopir, dengan target 637 jasa - Jumlah peserta BPJS Ketenaga kerjaan, dengan target 96 orang - Jumlah jasa tenaga kebersihan, dengan target 336 jasa 	637 jasa 96 orang 336 jasa	100 %		
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, dengan target 100 %	92 %	92 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jaminan asuransi asset milik pemerintah Kota Parepare, mobil dinas walikota, wakil, dengan target 8 unit - Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional, dengan target 98 kendaraan - Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional + biaya BBM pejabat struktural, dengan target 140 unit 	8 unit 24 kendaraan 140 unit	100 % 24 % 100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeleur kantor, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pemeliharaan rutin rujab walikota, dengan target 1 unit - Jumlah pemeliharaan rutin rujab wakil walikota, dengan target 1 unit - Jumlah pemeliharaan rutin rujab sekda, dengan target 1 unit - Jumlah pemeliharaan rutin Mess Pemda Jakarta, dengan target 1 unit - Jumlah pemeliharaan taman kantor walikota, dengan target 1 paket 	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 paket	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
			(4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rekening PBB rujab, dengan target 10 unit - Jumlah jaminan asuransi aset milik daerah, dengan target 4 unit - Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki, dengan target 400 unit - Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor, dengan target 4 kegiatan - Jumlah pemeliharaan peralatan rujab walikota, wakil walikota dan rujab sekda, dengan target 3 rujab 	10 unit 4 unit 400 unit 4 kegiatan 3 rujab	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
			g. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran, dengan target 100%	50 %	50 %		
			(1) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan target	48 pasang	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				48 pasang				
			(2) Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pemeliharaan kesehatan walikota dan wakil walikota dengan target 2 orang	0 orang	0 %		
			h. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga kepala daerah dengan target 29.972 bahan	29.972 bahan	100 %		
			(2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan tangga kepala daerah dengan target 29.972 bahan	29.972 bahan	100 %		
			(3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah, dengan target 96 jasa	96 jasa	100 %		
			i. Fasilitas Keprotokoleran	Presentase penyelenggaraan keprotokoleran, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Fasilitas Keprotokolan	Jumlah jasa pelaksanaan protokoler dan komunikasi pimpinan, dengan target 408 jasa	408 jasa	100 %		
			b. Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah kebutuhan makan dan minum tamu protokol, dengan target 2.235 dos dan 200 orang prasmanan	2.235 dos, 200 orang	100 %		
			c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah plakat cendramata, dengan target 2 jenis - Jumlah publikasi dan dokumentasi berita, dengan target 450 berita 	2 jenis 450 berita	100 % 100 %		
		BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran sebesar	Cakupan hasil pelaporan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Rp.11.150.407.185,- dengan realisasi Rp.10.529.591481,- atau 94,43 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :					
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP dan perjanjian kinerja, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah, dengan target 1.575 Jasa	1.575 jasa	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terbayar gajinya, dengan target 120 orang	120 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan Setdako, dengan target 1.575 Jasa	1.575 jasa	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran	30 kali	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				SKPD, dengan target 30 kali - Jumlah penyusunan evaluasi renja, dengan target 1 dokumen	1 dokumen			
			(4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah penunjang administrasi keuangan, dengan target 71.210 bahan	71.210 bahan	100 %		
			c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa penomoran dan inventarisasi aset Setdako, dengan target 54 jasa	54 jasa	100 %		
			d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang disewa Sekretariat Daerah Kota, target 18 unit	18 unit	100 %		
			e. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terbayarkan gaji dan tunjangan, dengan target 2 orang	2 orang	100 %		
			(2) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan target 2 orang	2 orang	100 %		
2.	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Rp.38.166.695.890,- dengan realisasi Rp.35.144.500.889,42,- atau 92,08 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :					
			a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun, dengan target 13 dokumen	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen renja, perbahan renja dan perubahan renstra, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD, target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, perjanjian kinerja dan rencana aksi, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja SKPD yang disusun, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan SKPD, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah anggota DPRD dan ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan, dengan target 67 orang	67 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga administrasi dan penatausahaan yang dibayarkan dengan, target 810 jasa	810 jasa	100 %		
			(3) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen LKJip dan perjanjian kinerja SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data kepegawaian, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen data monev dan evaluasi kinerja, 12 dokumen	12 dokumen	100 %		
			(3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, dengan target 55 orang	55 orang	100 %		
			(4) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah perda yang disosialisasikan, dengan target 200 laporan	200 laporan	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah alat/bahan/makan dan minum, dengan target 100 %	99,29 %	99,29 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/bahan komponen instalasi listrik, dengan target 420 alat	420 alat	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat/bahan logistik kantor, dengan target 5.900 bahan	5.900 bahan	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak Dan Penggandaan, Dengan Target 23.148 lembar	23.148 lembar	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar dan majalah, dengan target 42.552 eksemplar	42.552 eksemplar	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bahan dan alat material, dengan target 1.421 bahan	1.421 bahan	100 %		
			(6) Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu, dengan target 170 kali	162 kali	95 %		
			(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat internal sekretariat DPRD, dengan target 20 kali	20 kali	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengadaan Mebel	Jumlah meubel kantor, dengan target 77 buah	77 buah	100 %		
			(2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pangadaan peralatan gedung kantor, dengan target 38 unit	38 unit	100 %		
			(3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor bangunan lainnya, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung gedung kantor, dengan target 112 unit	112 unit	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, dengan target 1.300 surat	1.300 surat	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan yang terbayar, dengan target 316 rekening	316 rekening	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa honorarium PTT, dengan target 107 jasa	107 jasa	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibayarkan pajak tahunan dan penggantian STNK, dengan target 28 unit - Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara, dengan target 28 kendaraan 	28 unit 28 unit	100 %		
			(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Jumlah peralatan gedung kantor	68	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Lainnya	dan rujab yang terpelihara, dengan target 68 unit - Jumlah perlatan rujab yang terpelihara, dengan target 39 unit	unit 39 unit			
			(3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung kantor yang direhab, dengan target 1 unit - Jumlah gedung kantor yang terpelihara, dengan target 1 unit - Jumlah rujab yang direhab, dengan target 1 unit - Jumlah rujab yang terpelihara, dengan target 3 rujab	1 unit 1 unit 1 unit 3 rujab	100 %		
			h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan	Cakupan pelayanan anggota DPRD, dengan target 100 %	87,50 %	87,50 %		
			(1) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD, dengan target 25 orang	25 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i>	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan <i>medical check up</i> dengan target 25 orang	4 orang	75 %		
			i. Layanan Administrasi DPRD	Cakupan pelayanan administrasi anggota DPRD, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan perjalanan dinas yang dilaksanakan, dengan target 1.320 kali	1.320 kali	100 %		
			(2) Penyediaan Kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi Rp.17.585.000,- atau 87,93 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase terlaksananya dukungan dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan target 100 %	99 %	99 %		
			a. Pembentukan Peraturan Daerah dan	Jumlah perda yang ditetapkan,	12	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Peraturan DPRD	dengan target 12 perda	perda			
			(1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	jumlah peserta pembentukan peraturan daerah, dengan target 720 peserta	720 peserta	100 %		
			(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah perda yang dibahas, dengan target 12 ranperda	12 ranperda	100 %		
			(3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan, dengan target 2 rekomendasi	2 rekomendasi	100 %		
			(4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik, dengan target 3 naskah akademik	3 naskah akademik	100 %		
			b. Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD, dengan target 160 laporan	160 laporan	100%		
			(1) Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan bimtek dengan target 135 laporan	135 laporan	100 %		
			(2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah media massa dan publikasi dewan, dengan target 20 media	20 media	100 %		
			(3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah pakar dan tim ahli, dengan target 4 orang	4 orang	100 %		
			(4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi, dengan target 6 orang	6 orang	100 %		
			(5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan <i>hearing</i> dengan target 60 orang	60 orang	100 %		
			(6) Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan program kerja, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			c. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, dengana target 100 %	98,33 %	98,33 %		
			(1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kunker dalam daerah, dengan target 36 laporan	35 laporan	95 %		
			(2) Penyusunan Pokok-pokok pikiran	Jumlah dokumen pokir dengan	1	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			DPRD	target 1 dokumen	dokumen			
			(3) Pelaksanaan Reses	Jumlah laporan reses, dengan target 75 laporan	75 laporan	100 %		

Tabel 3.5. Capaian Pelaksanaan Unsur Penunjang

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
1.	Perencanaan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.3.794.127.040,- dengan realisasi Rp.3.418.066.993,- atau 90,09 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja, dengan target 100% - Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan target 100% - Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa, dengan target 100% 	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang terselesaikan, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5). Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja instansi pemerintah, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(7). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja, dengan target 4 dokumen	4 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang akuntabel, dengan target 100%	100%	100 %		
			(1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangan, dengan target 35 orang	35 orang	100 %		
			(2). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan verifikasi Keuangan, dengan target 22 orang	22 orang	100 %		
			(3). Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang terselesaikan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang terselesaikan, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(5). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang terselesaikan, dengan target 18 dokumen	18 dokumen	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kemampuan SDM Pegawai melalui diklat formal, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapat bantuan diklat, dengan target 6 orang	6 orang	100 %		
			(2). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang dapat bantuan bimtek, dengan target 6 orang	6 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan perkantoran yang efisien, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bahan-bahan listrik, dengan target 16 jenis	16 jenis	100 %		
			(2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target 1 set	1 set	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(4). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar, dengan target 1.640 eksamplar	1.640 eksamplar	100 %		
			(6). Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah jasa kebersihan dan jumlah ATK, dengan target 24 jasa, 1 paket	24 jasa, 1 paket	100 %		
			(7). Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu Bappeda, dengan target 36 Kali	36 kali	100 %		
			(8). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi, dengan target 50 kali	50 kali	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya, dengan target 13 unit	13 unit	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bergungsinya seluruh peralatan kerja, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat, dengan target 690 eksamplar	1.717 eksamplar	248,84 %		
			(2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air, listrik, telepon, internet, dengan target 4 rekening	4 rekening	100 %		
			(3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT yang menerima jasa pelayanan umum, dengan target 18 orang	18 orang	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah penerima BBM, dengan target 20 orang - Jumlah pemeliharaan suku cadang kendaraan, dengan target 21 unit	20 orang 21 unit	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembaharuan perizinan dan pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan, dengan target 21 unit	21 unit	100 %		
			(3). Pemeliharaan Meubel	Jumlah meubel yang terpelihara, dengan target 17 unit	17 unit	100 %		
			(4). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja dan jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara, dengan target 52 Unit	52 unit	100 %		
			(5). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara, sebanyak 3 gedung	3 gedung	100 %		
			2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.1.700.590.800,- dengan realisasi Rp.1.428.319.520,- atau 83,99 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan yang termanfaatkan, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Jumlah laporan hasil sinkronisasi, dengan target 1 laporan - Jumlah perwali pagu indikatif, dengan target 1 perwali	1 laporan 1 perwali	100 %		
			(2). Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan forum skdp/lintas SKPD, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(3). Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4). Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rancangan perubahan RPJMD, Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, Ranhir	6 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Kabupaten/Kota	Perubahan RPJMD, Perda Perubahan RPJMD, Perubahan RKPD Tahun 2021, dan RKPD Tahun 2022, dengan target 6 dokumen				
			b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah laporan pengelolaan SIPD dan jumlah laporan pengelolaan website bappeda, dengan target 2 laporan	2 laporan	100 %		
			c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan DBH Pajak Rokok dan DBH CHT, dengan target 1 laporan - Jumlah laporan RAD TPB/SDG'S, dengan target 1 laporan - Jumlah laporan evaluasi RPJMD, dengan target 1 laporan - Jumlah laporan evaluasi SPM, dengan target 1 laporan 	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	100 %		
			(2). Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan APBD, serta laporan pengendalian dan evaluasi RKPD, dengan target 5 laporan	5 laporan	100 %		
			2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.2.379.449.100,- dengan realisasi Rp.2.120.279.600,- atau 89,11 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan	Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			:					
			a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan perencanaan bidang pemerintahan, sebanyak 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(2). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan, sebanyak 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(3). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan indeks kualitas hidup masyarakat, dengan target 1 laporan - Jumlah laporan DAK bidang sosial budaya, dengan target 1 laporan - Jumlah laporan data terpilah gender dan anak, dengan target 1 laporan - Jumlah Laporan gugus tugas kota layak anak, dengan target 1 laporan - Jumlah laporan hasil koordinasi bidang sosial budaya, dengan target 1 laporan - Jumlah laporan pengarusutamaan gender, dengan target 1 laporan - Jumlah laporan penyelenggaraan kota sehat, dengan target 1 laporan 	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Jumlah laporan hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan, dengan target 1 laporan - Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat, dengan target 1 laporan	2 laporan	100 %		
			b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen dan laporan bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA), dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(2). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(3). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan RTHKP, dengan target 1 dokumen - Jumlah laporan hasil koordinasi SDA dan LH, dengan target 1 laporan	2 laporan	100 %		
			(4). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan pengembangan kawasan pergudangan /RTHKP, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan, dengan target 100%	100 %	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah data base infrastruktur perkotaan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(2). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kawasan pergudangan (FS, Masterplan, DED, dengan target 3 dokumen - Jumlah laporan koordinasi kawasan perdagangan, dengan target 1 laporan - Jumlah laporan koordinasi perencanaan kawasan pengembangan industri kota parepare, dengan target 1 laporan 	2 dokumen 1 laporan 1 laporan	80 %		
			(3). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan koordinasi perencanaan pemanfaatan dan kewilayahan, dengan target 1 laporan - Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan praswil, dengan target 1 laporan - Jumlah laporan percepatan pembangunan sanitasi permukiman, dengan target 1 laporan 	1 laporan 1 laporan 1 laporan	100 %		
			(4). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil RTHKP, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	- Jumlah dokumen SPKP, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ranperwal RP3KP, dengan target 1 ranperwal - Jumlah laporan koordinasi Pokja PKP, dengan target 1 laporan - Jumlah laporan simpul jaringan informasi geospasial daerah, dengan target 1 laporan 	<div>1</div> <div>ranperwal</div> <div>1</div> <div>laporan</div> <div>1</div> <div>laporan</div>			
2.	Keuangan	BADAN KEUANGAN DAERAH	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.32.196.391.445,- dengan realisasi Rp.28.495.991.096,- atau 88,51 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan hasil sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu, dengan target 100%	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5). Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(7). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan PUG, dengan target 2	2 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				dokumen				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji ASN dan laporan keuangan SKPD, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan, dengan target 86 orang	86 orang	100 %		
			(2). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan, dengan target 2 jenis	2 jenis	100 %		
			(3). Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD, dengan target 33 SKPD	33 SKPD	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya persentase pegawai ASN yang mengikuti diklat, dengan target 100 persen	100 %	100 %		
			(1). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, dengan target 33 orang	33 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi SKPD, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik, dengan target 8 komponen	8 komponen	100 %		
			(2). Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor, dengan target 7 jenis	7 jenis	100 %		
			(3). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan, dengan target 55 jenis karcis/blanko dan 105.985	55 jenis 103.793	95 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				lembar <i>fotocopy</i>	lembar			
			(4). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, dengan target 8 surat kabar dan 1 majalah	8 surat kabar 1 majalah	100 %		
			(5). Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat kebersihan dan ATK, dengan target 11 jenis alat kebersihan dan 65 jenis ATK	11 jenis, 65 jenis	100 %		
			(6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi, dengan target 110 kali	119 kali	108 %		
			(7). Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pegawai pengelola, dengan target 13 orang	13 orang	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor, dengan target 37 unit	37 unit	100 %		
			(2). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor, dengan target 19 unit	19 unit	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintan Daerah	Persentase administrasi persuratan, jasa komunikasi listrik, air dan jasa/JKK pegawai tidak tetap, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, dengan target 1.000 surat	1.073 surat	107 %		
			(2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan yang terbayarkan, dengan target 4 jenis	4 jenis	100 %		
			(3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT yang menerima honor dan JKK, dengan target 105 orang	100 orang	95,24 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pengurusan STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas dan	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Daerah	gedung kantor, dengan target 100 %				
			(1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK dan jenis kendaraan yang terpelihara, dengan target 13 STNK dan 3 jenis kendaraan	13 STNK, 3 jenis	100 %		
			(2). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK dan jenis kendaraan yang terpelihara, dengan target 8 STNK dan 3 jenis kendaraan	8 STNK, 3 jenis	100 %		
			(3). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaran dinas yang disewa, dengan target 1 unit	1 unit	100 %		
			(4). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara, dengan target 3 gedung	3 gedung	100 %		
			2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.29.844.913.100,- dengan realisasi Rp.9.829.036.834,50,- atau 32,93 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya kegiatan penyusunan anggaran, pengelolaan perbendaharaan dan pelaporan keuangan daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase penyusunan anggaran daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2). Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(3). Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4). Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5). Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6). Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(7). Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah dokumen Perda dan Perwa tentang penjabaran APBD, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			tentang Penjabaran APBD					
			(8). Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen perubahan Perda dan Perwa tentang penjabaran APBD, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(9). Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah rencana anggaran yang terkoordinir, dengan target 4 laporan	4 laporan	100 %		
			b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah pelaporan harian kas daerah, dengan target 264 laporan	264 laporan	100 %		
			(2). Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana perimbangan dan Dana transfer Lainnya	Jumlah kementerian untuk koordinasi penyaluran dan pelaporan perimbangan, dengan target 1 kementerian	1 kementerian	100 %		
			(3). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan, dengan target 8 kali	8 kali	100 %		
			(4). Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan utang yang Timbul Akibat pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penetapan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen laporan, dengan target 6 jenis	6 jenis	100 %		
			(5). Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemetongan	Jumlah SKPD yang melaksanakan rekonsiliasise, dengan target 33 SKPD	33 SKPD	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			atas SP2D dengan Instansi Terkait					
			c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan rekonsiliasi, dengan target 33 SKPD	33 SKPD	100 %		
			(2). Koordinasi Penyusunan Lap. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Ranperwa tentang pelaksanaan APBD, dengan target 140 buku	140 buku	100 %		
			(3). Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Jumlah rancangan Perda pelaksanaan APBD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4). Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dengan target 33 SKPD	33 SKPD	100 %		
			d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran bantuan dan dana mendesak, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah alokasi dan penyaluran bantuan yang terlaksana, dengan target 1 jenis	1 jenis	100 %		
			(2). Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Jumlah dokumen dana darurat dan mendesak yang dikelola, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pembinaan sistem informasi pemerintah daerah, dengan target	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				100 %				
			(1). Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah laporan inventarisasi dan analisis data, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(2). Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi yang terpelihara, dengan target 1 aplikasi	1 aplikasi	100 %		
			(3). Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi, dengan target 1 aplikasi	1 aplikasi	100 %		
			3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.2.168.506.865,- dengan realisasi Rp.1.940.991.555,- atau 89,51 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapaiannya kegiatan pengelolaan barang milik daerah, dengan target 100 %	97,95 %	97,95 %		
			a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD, dengan target 100 %	97,95 %	97,95 %		
			(1). Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen hasil penyusunan standar satuan harga, dengan target 80 buku	80 buku	100 %		
			(2). Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan BMD, dengan target 33 dokumen	33 dokumen	100 %		
			(3). Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah jasa penatausahaan barang milik daerah, dengan target 222 jasa	222 jasa	100 %		
			(4). Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah jasa pencatat data BMD melalui penomoran, dengan target 114 jasa	114 jasa	100 %		
			(5). Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat tanah, dengan target 20 sertifikat	14 sertifikat	70,00 %		
			(6). Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah paket hasil penilaian barang milik daerah, dengan target 3 paket	2 paket	66,66 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(7). Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah jasa tim penafsir, penertiban, penghapusan dan penertiban BMD, dengan target 390 jasa	390 jasa	100 %		
			(8). Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah ketetapan status penggunaan BMD, dengan target 33 ketetapan	33 ketetapan	100 %		
			(9). Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi BMD, dengan target 3 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(10). Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(11). Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan gedung <i>Islamic Centre</i> , dengan target 100 kali	108 kali	108 %		
			4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.3.870.161.700,- dengan realisasi Rp.3.299.902.354,- atau 85,26 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Tercapainya kegiatan pendataan dan penagihan pajak dan retribusi daerah, dengan target 100 %	93,75 %	93,75 %		
			a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan, dengan target 100%	93,75 %	93,75 %		
			(1). Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah informasi pajak dan retribusi daerah yang disebarkan kepada masyarakat, dengan target 14 media cetak/ <i>online</i>	14 media cetak/ online	100 %		
			(2). Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah basis data pajak dan retribusi daerah yang termuktahirkan, dengan target 111 buku	111 buku	100 %		
			(3). Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah sistem informasi pajak dan retribusi daerah, dengan target 1	1 sistem	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				sistem				
			(4). Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah laporan monitoring sebanyak 12 laporan dan jumlah pengelola PAD yang melakukan rekonsiliasi, dengan target 13 SKPD	12 laporan, 13 SKPD	100 %		
			(5). Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditagih, dengan target 48.468 WP	47.856 WP	98,74 %		
			(6). Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah, dengan target 4 kegiatan	4 kegiatan	100 %		
			(7). Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan objek pajak dan retribusi daerah, dengan target 12 laporan	12 laporan	100 %		
			(8). Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pelaksanaan pembayaran perdana, pemberian reward dan uji petik, dengan target 3 kegiatan	2 kegiatan	66,66 %	Kegiatan uji petik tidak terlaksana karena pandemik Covid-19	Dilaksanakan pada tahun selanjutnya
3.	Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.6.140.537.100,- dengan realisasi Rp.3.940.728.763,- atau 64,17 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target 11 dokumen	11 dokumen	100 %		
			(1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4). Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen DPA-SKPD,	1	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Dokumen DPA-SKPD	dengan target 1 dokumen	dokumen			
			(5). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LKjIP, rencana aksi dan pengukuran kinerja, dengan target 3 laporan	3 laporan	100 %		
			(7). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan laporan pengarusutamaan gender, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang akuntabel, dengan target 4 dokumen	4 dokumen	100 %		
			(1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar gajinya, dengan target 41 orang	41 orang	100 %		
			(2). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang melaksanakan tugas administrasi, dengan target 44 orang/bulan	44 orang/bulan	100 %		
			(3). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana administrasi keuangan, dengan target 216 orang/bulan	216 orang/bulan	100 %		
			(4). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(5). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tahunan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani, dengan target 3.758 orang	3.654 orang	97,23 %		
			(1). Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah validasi dan rekonsiliasi data pegawai, dengan target 3.800 pegawai	3.654 pegawai	96,16 %		
			(2). Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pelaksanaan evaluasi monitoring kepegawaian, dengan target 12 kali	12 kali	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3). Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah purna tugas yang mendapatkan pembinaan, dengan target 30 orang	30 orang	100 %		
			(4). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta rakernis, dengan target 40 orang	40 orang	100 %		
			d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah alat dan bahan yang digunakan, dengan target 7 bahan	7 bahan	100 %		
			(1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/komponen/bahan-bahan listrik, dengan target 125 buah	125 buah	100 %		
			(2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target 3 paket	3 paket	100 %		
			(3). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat-alat/bahan kebersihan, dengan target 324 bahan	324 bahan	100 %		
			(4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor, dengan target 130 bahan	130 bahan	100 %		
			(5). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah <i>foto copy</i> dokumen dengan target 20.000 lembar	20.000 lembar	100 %		
			(6). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan /surat kabar dan majalah, dengan target 192 eksamplar	192 eksamplar	100 %		
			(7). Penyediaan Bahan Material	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(8). Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum tamu, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(9). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan target 85 kali - Jumlah makan dan minum rapat, dengan target 24 kali	85 kali 24 kali	100 % 100 %		
			e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 3 jasa	3 jasa	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, dengan target 3.200 surat	2.764 surat	86,38 %		
			(2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening pembayaran, dengan target 72 rekening	72 rekening	100 %		
			(3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pembayaran premi peserta keselamatan kerja, dengan target 84 premi - Jumlah PTT yang honoranya terbayar, dengan target 84 orang/bulan 	84 premi 84 orang/bulan	100 % 100 %		
			f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara, dengan target 35 unit	67 unit	191,43 %		
			(1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara, dengan target 1 unit - Jumlah bahan bakar minyak yang diberikan, dengan target 11.714 liter 	1 unit 8.170 liter	100 % 69,75 %		
			(2). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara, dengan target 14 unit - Jumlah bahan bakar minyak yang diberikan, dengan target 3.735 liter 	14 unit 2.094 liter	100 % 56,06 %		
			(3). Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang kantor yang terpelihara, dengan target 15 unit	15 unit	100 %		
			(4). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki, dengan target 36 unit	36 unit	100 %		
			(5). Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(6). Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	1 unit	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Kantor atau Bangunan Lainnya	lainnya, dengan target 1 unit				
			2) Program Kepegawaian Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.2.338.126.700,- dengan realisasi Rp.2.101.170.240,- atau 89,87 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, dengan target 3.75 % - Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, dengan target 34 jabatan - Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah, dengan target 1.598 jabatan - Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah, dengan target 2.079 orang - Persentase pelanggaran pegawai, dengan target 0,79 persen - Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II), dengan target 20,59 persen	0,66 % 34 jabatan 1.398 jabatan 2.228 orang 0,41 % 22,86 %	17,6 % 100 % 87,48 % 107,17 % 51,90 % 111,03 %		
			a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diangkat dan diberhentikan, dengan target 590 orang	410 orang	69,49 %		
			(1). Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen formasi, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(2). Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	- Jumlah usulan penetapan NIP CPNSD, dengan target 250 orang - Jumlah CPNSD yang melaksanakan sumpah janji, dengan target 250 orang - Jumlah pelamar CASN daerah, dengan target 250 orang	135 orang 135 orang 163 orang	54 % 54 % 65,2 %	- Formasi yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB hanya berjumlah 135 orang - Terdapat 7 formasi umum	- Mengusulkan kembali formasi jabatan yang belum terisi - Mengusulkan kembali formasi

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
							yang lowong dan tidak ada pendaftaranya	tersebut untuk dibuka pada seleksi penerimaan CPNS berikutnya
			(3). Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah berkas usulan taspen, pensiun, dan karis/karsu, dengan target 340 orang	275 orang	80,88 %		
			(4). Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelaksanaan porseni KORPRI, dengan target 1 kali - Jumlah pelaksanaan seminar, dengan target 2 kali - Jumlah fasilitasi konsultasi hukum bagi anggota Korpri, dengan target 12 kali 	- - 12 kali	- - 100 %	Tidak dilaksanakan karena pandemi Covid-19	HUT Korpri dilaksanakan melalui kegiatan lainnya
			(5). Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sistem Informasi yang tersedia, dengan target 1 sistem - Jumlah informasi data pegawai, dengan target 3.758 orang - Jumlah layanan kepegawaian, dengan target 4 layanan 	1 sistem 3.654 orang 4 layanan	100 % 97,23 % 100 %		
			(6). Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen daftar urut kepangkatan (DUK), dengan target 1 dokumen - Dokumen <i>bezetting</i> kepegawaian, dengan target 1 dokumen 	1 dokumen 1 dokumen	100 % 100 %		
			b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah PNS yang dimutasi dan dipromosi, dengan target 188 orang	399 orang	212,23 %		
			(1). Pengelolaan Mutasi ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penugasan/ penempatan/ pemindahan pegawai, dengan target 50 orang - Jumlah PNS yang dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kinerja/Baperjakat, 	78 orang 300 orang	156 % 300 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				dengan target 100 orang - Dokumen pemetaan ASN, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(2). Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	- Jumlah berkas KGB yang diproses, dengan target 500 orang - Jumlah berkas kenaikan pangkat yang diproses, dengan target 1.000 orang - Jumlah ASN yang menerima SK jabatan fungsional tertentu, dengan target 50 orang	1.567 orang 671 orang 397 orang	313,4 % 67,1 % 794 %		
			(3). Pengelolaan Promosi ASN	- Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama yang ikut seleksi terbuka, dengan target 33 orang - Dokumen pola pengembangan karir dan manajemen talenta, dengan target 2 dokumen	21 orang 2 dokumen	63,64 % 100 %	Kurangnya pendaftar yang mengikuti seleksi terbuka	Mengumumkan pelaksanaan seleksi terbuka secara luas melalui website, media cetak, media online dan media sosial
			c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya, dengan target 180 orang	1.055 orang	586, 11 %		
			(1). Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah PNS yang mengikuti <i>assesment</i> dalam jabatan, dengan target 431 orang	1.055 orang	244,78 %		
			(2). Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang tugas belajar dan ijin belajar, dengan target 2 orang	1 orang	50 %	PNS yang diusulkan mendapat bantuan tugas belajar dari Pemerintah Kota Parepare memilih mengambil beasiswa dari Kementerian	Memberikan bantuan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3). Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah kegiatan diklat yang dikordinasikan, dengan target 10 kali	10 kali	100 %		
			(4). Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah pejabat fungsional tertentu yang dipromosi, dengan target 50 pegawai	574 orang	1.148 %		
			d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang mendapatkan <i>reward</i> dan penghargaan, dengan target 123 orang	505 orang	410,57 %		
			(1). Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya, dengan target 3.758 orang	3.654 orang	97,23 %		
			(2). Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan, dengan target 15 orang	-	-	Indikator Penilaian pemberian penghargaan belum tertuang secara rinci dan jelas dalam Peraturan Walikota	Menyusun dan menerbitkan Peraturan Walikota tentang reward dan penghargaan
			(3). Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah PNS yang diusulkan memperoleh satya lencana karya satya, dengan target 300 orang - Jumlah prosesi pemakaman anggota Korpri (PNS lingkup Pemerintah Kota Parepare), dengan target 30 kali 	444 orang 61 orang	148 % 203,33 %		
			(4). Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dibina, dengan target 50 orang	40 orang	80 %		
			(5). Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus yang ditangani, dengan target 30 kasus	15 orang	50 %	Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berkurang	Melakukan sosialisasi tentang disiplin secara intens

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
4.	Pendidikan & Pelatihan	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Alokasi anggaran sebesar Rp.1.890.659.000,- dengan realisasi Rp.1.777.439.200,- atau 94,01 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	- Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, dengan target 45 JP - Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural, dengan target 2,67 %	27 JP 0,68 %	60 % 25,47 %		
			a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat, dengan target 170 orang	123 orang	72,35 %		
			(1). Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	- Jumlah regulasi, dengan target 1 regulasi - Dokumen analisis pengembangan kompetensi, dengan target 1 dokumen	1 regulasi 1 dokumen	100 % 100 %		
			(2). Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	- Jumlah peserta pelatihan manajemen kepegawaian, dengan target 40 orang - Jumlah peserta pelatihan penyusunan pengembangan kompetensi, dengan target 40 orang - Jumlah peserta pelatihan pengembangan kompetensi guru, dengan target 40 orang - Jumlah PNS yang dikirim diklat teknis, dengan target 10 orang	40 orang 40 orang 40 orang 3 orang	100 % 100 % 100 % 30 %	Anggaran untuk pemberian bantuan diklat di- <i>refocussing</i>	Melaksanakan pengembangan kompetensi melalui <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i>
			b. Kegiatan Sertifikat, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti diklat struktural dan fungsional, dengan target 200 orang	191 orang	95,5 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1). Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dilingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, dengan target 30 orang	30 orang	100 %		
			(2). Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan, dengan target 159 orang - Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan TK II, dengan target 5 orang - Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan TK III, dengan target 6 orang - Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan TK IV, dengan target 10 orang 	158 orang - 3 orang -	99,37 % - 50 % -	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran untuk pelaksanaan diklatpim II dan IV di-<i>refocussing</i> - Diklatpim IV tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan penyetaraan dalam jabatan fungsional 	Menganggarkan kembali anggaran untuk pelaksanaan Diklatpim Tk. II, III dan IV
5.	Penelitian dan Pengembangan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.708.118.650,- dengan realisasi Rp.669.961.855,- atau 94,61 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase implementasi rencana kelitbang, dengan target 100% - Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi, dengan target 100% 	100 % 100%	100 % 100%		
			a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, dengan target 1 rekomendasi	1 rekomendasi	100 %		
			(1). Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2). Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah surat rekomendasi izin penelitian yang diterbitkan, dengan target 650 surat rekomendasi	855 rekomendasi	131,54 %		
			b. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi, dengan target 33 SKPD	33 SKPD	100 %		
			(2). Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah peserta <i>Workshop Champion Inovasi</i> /lab inovasi, dengan target 35 orang	35 orang	100 %		

Tabel 3.6. Capaian Pelaksanaan Unsur Pengawasan

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
1.	Inspektorat Daerah	INSPEKTORAT DAERAH	1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.912.850.150,- dengan realisasi Rp.3.754.887.853,- atau 95,96 persen yang dilaksanakan dalm bentuk kegiatan :	<ul style="list-style-type: none">- Persentase pemenuhan administrasi perkantoran, dengan target 100 %- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, dengan target 100 %- Persentase aparat yang mendapatkan pelatihan kompetensi, dengan target 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA -SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5). Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP, rencana aksi dan perjanjian kinerja, dengan target 3 dokumen.	3 dokumen	100 %		
			(7). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan evaluasi renja dan laporan PUG, dengan target 4 dokumen	4 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pembayaran gaji dan honorarium administrasi keuangan, dengan target 100 %	100 %	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan, dengan target 45 ASN	45 ASN	100 %		
			(2). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, dengan target 246 jasa	246 jasa	100 %		
			(3). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran, dengan target 12 laporan	12 laporan	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan ASN, dengan target 45 dokumen	45 dokumen	100 %		
			(2). Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pelaksanaan monev penilaian kinerja pegawai, dengan target 12 kali	12 kali	100 %		
			(3). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, dengan target 45 orang	45 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan umum administrasi perangkat daerah dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, dengan target 7 item	7 item	100 %		
			(2). Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor, dengan target 8 item	8 item	100 %		
			(3). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan, dengan target 4 item	4 item	100 %		
			(4). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan target 12 jenis	12 jenis	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(5). Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya penyediaan bahan/material, dengan target 54 item	54 item	100 %		
			(6). Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu, dengan target 12 kali	12 kali	100 %		
			(7). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan target 100 kali	100 kali	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana & prasarana aparatur pemerintah daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan, dengan target 17 unit	17 unit	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang kegiatan perkantoran, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, dengan target 1.300 surat	1.300 surat	100 %		
			(2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran listrik, air, dan telepon, dengan target 36 tagihan	36 tagihan	100 %		
			(3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pembayaran premi BPJS PTT, dengan target 24 jasa.	24 jasa	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional, dengan target 11 unit	11	100 %		
			(2). Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara, dengan target 12 unit	12	100 %		
			(3). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara, dengan target 19 unit	19	100 %		
			(4). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara, dengan target 1 gedung	1 gedung	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			2). Program Penyelenggaraan Pengawasan. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.427.944.400,- dengan realisasi Rp.1.002.809.121,- atau 92,35 persen yang dilaksanakan dalm bentuk kegiatan :	- Persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, dengan target 67 % - Prosentase pencapaian rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan, dengan target 83 % - Level kapabilitas APIP, dengan target level 3 - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target 90%	67,85 % 84 % Level 3 100 %	100 % 101,20 100 % 111 %		
			a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang terbit, dengan target 97 laporan	97 laporan	100 %		
			(1). Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja, dengan target 69 laporan	69 laporan	100 %		
			(2). Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan, dengan target 21 laporan	21 laporan	100 %		
			(3). Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan reviu atas laporan kinerja, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(4). Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan reviu atas laporan keuangan, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(5). Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan kerjasama pengawasan, dengan target 4 laporan	4 laporan	100 %		
			(6). Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan target 24 laporan	24 laporan	100 %		
			(1). Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan target 24 laporan	24 laporan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			3). Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Alokasi anggaran sebesar Rp.263.050.300,- dengan realisasi Rp.217.839.935,- atau 82,81 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Presentase kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan, dengan target 14 dokumen	14 dokumen	100 %		
			(1). Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2). Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang disusun, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100 %		
			b. Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi dengan, target 18 dokumen	18 dokumen	100 %		
			(1). Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan penilaian RB, zona integritas, serta monitoring pencegahan korupsi, dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			(2). Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan target 12 laporan	12 dokumen	100 %		
			(3). Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pelaksanaan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas, dengan target 4 laporan	4 dokumen	100 %		

Tabel 3.7. Capaian Pelaksanaan Unsur Kewilayahan

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
1.	Kecamatan	KECAMATAN BACUKIKI	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.4.296.347.500,- dengan realisasi Rp.4.249.417.785,- atau 99,85 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Renja Pokok, Renja Perubahan dan Renstra), dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran RKA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran perubahan RKA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran DPA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran perubahan DPA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun (LKjIP, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja), dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (Dok Evaluasi Renja/Renstra SKPD, Lap. PUG SKPD), dengan target 2 dokumen	2 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan target 4 kegiatan	4 kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan, dengan target 44 orang	44 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun, dengan target 12 laporan	12 laporan	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan target 3 kegiatan	3 kegiatan	100 %		
			(1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(2) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal, dengan target 5 orang	5 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah, dengan target 6 kegiatan	6 kegiatan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan kantor kecamatan dan kelurahan yang disediakan, dengan target 870 bahan	870 bahan	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor kecamatan dan kelurahan yang disediakan, dengan target 2.041 bahan	2.041 bahan	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan kantor kecamatan dan kelurahan yang disediakan, dengan target 20.274 bahan	20.274 bahan	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, dengan target 288 eksemplar	288 eksemplar	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan / Material	Jumlah bahan/ material yang disediakan, dengan target 5.452 bahan	5.452 bahan	100 %		
			(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah target 40 kali	38 kali	95 %		
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan, dengan target 3 kegiatan	3 kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, dengan target 1.646 surat	1.646 surat	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang terbayar dengan target 228 tagihan	228 tagihan	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga administrasi, tenaga kebersihan, tenaga keamanan kantor, premi BPJS ketenagakerjaan yang dibayarkan	612 jasa 564 premi	100 % 100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				dengan target 612 jasa dan 564 premi				
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah, dengan target 4 kegiatan	4 kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah BBM untuk kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan target 14.940 liter - Jumlah BBM kendaraan dinas/ operasional (motor karampa), dengan target 309 liter - Jumlah kendaraan operasional yang dibayarkan pajak kendaraannya, dengan target 6 unit - Jumlah kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajak kendaraannya, dengan target 17 unit - Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas camat, dengan target 4 kali 	14.940 liter 309 liter 6 unit 17 unit 4 kali	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Waktu penyediaan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kecamatan dan kelurahan, dengan target 12 kali - Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 	12 bulan 6 kali	100 % 100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				gedung kantor kecamatan dan kelurahan, dengan target 6 kali				
			(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhab, dengan target 7 gedung	7 gedung	100 %		
			2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Alokasi anggaran sebesar Rp.120.250.000,- dengan realisasi Rp.120.250.000,- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, dengan target 4 kelurahan	100 %	100 %		
			a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dengan target 3 kegiatan	3 kegiatan	100 %		
			(1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<ul style="list-style-type: none"> – Jumlah laporan hasil musrenbang kecamatan, dengan target 1 laporan – Jumlah laporan hasil rapat koordinasi tingkat kecamatan, dengan target 4 laporan – Jumlah laporan hasil koordinasi lintas sektor, dengan target 4 laporan 	<div>1 laporan</div> <div>4 laporan</div> <div>4 laporan</div>	<div>100 %</div> <div>100 %</div> <div>100 %</div>		
			b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan target 1 kegiatan	1 kegiatan	100 %		
			(1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah tim intensifikasi penagihan PBB tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan target 50 orang	50 orang	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Alokasi anggaran sebesar Rp.1.420.118.000,- dengan realisasi Rp.1.416.305.050,- atau 99,73 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<ul style="list-style-type: none">– Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, dengan target 26 kelompok– Persentase PKK aktif, dengan target sebanyak 5 kelompok– Persentase posyandu aktif, dengan target sebanyak 38 posyandu	26 kelompok 5 kelompok 38 posyandu	100 % 100 % 100 %		
			a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none">– Jumlah bahan operasional untuk organisasi PKK dengan target 1.039 bahan– Jumlah laporan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dengan target 16 laporan– Jumlah kader PKK yang dilatih, dengan target 200 orang– Jumlah peserta dalam MTQ tingkat kecamatan, dengan target 20 orang– Jumlah peserta kegiatan Workshop Pengolahan Persampahan Tingkat Kecamatan, dengan target 30 orang	1.039 bahan 16 Laporan 200 orang 20 orang 30 orang	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		
			(2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none">– Jumlah laporan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RW/RT, dengan target 95 laporan– Jumlah laporan kader pemberdayaan masyarakat, dengan target 16 laporan	95 laporan 16 laporan	100 % 100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				– Jumlah pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan Imam Masjid, Pegawai Syara, Ketua RT dan RW, dengan target 3.840 premi	3.840 premi	100 %		
			4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Alokasi anggaran sebesar Rp.165.650.000,- dengan realisasi Rp.165.650.000,- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat, dengan target 100 %	100 %	100%		
			a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Jumlah laporan rupa-rupa kejadian, dengan target 48 laporan - Jumlah penanggulangan Covid-19, dengan target 8 laporan	48 laporan 8 laporan	100 %		
			(2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- Jumlah pelaksanaan dzikir dan tausiah, dengan target 4 kali - Jumlah laporan sosialisasi/edukasi pencegahan dan penanganan Covid-19, dengan target 8 laporan	4 kali 8 laporan	100 %		
		KECAMATAN BACUKIKI BARAT	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.6.380.834.850,- dengan realisasi Rp.5.898.210.715,- atau 92,44 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu, dengan target 100 %	100 %	98,54 %		
			a. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				yang dihasilkan, dengan target 12 dokumen				
			(1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran RKA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran Perubahan RKA-SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran DPA-SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5). Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran perubahan DPA-SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun, dengan target 3 laporan	3 laporan	100 %		
			(7). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun, dengan target 2 laporan	2 laporan	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah, dengan target 4 kegiatan	4 kegiatan	100 %		
			(1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan ASN, dengan target 55 orang	55 orang	100 %		
			(2). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(4). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ trwulanan/ semesteran SKPD yang disusun, dengan target 12 laporan	1 laporan	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan target 4 kegiatan	4 kegiatan	100 %		
			(1). Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, dengan target 55 orang	55 orang	100 %		
			(2). Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang melaksanakan penilaian kinerja, dengan target 55 orang	55 orang	100 %		
			(3). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal, dengan target 12 orang	12 orang	100 %		
			(4). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek, Implementasi Perundang-Undangan dengan target 20 orang	20 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah, dengan target 6 kegiatan	6 kegiatan	100 %		
			(1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan kantor, dengan target kantor kecamatan 144 bahan dan kantor kelurahan yang disediakan, dengan target 276 bahan	420 bahan	100 %		
			(2). Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor kecamatan, dengan target 764 bahan dan kantor kelurahan yang disediakan, dengan target 1.194 bahan	1.958 bahan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(3). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan kantor kecamatan dengan target 3.000 lembar dan kantor kelurahan yang disediakan, dengan target 24.360 lembar	27.360 bahan	100 %		
			(4). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, dengan target 372 eksampul	372 eksampul	100 %		
			(5). Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bahan/material yang disediakan, dengan target 5.480 bahan	5.480 bahan	100 %		
			(6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan target 53 laporan	53 laporan	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan, dengan target 2 kegiatan	2 kegiatan	100 %		
			(1). Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas yang diadakan, dengan target 2 unit	2 unit	100 %		
			(2). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor, dengan target 29 unit	29 unit	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan, dengan target 3 kegiatan	3 kegiatan	100 %		
			(1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat, dengan target selama 12 bulan	12 bulan	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan target selama 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan target selama 12 bulan	12 bulan	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah, dengan target 4 kegiatan	4 kegiatan	91,25 %		
			(1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan target selama 12 bulan	12 bulan	80 %		
			(2). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan target selama 12 bulan	12 bulan	85 %		
			(3). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dilaksanakan, dengan target 4 kali	4 kali	100 %		
			(4). Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung dan bangunan lainnya yang dilaksanakan, dengan target 8 unit	8 unit	100 %		
			2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Alokasi anggaran sebesar Rp.118.000.000,- dengan realisasi Rp.118.000.000,- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan pelaksanaan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa/kelurahan yang baik, dengan target 6 kelurahan	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dengan target 1 kegiatan	1 kegiatan	100 %		
			(1). Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan hasil musrenbang tingkat kecamatan dan jumlah laporan rapat koordinasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan, dengan target 11 laporan	11 laporan	100 %		
			3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Alokasi anggaran sebesar Rp.1.867.464.000,- dengan realisasi Rp.1.778.379.050,- atau 97.77 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<ul style="list-style-type: none"> - Rata- rata jumlah kelompok binaan PKK, dengan target 21 kelompok - Prosentase PKK aktif, dengan target 7 kelompok - Prosentase posyandu aktif, dengan target 28 posyandu 	<div>21 kelompok</div> <div>7 kelompok</div> <div>28 posyandu</div>	<div>100 %</div> <div>100 %</div> <div>100 %</div>		
			a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan, dengan target 5 lembaga	5 lembaga	100 %		
			(2). Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RW/RT, dengan target 132 laporan	132 laporan	100 %		
			4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Alokasi anggaran sebesar Rp.91.650.000,- dengan realisasi Rp.218.764.800,- atau 99.33 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Waktu pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan target selama 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(1). Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat dan jumlah laporan penanganan dan penanggulangan Covid-19, dengan target 56 laporan	56 laporan	100 %		
			(2). Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan dzikir dan tauziah Tingkat Kecamatan Bacukiki Barat, dengan target 3 kali	3 kali	100 %		
		KECAMATAN SOREANG	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.7.350.599.000,- dengan realisasi Rp.7.224.858.173,- atau 98,29 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan hasil penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja SKPD dan revisi renstra SKPD yang disusun, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun dengan, target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LkjIP, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja SKPD yang disusun, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pengarusutamaan gender SKPD yang disusun, dengan target 2 dokumen	1 dokumen	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan ASN, dengan target 65 orang	65 orang	100 %		
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan, dengan target 222 jasa	222 jasa	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran, dengan target 12 laporan	12 laporan	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat struktural/fungsional/Teknis dan pelatihan, dengan target 8 orang	8 orang	100 %		
			(2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis/kursus, dengan target 10 orang	10 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bahan Komponen instalasi listrik/penerangan kantor kecamatan dan kelurahan, dengan target 2.762 bahan	2.762 bahan	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor kecamatan dan kelurahan, dengan target 13.635 bahan	13.635 bahan	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan kantor kecamatan dan kelurahan, dengan target 53.446 lembar	53.446 lembar	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media cetak yang menjadi bahan bacaan, dengan target 4.284 eksampler	4.284 eksampler	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan alat tulis kantor dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor kecamatan dan kelurahan, dengan target 15.523 bahan	15.523 bahan	100 %		
			(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas untuk kantor kecamatan dan kelurahan dengan target 100 laporan	100 laporan	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas, dengan target 2 unit	2 unit	100 %		
			(2) Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubelair, dengan target 27 unit	27 unit	100 %		
			(3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target 12 unit	12 unit	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab dan dibangun, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar kecamatan dan kelurahan, dengan target 600 surat	600 surat	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telpon, air, listrik dan nternet yang terbayarkan, dengan target 360 rekening	360 rekening	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa PTT, tenaga administrasi, keamanan kantor, petugas kebersihan dan sopir, dengan target 672 jasa	672 jasa	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara, dengan target 21 unit	21 unit	100 %		
			(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja dan perlatan kantor yang terpelihara, dengan target 44 unit	44 unit	100 %		
			(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung yang terpelihara, dengan target 10 unit	10 unit	100 %		
			(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana komputer dan sarana lainnya, dengan target 89 unit	89 unit	100 %		
			2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Alokasi anggaran sebesar Rp.189.040.000,- dengan realisasi Rp.189.040.000,- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan hasil musrenbang dan rapat koordinasi, dengan target 7 laporan	7 laporan	100 %		
			(2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintah daerah yang dilimpahkan kepada camat, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah anggota tim intensifikasi PBB dalam urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan target 37 orang	37 orang	100 %		
			2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Alokasi anggaran sebesar Rp.2.069.077.500,- dengan realisasi Rp.2.061.799.000,- atau 99,65 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan hasil pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga yang diberdayakan, dengan target 5 lembaga	5 lembaga	100 %		
			(2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jasa KPM dan jasa terhadap masyarakat tingkat RW/RT yang terbayarkan dengan target 567 jasa	567 jasa	100 %		
			3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Alokasi anggaran sebesar Rp.235.600.000,- dengan realisasi Rp.235.600.000,- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban umum, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban umum, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan penanganan dan penanggulangan Covid-19, dengan target 18 laporan	18 laporan	100 %		
			(2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi dan edukasi penanganan 8 laporan dan penanggulangan Covid-19 target 8 laporan	8 laporan	100 %		
		KECAMATAN UJUNG	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.5.613.229.800,- dengan realisasi Rp5.030.709.558,- atau 89,62 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan, dengan target 12 dokumen	12 dokumen	100 %		
			(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran RKA SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran perubahan RKA-SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran DPA-SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran perubahan DPA-SKPD yang disusun, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun, dengan target 3 laporan	3 laporan	100 %		
			(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun, dengan target 2 laporan	2 laporan	100 %		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah, dengan target 5 kegiatan	5 kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperpleh gaji dan tunjangan ASN, dengan target 55 orang				
			(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, dengan target 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, dengan target 12 kali	12 kali	100 %		
			(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ trwulanan/ semesteran SKPD yang disusun, dengan target 12 laporan	1 laporan	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal, dengan target 10 orang	10 orang	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah, dengan target 6 kegiatan	6 kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan kantor kecamatan dan kelurahan yang disediakan, dengan target 600 bahan	600 bahan	100 %		
			(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor kecamatan dan kelurahan yang disediakan, dengan target 1.635 bahan	1.635 bahan	100 %		
			(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan kantor kecamatan dan kelurahan yang disediakan, dengan target 57.000 lembar	57.000 bahan	100 %		
			(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan, dengan target 372 eksamplar	372 eksamplar	100 %		
			(5) Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/ material yang disediakan, dengan target 6.707 bahan	6.707 bahan	100 %		
			(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan target 50 laporan	89 laporan	100 %		
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan, dengan target 1 kegiatan	1 kegiatan	100 %		
			(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan, dengan target 7 unit	7 unit	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan, dengan target 3 kegiatan	3 kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu, penyediaan jasa surat menyurat, dengan target selama 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan dan listrik, dengan target selama 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan target selama 12 bulan	12 bulan	100 %		
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah, dengan target 4 kegiatan	4 kegiatan	100 %		
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan target selama 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangank, dengan target selama 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dilaksanakan, dengan target sebanyak 4 kali	4 kali	100 %		
			(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehab gedung dan bangunan lainnya yang dilaksanakan, dengan target sebanyak 4 kali	4 kali	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Alokasi anggaran sebesar Rp.160.500.000,- dengan realisasi Rp.160.500.000,- atau 100 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan pelaksanaan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, dengan target sebanyak 5 kelurahan	5 kelurahan	100 %		
			a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dengan target 2 kegiatan	2 kegiatan	100 %		
			(1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan hasil musrenbang tingkat kecamatan dan jumlah laporan rapat koordinasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan, dengan target 5 laporan	5 laporan	100 %		
			b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, dengan target 1 kegiatan	1 kegiatan	100 %		
			(1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu pelayanan penanganan pengelolaan persampahan di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan target selama 12 bulan	12 bulan	100%		
			c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan target 1 kegiatan	1 kegiatan	100 %		
			(1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan intensifikasi penagihan PBB tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan target 2 kali	2 kali	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Alokasi anggaran sebesar Rp.1.649.754.500,- dengan realisasi Rp1.628.272.700,- atau 98,70 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<ul style="list-style-type: none"> – Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, dengan target sebanyak 19 kelompok – Persentase PKK aktif, dengan target sebanyak 6 kelompok – Persentase Posyandu aktif, dengan target sebanyak 33 posyandu 	19 kelompok 6 kelompok 33 posyandu	100% 100% 100%		
			a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan, dengan target 5 kegiatan	5 kegiatan	100 %		
			(2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RW/RT, dengan target 172 laporan	172 laporan	100 %		
			4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Alokasi anggaran sebesar Rp.248.500.000,- dengan realisasi Rp.244.700.000,- atau 98,47persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Waktu pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dengan target selama 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat dan jumlah laporan penanganan dan penanggulangan Covid-19, dengan target sebanyak 68 laporan	68 laporan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan dzikir dan tausiah, dengan target 2 kali	2 kali	100 %		
			b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Waktu pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada, dengan target selama 12 bulan	12 bulan	100 %		
			(1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan penerapan dan penegakan perda dan perkada tingkat kecamatan, dengan target Sebanyak 4 laporan	4 laporan	100 %		

Tabel 3.8. Capaian Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
1.	Kesatuan Bangsa & Politik	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.2.331.617.958,- dengan realisasi Rp.2.024.837.399,- atau 86,84 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah renstra Kesbangpol yang tersusun, dengan target 1 dokumen - Jumlah renja Kesbangpol yang tersusun, dengan target 2 dokumen	1 dokumen 2 dokumen	100 %		
			(2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(3). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD, dengan terget 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(5). Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(6). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, perjanjian kinerja, dan rencana aksi, dengan target 3 dokumen	3 dokumen	100 %		
			(7). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen penyelenggaraan PUG yang dihasilkan, dengan target 1 dokumen - Jumlah laporan evaluasi kinerja SKPD, dengan target 2 dokumen	1 dokumen 2 laporan	100 % 100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan ASN, dengan target 21 orang	21 orang	100 %		
			(2). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan, dengan target 188 jasa	188 jasa	100 %		
			(3). Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan, dengan target 1 dokumen	1 dokumen	100 %		
			(4). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(5). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran, dengan target 14 laporan	14 laporan	100 %		
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti diklat, pelatihan/ bintek/ workshop dan diklat fungsional lainnya, dengan target 5 orang	5 orang	100 %		
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi umum kantor, dengan target 100%	100 %	100 %		
			(1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor, dengan target 217 bahan	217 bahan	100 %		
			(2). Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik, dengan target 8 bahan	8 bahan	100 %		
			(3). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan, dengan target 2 paket	2 paket	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(4). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar dan majalah, dengan target 276 eksamplar	276 eksamplar	100 %		
			(5). Penyediaan Bahan/ Material	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk operasional kantor, dengan target 42 bahan - Jumlah penyediaan bahan ATK untuk operasional kantor, dengan target 447 bahan 	42 bahan 447 bahan	100 % 100 %		
			(6). Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu, dengan target 1 paket	1 paket	100 %		
			(7). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah makan dan minum rapat, dengan target 272 dos - Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan target 36 kali 	272 dos 36 kali	100 % 100 %		
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target 100 %	100 %	100 %		
			(1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, dengan target 1.500 surat	1.500 surat	100 %		
			(2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan yang terbayar, dengan target 48 tagihan	48 tagihan	100 %		
			(3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah PTT yang honornya terbayar (tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan sopir), dengan target 108 jasa - Jumlah pembayaran premi peserta jaminan keselamatan kerja, dengan target 108 jasa 	108 jasa 108 jasa	100 % 100 %		
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik, dengan target 100 %	100 %	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional, dengan target 13 unit - Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara, dengan target 13 unit 	13 unit	100 %		
			(2). Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan mebeleur yang terpelihara, dengan target 11 buah	11 buah	100 %		
			(3). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara, dengan target 8 unit - Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki, dengan target 20 unit 	8 unit	100 %		
			2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Alokasi anggaran sebesar Rp.324.778.250,- dengan realisasi Rp.317.670.950,- atau 97,81 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan, dengan target 100 %	100 %	100%		
			a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dengan target 1 laporan - Jumlah rumusan kebijakan pendidikan wawasan kebangsaan, dengan target 4 rumusan kebijakan - Jumlah peserta sosialisasi/dialog di bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, dengan target 310 orang - Jumlah laporan pelaksanaan penguatan gerakan nasional revolusi mental Program Indonesia Bersatu, dengan target 	1 laporan	100 %		
					4 rumusan kebijakan	100 %		
					310 orang	100 %		
					1 laporan	100 %		

No.	Ururan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
				1 laporan				
			(1). Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan ,dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(2). Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(3). Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(4). Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(5). Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika	1 laporan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Kebangsaan	dan sejarah kebangsaan, dengan target 1 laporan				
			3) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Alokasi anggaran sebesar Rp.1.053.510.204,- dengan realisasi Rp.902.132.536,- atau 85,63 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik, dengan target 100%	100 %	100 %		
			a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah peserta bimtek penyusunan pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada parpol, dengan target 65 orang- Jumlah dokumen laporan parpol yang menerima bantuan keuangan, dengan target 11 dokumen laporan- Jumlah laporan pertemuan antar partai politik, dengan target 3 laporan- Jumlah peserta pendidikan politik perempuan, dengan target 65 orang	65 orang 9 dok laporan parpol 3 laporan 65 orang	100 % 81,82 % 100 % 100 %	Terdapat 2 parpol yang tidak mengajukan permohonan pencairan dana hibah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan walikota	
			(1). Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2). Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			4) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Alokasi anggaran sebesar Rp.443.509.400,- dengan realisasi Rp.392.201.500,- atau 88,43 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Cakupan organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi, dengan target 100%	100 %	100 %		
			a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah laporan pertemuan antar Ormas, LSM dan Pemda, dengan target 4 laporan- Jumlah peserta sosialisasi regulasi keormasan dengan target 180 orang- Jumlah kegiatan monitoring dan verifikasi Ormas, LSM dan OKP dengan target 24 kali	4 laporan 180 orang 24 kali	100 % 100 % 100 %		
			(1). Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan penyusunan program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(2). Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas,	1 laporan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dengan target 1 laporan				
			5) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Alokasi anggaran sebesar Rp.285.958.350,- dengan realisasi Rp.282.931.250,- atau 98,94 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	Wilayah Kota Parepare berpotensi konflik agama yang ditangani, dengan target 100%	100 %	100 %		
			a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dengan target 1 laporan - Jumlah laporan Tim Terpadu P4GN, dengan target 1 laporan - Jumlah laporan pertemuan Tim terpadu penanganan satgas terorisme dan radikalisme, dengan target 2 laporan - Jumlah laporan kunjungan pemerintah daerah bersama FKUB dalam rangka membangun kerukunan umat beragama yang dilaksanakan, dengan target 4 laporan 	1 laporan 1 laporan 2 laporan 4 laporan	100 % 100 % 100 % 100 %		
			(1). Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(2). Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Alokasi anggaran sebesar Rp.1.054.724.700,- dengan realisasi Rp.588.293.100,- atau 55,78 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan jumlah potensi konflik di lingkungan masyarakat dengan target 100% - Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk dengan target 64% 	100 % 34,20 %	100 % 146,56 %		
			a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dengan target 4 laporan - Jumlah laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, dengan target 1 laporan - Jumlah peserta dialog peningkatan aktualisasi nilai-nilai kewaspadaan nasional dan peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini bagi pemuda dan pelajar terhadap potensi terorisme dan radikalisme, dengan target 125 orang - Jumlah koordinasi Tim Sinkronisasi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Pertahanan Keamanan Kota Parepare, dengan target 17 kali 	4 laporan 1 laporan 125 orang 9 kali	100 % 100 % 100 % 52,94 %	Kondisi yang masih berada di masa pandemi Covid-19, sehingga jumlah pertemuan dibatasi	

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Solusi
			(1). Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(2). Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(3). Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		
			(4). Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota, dengan target 1 laporan	1 laporan	100 %		

2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

a. Kebijakan Strategis

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan yang diambil oleh Walikota Parepare Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9. Kebijakan Strategis Tahun 2021

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Penanganan Covid-19	Peraturan Walikota Parepare Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Non Kesehatan yang Menangani <i>Corona Virus Disease 2019</i> pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare	Memberikan penghargaan atas beban tugas yang dilaksanakan dalam penanganan dan/atau penanggulangan Covid-19 dan mendorong semangat para petugas tenaga non kesehatan dalam melaksanakan upaya penanganan dan/atau penanggulangan Covid-19
2.	Kesehatan Lingkungan	Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok	Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok
3.	Pelaksanaan Ketertiban Umum	Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketertiban Umum Kota Parepare	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan

Sumber : Bagian Hukum, 2022

3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 14 bahwa ruang lingkup LKPj adalah hasil

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Maka berdasarkan hal tersebut dan dengan memperhatikan Keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Parepare Tahun Anggaran 2020, berikut diuraikan tindak lanjut rekomendasi dimaksud :

Tabel 3.11. Tindak Lanjut Keputusan DPRD Kota Parepare, Nomor 6 Tahun 2021, Tanggal 19 April 2021 tentang Rekomendasi DPRD Kota Parepare Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare Tahun Anggaran 2020

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	CAPAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Sejalan dengan keinginan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya, maka DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Daerah tetap memperhatikan pelestarian pembangunan cagar budaya berupa benda cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Karena keberadaannya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare melalui Bidang Kebudayaan telah melaksanakan beberapa program sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut dengan menyusun program prioritas kegiatan Bidang Kebudayaan Tahun 2021, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Cagar Budaya. Melakukan kajian objek cagar budaya diantaranya : Masjid Raya, Makam <i>Syekh Karama</i> dan Makam <i>Batu Makkiki'E</i>. 2. Orientasi Saka Widya Budaya. Komunikasi informasi dan edukasi kepada pelajar terkait cagar budaya Kota Parepare. 3. Pelindungan Cagar Budaya. Menugaskan juru pelihara dan pendampingan pada 3 unit bangunan cagar budaya, yaitu rumah tempat lahir BJ. Habibie, makam <i>La Cammunu Karaeng Karunrung</i> dan makam Ishak Manggabarani. 4. Konservasi benda cagar budaya pada Museum <i>Labangngenge</i>. - Juga senantiasa dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pengelolaan dan pelestarian kebudayaan di daerah, termasuk pengelolaan cagar budaya. Sehingga cagar budaya dan nilai-nilai budaya daerah dapat dijadikan objek untuk menarik minat orang dari luar untuk datang ke Kota Parepare sesuai dengan konsep teori telapak kaki. 	100,00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	a. Agar Pemerintah Daerah memkasimalkan fungsi layanan Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan di bidang kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka memaksimalkan fungsi layanan rumah sakit beberapa hal diantaranya yang telah dilakukan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie merupakan rumah sakit baru dan type B, sehingga saat <i>kredensialing</i> oleh BPJS Kesehatan ada banyak hal persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Setelah melalui proses panjang akhirnya per 1 November 2021 telah dilakukan penandatanganan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan RS dr. Hasri Ainun Habibie. Sehingga masyarakat yang peserta BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie 2. Juga untuk memaksimalkan pelayanan Kesehatan, telah dilakukan kerja sama dengan PT. Jasa Raharja. Sehingga masyarakat yang mendapat layanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas, tidak lagi memakai sistem klaim, tetapi pembiayaan langsung antara PT. Jasa Raharja dengan Rumah Sakit dr. Hasri 	100,00 %	Dinas Kesehatan

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	CAPAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		<p>Ainun Habibie</p> <p>3. Untuk meningkatkan pelayanan, penyediaan sarana prasarana menjadi perhatian dan untuk Tahun Anggaran 2022, Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan untuk pengadaan alat kesehatan/kedokteran dan peningkatan Instalasi Bedah Sentral/MOT.</p> <p>- Menjalin kerja sama dengan beberapa asuransi kesehatan lainnya seperti BNI <i>Life, In Health</i>, Sinar Mas dan lain-lain, yang sebagian besar peserta asuransinya berdomisili di Wilayah Ajatappareng. Sehingga dengan kerja sama tersebut, diharapkan pelayanan pada Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie dapat dioptimalkan.</p>		
	b. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pembangunan tower 2 Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie dengan tetap mengupayakan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.	Pemerintah Kota Parepare senantiasa melakukan upaya untuk melanjutkan pembangunan tower 2 Rumah sakit dr. Hasri Ainun Habibie dalam bentuk permohonan bantuan ke Pemerintah Pusat, mengingat kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak memungkinkan.	100,00 %	
	c. Mewujudkan rintisan perubahan status PKM Madising na Mario menjadi Rumah Sakit tipe C.	<p>Perubahan status Puskesmas Madising Na Mario menjadi Rumah Sakit Tipe C tidak diperlukan sebab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ketentuan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, maka tata cara rujukan telah dapat dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Sehingga pasien yang berobat di puskesmas dapat langsung dirujuk ke rumah sakit tipe B 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam pasal 38 ayat (2) disebutkan bahwa, dalam hal puskesmas dijadikan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah daerah harus mendirikan puskesmas baru sebagai pengganti di wilayah tersebut. Sehingga dalam hal ini, diperlukan lagi penganggaran yang lebih besar untuk mendirikan puskesmas yang baru. 3. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dalam Pasal 17 ayat (3) disebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Kelas C sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, merupakan Rumah Sakit Umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah. Dalam hal ini, maka Puskesmas Madising Na Mario 	100,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	CAPAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		<p>belum bisa memenuhi jumlah tempat tidur yang dipersyaratkan.</p> <p>4. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, disebutkan bahwa minimal 4 (empat) spesialis pelayanan dasar yang harus ada untuk Rumah Sakit Kelas C yakni penyakit dalam, anak, bedah dan obstetri dan ginekologi. Juga merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa, surat izin praktik (SIP) dokter dan dokter gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik. Baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun perorangan. Hal ini akan sulit menempatkan dokter spesialis di Rumah Sakit Madising Na Mario sebab dokter ahli di Kota Parepare sebagian besar telah memiliki 3 (tiga) tempat praktik.</p>		
3.	a. Melanjutkan upaya penanganan banjir tahunan di Kelurahan Lumpue RW. 8 dan melakukan pengerukan sedimen pada drainase yang berpotensi menimbulkan genangan air pada musim hujan.	Telah ditangani melalui Kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Lumpue pada Tahun Anggaran 2021	100,00 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b. Melakukan perbaikan fisik jalan dan lampu jalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi pemakai jalan.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan survei ke lapangan hasil pemantauan dan pengaduan - Mengidentifikasi kerusakan, sehingga perbaikan/pemeliharaan jalan dan lampu jalan bisa lebih efektif - Melakukan perbaikan/pemeliharaan jalan dan lampu jalan, sehingga kondisinya menjadi baik dan berfungsi lebih optimal sesuai dengan yang diharapkan 	100,00 %	
4.	a. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan Prasarana dan Sarana Umum (PSU/jalan kompleks) pada kompleks-kompleks perumahan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pendataan prasarana dan sarana PSU perumahan. Jumlah perumahan yang diserahkan pada Tahun 2021 sebanyak 9 perumahan yaitu ; Perum. Bukit Mutiara Indah, Perum. Orchid Residence, Perum Pepabri, Perum. Bukit Pare Permai, Perum. Griya Bukit Harmoni, Perum Emerald Zamzam, Perum. Kelapa Gading, Perum Kelapa Gading 2, dan Perum. Alam Iestari. - Jumlah total luasan RTH dan PSU yang telah diserahkan tersebut, seluas 51.154,4 m² dengan nilai total NJOP Rp 6.547.760.512,- 	100,00 %	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	b. Agar Pemerintah Daerah menambahkan volume program rumah impian dengan tetap memperhatikan kualitas yang dihasilkan.	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun Anggaran 2021 jumlah rumah impian yang dianggarkan sebanyak 45 unit. - Tahun Anggaran 2022 jumlah rumah impian yang dianggarkan sebanyak 90 unit. 	100,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	CAPAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	c. Memaksimalkan anggaran betonisasi lorong untuk wilayah Kecamatan Bacukiki.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anggaran betonisasi untuk wilayah Kecamatan Bacukiki pada Tahun Anggaran 2022 sebesar sebesar Rp.1.819.359.000,- - Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 meningkat hingga mencapai Rp.3.936.029.774,- 	100,00 %	
5.	a. Agar Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas pasar murah bagi masyarakat kurang mampu dengan cara meningkatkan nilai subsidi Pemerintah dan menambah jumlah target sasaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dialokasikan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.746.675.000,- untuk pelaksanaan pasar murah yang menyediakan bahan pokok bersubsidi antara lain : beras, gula pasir, minyak goreng, susu, terigu serta sirup (dalam satu paket kupon) - Jumlah kupon yang disiapkan sebanyak 9.224 yang disebar di 4 (empat) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan melalui 3 tahap pasar murah (Ramadhan, Idul Adha dan Natal) - Calon penerima kupon pasar murah telah melalui tahap verifikasi oleh pihak kelurahan dan divalidasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga potensi untuk tidak tepat sasaran dapat diminimalkan 	100,00 %	Dinas Perdagangan
	b. Hendaknya bantuan peralatan usaha yang disalurkan kepada masyarakat dan pelaku UMKM memenuhi standar mutu dan kualitas barang demi efektifitas dan efisiensi penggunaannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk pemberian bantuan peralatan usaha kepada masyarakat pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.130.692.000, melalui pagu sektoral maupun pagu kewilayahan dengan jumlah kelompok penerima manfaat sebanyak 482 kelompok. - Dalam memenuhi mutu dan kualitas barang, maka diberikan spesifikasi, serta harga barang yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam pemilihan penyedia agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. 	100,00 %	
6.	a. Dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, maka direkomendasikan untuk melakukan penambahan personil secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.	Telah diusulkan pemetaan kebutuhan PNS Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan telah ada kuota Dinas Satuan Polisi Pamong Praja pada penerimaan CPNS Tahun 2021 sebanyak 3 orang	100,00 %	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	b. Diperlukan sinergitas lintas sektoral antara Satuan Polisi Pamong Praja, serta jajaran TNI/Polri dalam rangka menciptakan situasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kondusif.	Dalam pelaksanaan tugas dalam rangka menciptakan situasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif, maka Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare telah bersinergi dengan lintas sektoral, khususnya jajaran TNI dan Polri	100,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	CAPAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
7.	Dalam rangka memaksimalkan tugas pokok dan fungsi tenaga pemadam kebakaran, maka diharapkan Pemerintah Daerah untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemadam kebakaran, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pemadam kebakaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemadam kebakaran telah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. - Untuk Tahun 2020 telah diadakan sarana dan prasarana berupa : alat pemadam api ringan sebanyak 18 unit, peralatan kerja pemadam kebakaran dan penyelamatan sebanyak 18 jenis, serta pengadaan hidran sebanyak 3 unit yang telah ditempatkan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ujung, Kecamatan Soreng dan Kecamatan Bacukiki - Terkait kesejahteraan tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan, telah dilakukan dari tahun ke tahun sesuai kemampuan keuangan daerah. Untuk saat ini jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Parepare sebesar Rp.1.900.000,- per orang. Jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan tersebut, termasuk yang tertinggi di Sulawesi Selatan. - Juga petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 	100,00 %	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8.	a. Diperlukan upaya maksimal dalam pemuktahiran data DTKS dengan melibatkan pihak kelurahan dan dilakukan setiap bulan serta melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengimputan data DTKS	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dibangun Gedung Sekretariat Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) / Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Tingkat Kota Parepare yang berkedudukan di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana gedung yang memadai. Gedung tersebut digunakan untuk melayani pemberian informasi dan pengaduan-pengaduan dari masyarakat atau kelompok penerima manfaat (KPM). - Keterlibatan pihak kelurahan pada Tahun Anggaran 2022 akan dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berupa sarana dan prasarana gedung dan tali asih untuk petugas Puskesmas pada 2 kelurahan yang menjadi <i>pilot project</i>. Untuk keberlanjutan dan jangkauan yang lebih luas, dibutuhkan dukungan anggaran APBD untuk 20 kelurahan lainnya agar dapat lebih mengoptimalkan kinerja program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan daerah. 	100,00 %	Dinas Sosial
	b. Hendaknya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi standar mutu dan kualitas barang, demi efektifitas dan efisiensi penggunaannya.	Telah disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat. KAK tersebut memuat kualifikasi dan standar mutu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan dan menjadi kewajiban semua pihak yang terkait dengan pengadaan dimaksud. Sehingga barang yang dihasilkan aman untuk digunakan dan sesuai peruntukannya	100,00 %	
9.	a. Sebagai dampak pandemi Covid – 19, tentunya tingkat pengangguran semakin bertambah. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pengangguran Kota Parepare sesuai data terbaru yang dirilis BPS Kota Parepare per Agustus 2021 yaitu 6,72%. Terjadi penurunan sebesar 0,41% dibanding tahun 2020. 	88,00 %	Dinas Tenaga Kerja

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	CAPAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	agar melakukan <i>update</i> data tingkat pengangguran dan pencari kerja di Kota Parepare dan mengupayakan peningkatan lapangan kerja dengan memprioritaskan masyarakat Kota Parepare.	<ul style="list-style-type: none"> - Pencari kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2021 sebesar 1.254 orang. Terjadi kenaikan dari tahun 2020 sebesar 57,14%. - Terkait upaya peningkatan penyerapan tenaga dan upaya prioritas penyerapan tenaga kerja untuk masyarakat kota Parepare salah satu strategi yang diusulkan Dinas Tenaga Kerja adalah melalui penyediaan regulasi dalam bentuk Perda yang memungkinkan masyarakat Parepare mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Parepare. Di era digitalisasi saat ini, sulit dibendung masuknya tenaga kerja dari luar daerah melalui sistem rekrutmen <i>online</i>. Untuk itu dibutuhkan aturan dalam bentuk Perda, sehingga masyarakat Parepare memiliki kesempatan yang luas bekerja di daerahnya sendiri. Terkait hal ini, Dinas Tenaga Kerja telah mengusulkan melalui komisi II DPRD Kota Parepare pada tahun 2021 lalu, agar kiranya ada rancangan perda inisiatif penyelenggaraan dan perlindungan ketenagakerjaan Kota Parepare. Strategi kedua adalah optimalisasi wajib lapor lowongan dan penempatan tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan di Kota Parepare, melalui himbauan secara langsung ke perusahaan-perusahaan. 		
	b. Agar pemerintah Daerah meningkatkan kegiatan pelatihan berbasis teknologi praktis dalam rangka peningkatan keterampilan bagi warga kurang mampu demi terwujudnya kemandirian berwirausaha.	Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, telah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga pelatihan diantaranya Balai Industri Provinsi Sulawesi Selatan terkait pelatihan teknologi tepat guna pembuatan kemasan kekinian. Juga diinisiasi dengan Balai Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan akan dilakukan kerja sama untuk dilaksanakan pelatihan peningkatan produktivitas yang diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait peningkatan hasil produksi demi terwujudnya kemandirian berwirausaha.	85,00 %	
	c. Dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam pengembangan UMKM, diperlukan adanya data UMKM dalam pemberdayaan sektor riil khususnya pengembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Rekomendasi DPRD Tahun 2019 terkait hal tersebut tidak dilaksanakan dengan alasan anggaran yang tidak mencukupi. Mengingat pentingnya hal dimaksud, maka	Pemerintah Kota melalui Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare juga memfasilitasi program pemerintah berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan tujuan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM agar tetap berdaya ditengah pandemi sehingga tidak berkontribusi pada kenaikan pengangguran. Dengan adanya program BPUM yang diluncurkan dengan persyaratan melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat, maka dengan sedirinya pendataan UMKM dapat terlaksana sehingga tersedianya data UMKM tingkat Kota Parepare.	85,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	CAPAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah segera melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan semua pihak yang terkait dan segera menyusun dokumen UMKM dalam angka.			
	d. Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar masalah tenaga kerja dibawah umur mendapatkan perhatian dan pengawasan yang lebih serius serta memantau standar gaji berdasarkan Upah Minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	Pemerintah Kota Parepare sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan telah berupaya memberikan perhatian terhadap pekerja di bawah umur. Hal ini dilakuakn melalui beberapa kegiatan yang antara lain menarik pekerja anak yang bekerja disektor informal untuk dikembalikan ke dunia sekolah dalam rangka mendukung terciptanya keluarga harapan. Hal lain yang juga dilakukan tetap berkoordinasi dengan pengawas ketanagekerjaan propinsi untuk tetap berpedoman pada ketentuan aturan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pada Pasal 68 bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Untuk sektor formal di Kota Parepare tidak ditemukan adanya pekerja anak, yang ada anak bekerja di beberapa sektor non formal.	75,00 %	
10.	a. Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penambahan mobil angkutan sampah, bak sampah/tong sampah dan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) baik di kota bawah maupun di kota atas.	Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah melakukan penambahan mobil angkutan sampah sebanyak 4 unit, tempat sampah dorong krisbow yang merupakan pagu wilayah sebanyak 150 buah dan kontainer sampah sebanyak 5 unit	100,00 %	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Dalam rangka mengantisipasi cuaca buruk saat musim hujan serta banyaknya pohon di Kota Parepare yang sudah sangat tinggi rapuh, maka diperlukan adanya mobil pemangkas pohon (<i>skywalker</i>) yang mempunyai spesifikasi yang baik yang mendukung program peremajaan pohon.	Untuk Tahun Anggaran 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah melaksanakan Pengadaan Mobil Pemangkas Pohon (<i>Sky Walker</i>)	100,00 %	
11.	a. Tingginya tingkat kemacetan pada ruas-ruas jalan tertentu disebabkan kepadatan jumlah kendaraan pada waktu-waktu tertentu, banyaknya kendaraan yang parkir di badan jalan, serta bongkar muat barang dalam kota, sehingga direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar: <ul style="list-style-type: none"> – mengkaji alokasi waktu dan tempat bongkar muat barang dalam kota, dengan 	<ul style="list-style-type: none"> - Akan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal penegakan dan penindakan pelanggaran bongkar muat dalam kota yang telah diatur sesuai Peraturan Walikota Parepare Nomor 33 tahun 2016. - Akan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang terhadap kelayakan dan ketersediaan kelengkapan jalan lingkar yang merupakan jalan nasional. Sehingga layak dan aman untuk dilalui oleh kendaraan yang melintas dan angkutan barang yang bertonase berat. Hal tersebut telah diusulkan ke Kementerian Perhubungan dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX. 	100,00 %	Dinas Perhubungan

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	CAPAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	<p>memanfaatkan terminal atau gedung pinggir kota;</p> <ul style="list-style-type: none"> – mengkaji pemanfaatan jalan lingkar untuk kendaraan yang hanya melintas di Kota Parepare; dan – melakukan rekayasa jalur untuk kendaraan angkutan umum dan mobil bertonase berat (truk). 	- Rekayasa Lalulintas akan dilakukan secara menyeluruh, apabila jaringan jalan dimaksudkan sudah memadai untuk dilalui mobil angkutan yang bertonase berat. Serta, menunggu realisasi dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX.		
	b. Untuk menghindari adanya kebocoran PAD dari sektor perparkiran, diperlukan perhatian serius dari Pemerintah Daerah, maka direkomendasikan agar sistem perparkiran menggunakan e-parkir yang terkoneksi dengan Bidang Pendapatan Daerah.	UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Parepare selaku pengelola perparkiran Kota Parepare merencanakan/mengusulkan penggunaan portal untuk 3 titik parkir diantaranya ; RSUD Andi Makkasau, RS dr. Hasri Ainun Habibie, Pasar Semi Modern Lakessi. Selanjutnya semua titik parkir yang ada dalam Kota Parepare diberlakukan sistem e-parkir untuk mempermudah dalam hal pengawasan dan meminimalisir kebocoran PAD. Sehubungan hal tersebut, Dinas Perhubungan telah mengusulkan anggaran untuk pengadaan sistem e-parkir dan sementara menunggu realisasinya.	0,00 %	
12.	Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, maka direkomendasikan untuk melakukan penambahan jaringan <i>wifi</i> pada fasilitas umum dan ruang publik, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap kemungkinan penyalahgunaan akses internet negatif.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan provider untuk melakukan penambahan jalur akses layanan internet, penambahan <i>optical distribution point</i> (ODP) di wilayah traffic tinggi penggunaan internet. - Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian operasional hotspot area publik dan SKPD dan Juga berkoordinasi dengan tim teknis provider dalam hal ini PT. Telkom, untuk merespon cepat jika terjadi gangguan layanan akses Internet. - Melakukan proteksi konten negatif melalui internet sehat bekerjasama dengan provider/penyedia layanan. 	100,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
13.	a. Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah melakukan penyederhanaan dan kemudahan dalam pemberian perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Dinas PTSP serta meninjau kembali regulasi yang ada, sehingga dapat mempercepat laju investas di Kota Parepare.	- Pada prinsipnya sejak bulan Agustus 2021 pemerintah melalui Kementerian Investasi telah melakukan penyederhanaan dan kemudahan perizinan dengan meluncurkan layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dengan Pendekatan Berbasis Resiko atau yang dikenal dengan <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA), yaitu merupakan layanan daring penerbitan izin berusaha yang memudahkan pengusaha mikro sampai denagn usaha skala besar untuk mendapatkan izin usaha secara gratis	100,00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	b. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya Mall Pelayanan Publik (MPP) guna percepatan pelayanan, akurasi	- Dengan selesainya pembangunan fisik Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Parepare, maka dalam waktu tidak terlalu lama direncanakan MPP akan beroperasi. DPMPSTSP sebagai penyelenggara MPP akan melibatkan beberapa instansi lainnya, diantaranya	100,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	CAPAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	pelayanan dan fleksibilitas kerja, sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa dilaksanakan secara optimal.	: Kantor BPN, Kantor Imigrasi, Kantor Pajak, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Bank SulSelBar, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
14.	<p>a. Diperlukan sinergitas program dan kegiatan lintas sektoral dalam rangka mempercepat terwujudnya destinasi wisata di Kota Parepare.</p> <p>b. Diperlukan metodologi promosi wisata yang efektif dan efisien dalam rangka menekan besaran anggaran untuk kegiatan promosi wisata tersebut.</p>	<p>- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare secara bertahap akan melakukan pengembangan destinasi pariwisata dengan menggandeng sektor – sektor lain dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai kota tujuan pariwisata skala regional maupun nasional. Sinergitas program dan kegiatan lintas sektoral telah dilaksanakan yaitu :</p> <p>a. Bidang Destinasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam mengelola destinasi pariwisata membangun sinergitas dengan seluruh <i>stakeholder</i> dalam membangun, memelihara dan memanfaatkan destinasi yang ada di Kota Parepare.</p> <p>b. Dalam hal pemanfaatan dan keamanan destinasi pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare juga melakukan koordinasi antara dinas terkait dalam mengamankan destinasi.</p> <p>c. Terkait kebersihan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare juga membangun komunikasi dengan pihak - pihak terkait agar kebersihan destinasi terjaga dengan baik</p> <p>- Dukungan dari sektor – sektor lain sangat diperlukan dalam mengembangkan destinasi pariwisata mengingat potensi alam yang dimiliki sangat minim. Untuk itu diperlukan sinergitas antar sektor untuk mewujudkan Parepare sebagai kota tujuan pariwisata</p> <p>- Dimasa pandemi Covid – 19 sekarang ini, perilaku wisatawan cenderung berubah untuk itu diperlukan perubahan trend promosi pariwisata yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi saat ini yang diharapkan dapat menjadi upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu menekan anggaran dalam pelaksanaan promosi pariwisata di Kota Parepare, maka langkah-langkah yang dapat diambil adalah : Penggunaan media serta jejaring sosial dalam penyebarannya, pelibatan <i>influencer</i> untuk menjangkau kepercayaan wisatawan, pemanfaatan ruang virtual, dan metode pemasaran dgn menciptakan interpretasi destinasi wisata seperti konten – konten kreatif serta narasi pada destinasi wisata.</p>	<p>100,00 %</p> <p>100,00 %</p>	<p>Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	CAPAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
15.	Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah konkrit dengan menambahkan klausul dalam kontrak kerja yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah hutang retensi dengan pihak ketiga.	Telah dilakukan persuratan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Parepare, dengan nomor Surat : 900/44/BKD, tanggal 14 Januari 2022, selaku bagian yang memfasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa agar kiranya: a. SKPD yang melakukan perikatan kerjasama antara pihak ketiga disarankan agar kiranya mencantumkan atau menambahkan klausul didalam kontrak yang mengatur batas waktu permintaan retensi oleh rekanan yang disepakati Bersama. Sehingga jika sampai batas waktu yang telah ditentukan, retensi belum diminta atau dilakukan proses permintaan pembayaran, maka dengan sendirinya retensi tersebut akan dihibahkan kepada pemerintah daerah, b. Tambahan klausul yang dimaksud, berbunyi : “Apabila masa pemeliharaan selesai dan setelah 3 (tiga) bulan pihak ketiga tidak meminta pembayaran dan atas persetujuannya, maka hutang retensi dijadikan sebagai pendapatan lain-lain dan hutang retensi didebet dari neraca”.	100,00 %	Badan Keuangan Daerah
16.	a. Direkomendasikan kepada BKPSDM agar dapat berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan seluruh SKPD, terkait dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kebutuhan Jabatan fungsional masing-masing SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Parepare telah melakukan pemetaan jumlah pejabat fungsional yang dibutuhkan - Selanjutnya, dalam rangka menginventarisir jumlah jabatan fungsional tersebut, BKPSDMD telah melakukan pemetaan jumlah pejabat fungsional yang dibutuhkan berdasarkan usulan masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan telah dilakukan pengangkatan dalam jabatan fungsional secara bertahap sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare. - BKPSDMD telah melakukan penyetaraan 177 orang pejabat administrasi kedalam pejabat fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional 	80,00 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	b. Agar penempatan pegawai dilakukan dengan memberikan prioritas terhadap kompetensi, profesionalitas, dan integritas pegawai tersebut, sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja Pemerintahan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - BKPSDMD telah melakukan penyusunan Dokumen Manajemen Talenta yang berisi pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dan Rencana Suksesor suatu jabatan - BKPSDMD dalam proses pengisian dan penempatan pegawai mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan memperhatikan 4 hal, yaitu ; kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi. 1. Kualifikasi yaitu terkait dengan latar belakang pendidikan dan rekam jejak. 2. Kompetensi yaitu terkait dengan kemampuan ASN terhadap penguasaan 	80,00 %	

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	CAPAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		<p>bidang tertentu,</p> <p>3. Kinerja yaitu terkait dengan capain hasil <i>output</i> dan <i>outcome</i> terhadap pelaksanaan tupoksi termasuk penilaian dari atasan atau pimpinan.</p> <p>- Selain itu, dalam rangka pengembangan karir para ASN lingkup Pemerintah Kota Parepare, telah dilakukan kegiatan penyusunan pola pengembangan karir untuk pemetaan dan pembinaan ASN yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukan keterkaitan dan keserasian antara kualifikasi dan kompetensi seorang PNS.</p>		
	c. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera mengisi Jabatan lowong dalam rangka efektifitas pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.	Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Parepare telah melaksanakan seleksi terbuka pada bulan Juni Tahun 2021 dan telah selesai sampai tahap peringkat 3 (tiga) besar peserta terbaik pada bulan Oktober, dan telah dilaksanakan pelantikan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama pada tanggal 30 November 2021 dan 27 Desember 2021.	85,00 %	
17.	a. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menerapkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Dokumen Anjab dan ABK dan Dokumen Evaluasi Jabatan sebagai salah satu persyaratan Pemberian TPP - Menetapkan Tim Pelaksana pemberian TPP (Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 1095 Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Derah Kota Parepare) - Melakukan perhitungan besaran TPP dan telah dianggarkan pada APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2022 - Menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang TPP - Mempersiapkan proses validasi perhitungan pemberian TPP Tahun 2022 ke Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi <i>simona.kemendagri.go.id</i> 	80,00 %	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	b. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk tidak menempatkan pekerjaan fisik pada Perubahan APBD tahun berkenan.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan terhadap APBD yang merupakan salah satu agenda rutin daerah sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun	100,00 %	Bappeda

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	CAPAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		<p>berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2020. - Dalam perubahan APBD, penganggaran kegiatan/sub kegiatan juga perlu memperhatikan/memperkirakan penyelesaian kegiatan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sehingga Rekomendasi DPRD agar tidak menempatkan pekerjaan Fisik pada Perubahan APBD tahun berkenaan menjadi masukan yang baik dan akan menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Parepare.. 		
18.	Merekomendasikan untuk meningkatkan profesionalitas pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja SKPD dan aparatur sipil negara	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka meningkatkan profesionalitas pengawasan, telah ditugaskan ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bentuk <i>Coaching Clinic</i> Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Pelatihan Pendampingan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Diklat LPPD, pembinaan budaya kerja tahun 2021, Pelatihan Manajemen Kepegawaian TA 2021, Diklat Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Bimtek Penyusunan Proposal Inovasi, Pelatihan Pengelolaan Kearsipan Dinas Perpustakaan Kota Parepare, <i>Coaching Clinic</i> terkait <i>Probit Audit</i>, Diklat Reviu RKA PD, <i>Coaching Clinic</i> Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2021. - Pembinaan terhadap kinerja SKPD dan aparatur sipil negara dilakukan dalam bentuk kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Parepare dan beberapa kegiatan pengawasan yang bersifat <i>Mandatory Audit</i>. Selain itu, dilakukan pula <i>Probit Audit</i> terhadap beberapa paket pekerjaan kontruksi. Dilakukan pula pendampingan dalam rangka mengembangkan wilayah Zona Integritas dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi. 	100,00 %	Inspektorat
19.	a. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan, maka direkomendasikan untuk melakukan penertiban, pembinaan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan LSM di Kota Parepare	Telah dianggarkan pada APBD Tahun 2021 pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antar Ormas, LSM dan Pemda, sosialisasi regulasi keormasan, serta monitoring dan verifikasi Ormas, LSM dan OKP	100,00 %	Badan Kesbang dan Politik

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI	CAPAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	b. Agar Badan Kesbang dan Politik melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana hibah bantuan keuangan kepada partai politik.	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Kesbangpol senantiasa memberikan pemahaman kepada pengurus parpol tentang prosedur penyaluran bantuan keuangan parpol serta memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan keuangan parpol dengan harapan agar pengurus parpol mampu melaksanakan pengelolaan bantuan keuangan sesuai ketentuan dan dapat menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol yang bersumber dari APBD tepat waktu, transparan dan akuntabel - Kegiatan ini Pada Tahun 2021 telah diprogramkan pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik yang dilaksanakan dalam bentuk bimtek penyusunan pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada parpol dan Koordinasi berkala partai politik. 	100,00 %	
RATA-RATA CAPAIAN TINDAK LANJUT			94,00 %	

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Parepare mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian yang langsung ditujukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang menangani tugas pembantuan yang diterima.

Uraian pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud, sebagai berikut :

1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan yaitu : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Pembantuan Kementerian Perdagangan RI, Nomor : SP.DIPA - 090.02.4.185159/2021, tanggal 23 November 2020.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kota Parepare mendapatkan dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Adapun program, kegiatan dan alokasi anggaran tugas pembantuan yang diterima berdasarkan SKPD teknisnya, sebagai berikut :

- Program Perdagangan Dalam Negeri, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan.
- Alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pembantuan, Pemerintah Pusat menyiapkan sebesar Rp.4.000.000.000,- melalui dana APBN Tahun 2021

3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Kegiatan Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan, yaitu pembangunan Pasar Rakyat Lakessi II dengan luas bangunan 426 m² yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021 s.d. 31 Desember 2021, yang berlokasi di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.940.570.500,- atau 98,51 persen.

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a) Permasalahan

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perdagangan berjalan dengan baik, sehingga tidak ada permasalahan.

b) Solusi

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perdagangan berjalan dengan baik, sehingga tidak ada permasalahan yang membutuhkan solusi penanganan

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Parepare Tahun Anggaran 2021, memiliki makna yang penting dan strategis dalam kesinambungan pembangunan daerah, serta dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Parepare telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta menangani dampak pandemi Covid-19.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kota Parepare periode 2018 - 2023. Untuk memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pencapaian RPJMD, rencana kerja pemerintah daerah Kota Parepare tahun 2021 mengangkat tema pembangunan, yaitu **"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Melalui Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Publik"**.

Dengan tema itu ditetapkan prioritas arah kebijakan diantaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Selanjutnya, prioritas juga diberikan kepada target kinerja yang belum tercapai pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Juga pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 telah disesuaikan sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, melalui *refocussing* dan realokasi anggaran perangkat daerah.

Capaian pelaksanaan pembangunan selama tahun 2021 ini, sesungguhnya merupakan kerja keras dari pemerintah daerah yang didukung sepenuhnya oleh DPRD Kota Parepare dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama Tahun 2021 tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergitas semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Namun disadari, selama pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2021 ditengah pandemi Covid-19 yang melanda, terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Untuk itu, analisa dan evaluasi dipergunakan sebagai pijakan melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik demi tercapainya *good governance* pada masa mendatang.

Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya kepada seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya percepatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian laporan ini disusun dan disampaikan kepada DPRD Kota Parepare, sebagai salah satu wujud dari pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021. Melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, diharapkan mendapat masukan, saran dan evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya, khususnya dalam

penanganan dan upaya pemulihan ekonomi sebagai upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melanjutkan karya pengabdian membangun Kota Parepare menjadi lebih baik lagi.

Terima kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


WALIKOTA PAREPARE,
DR. H. M. TAUFAN PAWE, SH, MH

